Dr. Siswanto, M.Pd.I

Pendidikan Islam dalam DIALEKTIKA PERUBAHAN

Pena
SALSABILA

IAIN MADURA

Dr. Siswanto, M.Pd.I

PENDIDIKAN ISLAM DALAM DIALEKTIKA PERUBAHAN

Pena Salsabila

PENDIDIKAN ISLAM DALAM DIALEKTIKA PERUBAHAN

Diterbitkan oleh:
Pena Salsabila, Desember 2015
Jl. Tale II No.1 Surabaya
Telp. 031-72001887, 081249995403
(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

Anggota IKAPI
No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. Siswanto, M.Pd.I
Editor : Abdul Aziz M.Pd.I.

Lay out dan desain sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-1262-49-8
vi+152; 14.5 cm x 21 cm

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada hadirat Ilahi Rabbi Allah SWT. karena hanya dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan,* dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga menjadi bahan kajian para mahasiswa, pendidik dan pemerhati pendidikan Islam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pendidik muslim yang telah membimbing manusia dari keterbelakangan dan kejumudan menuju era kemajuan dan peradaban yang sarat dengan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memperkaya literatur di bidang pendidikan Islam sekaligus sebagai bahan pendamping literatur lain tentang pendidikan Islam yang telah hadir sebelumnya. Sasaran dari penulisan ini adalah mahasiswa dan atau dosen yang berkeinginan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan aspek-aspek pendidikan Islam. Bahan awal penulisan buku ini berasal dari tulisan-tulisan penulis yang tersebar di beberapa jurnal ilmiah yang kemudian penulis revisi dan dikembangkan dengan memberikan tambahan materi seperlunya sehingga pembahasan lebih komprehensif dan faktual.

Melalui buku ini, penulis menawarkan konseptualisasi dan teorisasi pendidikan Islam ketika bersentuhan dan berdialog dengan beragam perubahan dan pembaruan. Di antara tersebut meliputi urgensi ilmu pendidikan Islam, pemahaman komponen-komponen sebagai suatu sistem pendidikan Islam menjadi landasan penting dalam

membangun suatu pendidikan yang terarah sesuai dengan nilai-nilai keislaman, memotret lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai pusat pembinaan moral dan karakter, dan dinamika pemikiran pendidikan Islam dalam berbagai ranah kehidupan sosial.

Penulis menyadari betatapun kesungguhan dan upaya telah dilakukan, tetapi diyakini apa yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan mengandung kelemahan baik dari segi isi, analisis, bahasa dan teknis penulisan yang dilakukan. Betapa penulis menyadari bahwa melakukan konseptualisasi pemikiran menjadi suatu pekerjaan yang amat berat. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan koreksi konstruktif guna menyempurnakan penulisan pada masa-masa mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan petunjuk dari Allah SWT, mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam dan bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Pamekasan, 10 Nopember 2015

Dr. Siswanto, M.Pd.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul – i
Pengantar Penulis – iii
Daftar Isi – v

BAB 1 PENDAHULUAN – 1

BAB 2 DISKURSUS ILMU PENDIDIKAN ISLAM – 5
A. Hakikat Ilmu Pendidikan Islam – 5
B. Konsep Pendidikan Islam – 9
C. Pola Dasar dan Fungsi Pendidikan Islam – 16

BAB 3 KOMPONEN DASAR PENDIDIKAN ISLAM – 19
A. Tujuan Pendidikan Islam – 19
B. Guru/Pendidik – 26
C. Peserta Didik – 52
D. Kurikulum Pendidikan Islam – 58
E. Metode Pendidikan Islam – 73
F. Evaluasi Pendidikan Islam – 77

BAB 4 POTRET LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM – 83
A. Pesantren: Unsur-unsur dan Karakteristiknya – 83
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia – 95

BAB 5 PTAI SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN MORAL – 107
A. Budaya Hidup Konsumerisme – 107
B. Gaya Hidup Global: Refleksi Pergeseran Nilai – 110

C. Nilai Strategis Pendidikan Agama - 114
D. Peran PTAI - 117
E. Wawasan Akademik yang Lebih Islami - 122

BAB 6 PENDIDIKAN ISLAM DALAM TANTANGAN PLURALISME AGAMA - 129
A. Fenomena Keberagamaan - 129
B. Pluralisme Agama dalam Perbincangan - 132
C. Universalitas Islam - 136
D. Pendidikan Agama Berbasis Pluralisme - 139
E. Rekonstruksi Metodologi Pendidikan Islam - 142

BAB 7 REORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI - 147
A. Realitas Pendidikan - 147
B. Konsep Sosiologis Masyarakat Madani - 149
C. Karakteristik Masyarakat Madani - 154
D. Membangun Masyarakat Madani Melalui Pendidikan - 157
E. Reorientasi Pendidikan Islam - 162

BAB 8 PENUTUP - 175

DAFTAR PUSTAKA - 177

1
PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan. Makna penting pendidikan ini telah menjadi kesepakatan yang luas dari setiap elemen masyarakat. Rasanya, tidak ada yang meningkari, apalagi menolak, terhadap arti penting dan signifikansi pendidikan terhadap individu ataupun juga terhadap masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan. Pendidikan akan senantiasa berdialog dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat menuju suatu dinamika sosial yang sesuai dengan tuntutan kehidupan.

Demikian pula Pendidikan Islam yang dalam gerak sejarahnya selalu mengarah pada progresivitas dan transformativitas kehidupan manusia, sehingga eksistensinya pun mesti pula memuat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, tidak hanya berdimensi pragmatis, tetapi juga idealis; tidak hanya bercorak profan, tetapi juga sakral; dan tidak hanya sarat dengan muatan pengetahuan, tetapi juga moral. Esensi pendidikan Islam diselenggarakan sebagai pengupayaan ke arah perubahan-perubahan perilaku yang lebih "baik", dan meniscayakan adanya perubahan-perubahan sebagaimana yang diinginkan, sesuai

dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh suatu lembaga pendidikan. Perubahan yang dimaksud dapat bernuansa progresivitas humanitas, baik konteks hubungan dirinya dengan masyarakat, alam maupun Tuhannya.

Pendidikan Islam sebagai lembaga yang ditugaskan untuk pengembangan humanitas manusia, pada dasarnya juga mengemban tugas pembinaan moral, karena memang manusia diciptakan Tuhan untuk moral, sehingga didalamnya nilai-nilai moral mestilah menjadi bagian yang integral dalam setiap usaha kependidikannya. Secara struktural-formal tidak mesti hanya sekedar tercantum dalam orientasi dan tujuan pendidikan Islam semata, tetapi hendaklah juga terjalin kelindan dalam setiap denyut nadi aktivitas kependidikan Islam itu sendiri.

Adanya fenomena yang berlangsung pada dunia pendidikan selama ini, menjadikan perilaku moral tertinggal hanya pada tataran idealitas tujuan pendidikannya, sementara pada tataran praksis-metodologis pembelajaran nyaris kurang tersentuh, untuk tidak mengatakan terabaikan atau terlupakan, menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah mulai kehilangan jati dirinya, pada hal dalam konteks yang terakhir inilah sesungguhnya upaya kependidikan Islam itu mesti dilangsungkan secara sistematis dan rasional.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ada satu aspek yang dapat kita jadikan sebagai satu titik untuk melihat konteks pendidikan secara lebih luas, yaitu aksentuasinya yang lebih berorientasi kepada aspek material. Tanpa menafikan dimensi positif yang menjadi tujuan kecenderungan ini, harus jujur dan objektif diakui bahwa dimensi semacam ini hanya akan menghasilkan *output* yang memiliki keterampilan teknis pragmatis selaras dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Orientasi semacam ini merupakan sebuah bentuk distorsi terhadap hakikat

kemanusiaan sebab manusia juga memiliki dimensi lain, yaitu dimensi rohaniyah.[1]

Oleh karena itu, aspek penting yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan adalah dengan melakukan reorientasi terhadap arah pendidikan. orientasi fundamental pada dataran teoritis pendidikan Islam adalah dengan menegaskan kembali bahwa prinsip pertama dan utama pendidikan adalah bagi dan untuk kemanusiaan. Pendidikan yang sejalan dengan kemanusiaan adalah pendidikan yang melibatkan persoalan mendasar mengenai pandangan hidup sejarah, serta dunia objektif. Jika kerangka ini dijadikan landasan secara konsekuen, proses pendidikan seharusnya diarahkan kepada tercapainya "kesempurnaan" anak didik, yaitu terbentuknya pribadi bermoral (*moral characters*).[2]

Pemahaman tentang konsep atau teori pendidikan Islam dan aplikasinya dalam proses pendidikan yang dijalankan di lingkungan masyarakat ataupun sekolah/madrasah secara integratif akan memberikan hasil yang maksimal dan dapat menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan kependidikan pada masa mendatang. Masing-masing lembaga pendidikan berdiri secara otonom, namun tetap harus saling sapa dan melengkapi. Problem apapun dalam kehidupan ini, seperti problem politik, ekonomi, agama, dan hukum harus dikaitkan dengan pendidikan sehingga solusinya akan lebih komprehensif dan humanis. Pendidikan yang baik akan membantu menyelesaikan berbagai kasus dan meningkatkan kecerdasan peserta didik, baik secara intelektual, emosional dan spiritual.[3]

---

[1]As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 56.
[2]Ibid., hlm. 64.
[3] Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm.6.

Memahami teori pendidikan Islam dapat dilakukan dari berbagai perspektif guna mengembangkannya agar menjadi lebih fungsional, progresif dan faktual. Selama ini, proses pendidikan Islam hampir selalu dibatasi oleh tembok sekolah tanpa diusahakan untuk dibuka lebar sehingga pendidikan dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja.

Dengan paradigma yang demikian, maka pendidikan Islam akan menjadi kekuatan sosial (*social empowerment*) dalam berdialektika dengan perubahan. Pada gilirannya pendidikan Islam dapat mencetak ahli yang memiliki kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif di tengah kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi agen perubahan sosial di tengah kehidupan sosial yang centang perentang.*

2
DISKURSUS ILMU PENDIDIKAN ISLAM

A. Hakikat Ilmu Pendidikan Islam

Dalam memberikan batasan tentang ilmu pendidikan Islam, para pemikir pendidikan Islam memiliki pandangan yang beragam. Muzayin Arifin memberi batasan Ilmu Pendidikan Islam sebagai studi tentang sistem dan proses kependidikan yang berdasarkan Islam untuk mencapai produk atau tujuannya, baik studi teoritis maupun praktis.[1] Achmadi mendefinisikan Ilmu Pendidikan Islam sebagai ilmu yang mengkaji pandangan Islam tentang pendidikan dengan menafsirkan nilai-nilai ilahi dan mengkomunikasikan secara timbal balik dengan fenomena dalam situasi pendidikan.[2]

Sementara itu, Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang digunakan dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam sebagai

---

[1]M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 9.

[2]Achmadi, "Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan", dalam *Paradigma Pendidikan Islam,* ed. Ismail SM, et.al. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar-Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2001), hlm. 25 .

pedoman umat manusia khususnya umat Islam. Isi ilmu adalah teori. Teori adalah suatu konsep pemikiran manusia yang disusun secara sederhana tentang suatu bidang kehidupan yang tersusun berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan dan mendukungnya. Teori merupakan isi ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui pendekatan empiris-rasional. Sehingga menjadi suatu produk pemikiran yang teruji dengan praktek yang berhubungan dengan berbagai variabel. Maka isi ilmu pendidikan adalah teori-teori tentang pendidikan; ilmu pendidikan Islam merupakan teori tentang pendidikan berdasarkan ajaran Islam.[3]

Secara filosofis, ilmu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang di dasari nilai-niai Islam yang bersumber al-Qur'an dan Sunnah. Dengan pikirannya, manusia diperintahkan untuk menggali nilai-nilai di dalam al-Qur'an dan Sunnah tentang ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuanlah manusia bisa memahami fenomena alam sekitarnya sehingga menjadi bekal dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Dan dengan pengetahuan dan teknologi yang dimikinya manusia disuruh untuk memahami alam semesta sejauh kemampuan rasionya.

Dengan demikian, kajian dalam Ilmu Pendidikan Islam berisi seputar teori-teori tentang pendidikan Islam yang dihasilkan melalui pendekatan empiris-rasional. Hal ini berbeda dengan Filsafat Pendidikan Islam yang cara kerjanya menggunakan pendekatan rasional terhadap objek pendidikan yang abstrak.[4] Kendati berbeda, keduanya bisa dipertemukan. Hasil-hasil kerja filosofis tentang pendidikan

---

[3]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.12.
[4]Ibid, hlm. 12-15.

Islam menjadi sumber berharga bagi pengembangan Ilmu Pendidikan Islam.

Penggunaan pendekatan empiris-rasional dalam ilmu keislaman (termasuk Ilmu Pendidikan Islam) akan menghadapi beberapa kendala karena banyak ajaran Islam yang tidak bisa didekati secara empiris-rasional. Bahkan ajaran pokok Islam, tentang tauhid, sulit dipahami jika hanya menggunakan pendekatan empiris-rasional. Karena alasan-alasan di atas, maka bisa dimaklumi apabila pembahasan tentang Ilmu Pendidikan Islam seringkali bersentuhan dengan Filsafat Pendidikan Islam. Yang terpenting, agar Ilmu Pendidikan Islam berbeda dengan Filsafat Pendidikan Islam, maka objek studi Ilmu Pendidikan Islam haruslah tetap sesuatu yang empiris tentang pendidikan. Sedangkan pendekatannya bisa menggabungkan antara pendekatan *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī*.[5]

---

[5]Mohammad Kosim, *Ilmu Pendidikan Islam* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm.6. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Lihat Riri Fitria Rahmawati, "Tipologi Pemikiran Ke-Islam-an dalam Perspektif Muhammad Abid al-Jabiri," dalam *Academia, Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Kebudayaan Islam*, Lembaga Penelitian IAI. Nurul Jadid Probolinggo, (Vol. 2, No.2, September 2007), hm.18. Irfani dalam bahasa Arab semakna dengan kata ma'rifat yaitu pengalaman atau pengetahuan langsung dengan obyek pengetahuan. Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyf, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks tetapi dengan olah ruhani, dimana dengan kesucian hati, diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya.

Di samping itu, dalam penerapannya, ilmu pendidikan Islam harus memenuhi persyaratan ilmiah sehingga dapat menemukan dan menghasilkan suatu kebenaran. Persyaratan ilmiah ilmu pendidikan Islam adalah memiliki objek yang jelas, pandangan, teori, dan hipotesis yang bersumber ajaran Islam, metode analisa yang bernafaskan Islam, dan struktur keilmuan definitif yang satu sama lain saling berkaitan sebagai ilmu yang mandiri.

Dengan persyaratan yang demikian, maka ilmu pendidikan Islam dapat melakukan tugas-tugas ilmiah sebagai berikut:

a. Melakukan pembuktian terhadap teori-teori ilmu pendidikan Islam
b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspek bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Sebagai pengoreksi terhadap kekurangan teori-teori ilmu pendidikan Islam.

Dalam operasionalnya ilmu pendidikan Islam berorientasi pada pemahaman kepada Allah yang maha mengetahui sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Selain itu adalah pengembangan kehidupan sosial dalam

---

Bagi kalangan *irfaniyyun* pengetahuan tentang Tuhan tidak diketahui melalui bukti-bukti empiris-rasional tetapi melalui pengalaman langsung. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furû` kepada yang asal; irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan ruhani pada Tuhan, burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi. Rasio inilah yang memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera.

masalah muamalah dengan masyarakat. Dan pengembangan alam sekitar yang memiliki kekayaan untuk digali dan diolah untuk kesejahteraan dunia-akhirat.

Jika dihubungkan dengan filsafat pendidikan Islam maka ilmu pendidikan Islam bertugas menganalisa secara mendalam tentang masalah-masalah pendidikan sekaligus penyelesaiannya. Ilmu pendidikan tidak hanya melandasi tugasnya dengan teori-teori tapi juga fakta empiris dan praktis yang di dalam masyarakat. Sehingga nantinya terjadi interaksi antara ilmu pendidikan Islam dengan masyarakat yang saling mengisi satu sama lain. Ilmu pendidikan Islam membutuhkan landasan yang ideal, rasional, universal dan sistematik tentang hakikat pendidikan.

B. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan adalah segala upaya, latihan dan sebagainya untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia baik secara mental, moral dan fisik untuk menghasilkan manusia yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi luhur. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang mencangkup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia sebagai hamba Allah sebagaimana Islam sebagai pedoman kehidupan dunia dan akhirat.

Konsep pendidikan Islam seringkali mengundang keragaman arti. Pendidikan Islam seringkali dimaksudkan sebagai pendidikan dalam arti sempit, yaitu proses belajar mengajar di mana agama Islam menjadi "*core curriculum*". Pendidikan Islam merupakan rangkaian proses yang sistematis, terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik, sehingga mampu melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi dengan

sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai *ilahiyah* yang didasarkan pada ajaran agama pada semua dimensi kehidupannya.

Al-Attas memandang pendidikan sebagai suatu proses penanaman nilai bagi anak didik (manusia),[6] yang mengacu kepada metode dan sistem penanaman secara bertahap, dan kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut. Sehingga dalam pandangannya, pendidikan Islam harus terlebih dahulu memberikan pengetahuan kepada peserta didik berupa pengetahuan tentang manusia disusul pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dengan demikian dia akan tahu jati dirinya dengan benar, "tahu dari mana ia, sedang di mana ia, dan mau ke mana ia kelak". Jika ia tahu jati dirinya maka ia akan selalu ingat dan sadar serta mampu memposisikan dirinya, baik terhadap sesama makhluk, apalagi terhadap Khaliq.[7]

Berkaitan dengan definisi pendidikan, al-Attas lebih sepakat dengan menggunakan kata "*al-ta'dib"*(*masdar* dari kata *Addaba*), yang dapat diartikan pada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik. Orientasi kata *ta'dib* lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Merujuk pada batasan tersebut, menurut al-Attas, penggunaan terma *al-ta'dib* lebih cocok

---

[6] Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur : ABIM, 1980), hlm.13.

[7] Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.37. Amrullah Ahmad menilai, bahwa konsep pendidikan al-Attas mengandung proses pengajaran seseorang dalam tatanan kosmis dan sosial yang akan mengantarkannya untuk menemukan fungsinya sebagai khalifah. Lihat Amrullah Ahmad, "Kerangka Dasar Masalah Pendidikan Islam," dalam ed. Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm.54.

digunakan dalam diskursus pendidikan Islam dibandingkan dengan kata *al-tarbiyah*[8] dan *al-ta'lim*.[9] Hal ini disebabkan,

[8] Kata "*al-tarbiyah*" merupakan *masdar* dari kata "*rabba*" yang berarti mengasuh, mendidik dan memelihara. Lihat Ibn Mansur, *Lisan al-Arab,* vol. 5 (Kairo: dar al-Misriyah, 1992), hlm.98. Dalam leksikologi al-Qur'an, penunjukkan kata *al-tarbiyah* yang merujuk kepada pengertian pendidikan secara implisit tidak ditemukan. Penunjukkannya pada pengertian pendidikan hanya dapat dilihat dari istilah lain yang seakar dengan kata *al-tarbiyah* yaitu *al-rabb, rabbayani, nurabbiya* dan *rabbaniy*. Sedangkan dalam hadith Nabi hanya ditemukan lewat terma *rabbaniy*. Lihat Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.87. Bila tema *al-tarbiyah* dihubungkan dengan *madi*-nya (*rabbayaniy*) yang tertera dalam QS. 17:24 dan bentuk *mudhari'*-nya (*murabbiy dan yurbiy*) yang tertera dalam QS.26:18 dan QS. 2: 276, maka kata *tarbiyah* memiliki arti mengasuh, bertanggung jawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan dan memproduksi serta menjinakkannya, baik yang mencakup aspek jasmaniyah maupun rohaniyah. Fahr al-Raziy mengartikan terma *rabbayaniy* sebagai bentuk pendidikan dalam arti luas. Terma tersebut bukan saja menunjukkan makna pendidikan yang bersifat ucapan (*domain kognitif*), tetapi juga meliputi pendidikan pada aspek tingkah laku (*domain afektif*). Lihat Fahr al-Raziy, *Tafsir Fahr al-Raziy,* vol. 21 (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), hlm.191. Sayyid Quthub menafsirkan terma tersebut sebagai upaya pemeliharaan jasmaniah peserta didik dan membantunya menumbuhkan kematangan sikap mental sebagai pancaran *akhlak al-karimah* pada diri peserta didik. Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* vol. 15 (Beirut: Dar al-Ahya', tt), hm.15.

[9] Kata "*al-ta'lim*" merupakan *masdar* dari kata '*allama* yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Lihat Mansur, *Lisan al-Arab,* hlm.370. Dari pengertian ini, terlihat pengertian pendidikan yang dimaksudkan mengandung makna yang terlalu sempit. Pengertian *ta'lim* hanya sebatas proses pentransferan seperangkat nilai antara manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai nilai yang ditransfer secara *kognitif* dan *psikomotorik*, akan tetapi tidak dituntut pada *domain afektif*. Namun, menurut Abd al-Fatah Jalal, pengertian *ta'lim* secara implisit juga menanamkan aspek afektif. Lebih jelas, Abd al-Fatah Jalal mengemukakan bahwa *ta'lim* merupakan proses pemberian pengetahuan pemahaman, pengertian tanggung jawab dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian (*tazkiyah)* atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan

karena pengertian *ta'lim* hanya ditujukan pada proses pentransferan ilmu (proses pengajaran), tanpa adanya pengenalan pengenalan lebih mendasar pada perubahan tingkah laku. Sedangkan terma *al-tarbiyah* penunjukan makna pendidikannya masih bersifat umum. Terma ini berlaku bukan saja kepada proses pendidikan pada manusia, akan tetapi juga ditujukan kepada selain manusia. Padahal diskursus pendidikan Islam hanya ditujukan kepada proses-proses pendidikan yang dilakukan manusia dalam upaya memiliki kepribadian muslim yang utuh, sekaligus membedakannya dengan makhluk Allah lainnya. Jadi, *al-ta'dib* telah mencakup kata *al-tarbiyah* dan *al-ta'lim*.[10]

Pendidikan Islam bisa pula berarti lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang menjadikan Islam sebagai identitasnya, baik dinyatakan dengan jelas maupun tersamar. Perkembangan terakhir, pendidikan Islam diberi arti lebih substansial sifatnya, yakni sebagai suatu iklim pendidikan *(education atmosphere),* yaitu suatu suasana pendidikan yang islami, memberi nafas keislaman pada semua elemen sistem pendidikan yang ada.[11]

Berkaitan dengan hal tersebut, Muhaimin mendefinisikan pendidikan Islam dengan; *pertama,* Pendidikan (menurut) Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah. Sehingga berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan sumber dasar tersebut.

---

menjadikan manusia berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Lihat Abd al-Fatah Jalal, *Asas-asas Pendidikan Islam* ter. Herry Noer Ali (Bandung: Diponegoro, 1988), hlm.30

[10]Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), hlm.5.

[11]Tobroni, *Pendidikan Islam,* hlm.13.

Kedua, Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan (agama) Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan hidup) dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat berupa: a) kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seorang atau anak didik dalam menanamkan dan/atau menumbuh-kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya, b) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan/atau tumbuhkembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

Ketiga, Pendidikan (dalam) Islam, yaitu proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah ummat Islam. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban dari generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.[12]

Sedangkan Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Atau dengan kata lain, pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.[13] Dari definisi tersebut, Tafsir menekankan kepada sifat dari aktivitas pendidikan Islam, yaitu berupa bimbingan sebagai suatu upaya yang tidak hanya ditekankan kepada aspek pengajaran, tetapi berupa arahan, pemberian petunjuk dan pelatihan menuju pembentukan muslim seutuhnya.

---

[12]Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 29-30.

[13]Tafsir, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 32.

Peserta didik harus dibimbing untuk mengenali dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia *'abid* yang penh kesadaran, memiliki kemampuan intelek maupun spiritual. Dengan demikian, akan lahirlah berbagai pandangan hidup tauhid, baik rububiyyah maupun uluhiyyah,[14] yang meyakini kesatuan ciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan tuntutan hidup *(ubity of purpose of life*), yang semua ini merupakan derivasi dari kesatuan ketuhanan (*unity og Godhead*).[15]

Walaupun istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami secara berbeda, namun pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan mewujud secara operasional dalam satu sistem yang utuh. Konsep dan teori pendidikan

---

[14] Secara garis besar konsep tauhid dalam Islam dapat dibedakan – menurut kebanyakan ulama'- kepada dua macam yaitu: (1) *Tauhid Rububiyyah*, yaitu konsep tauhid yang lebih menekankan kepada wujud Tuhan atau eksistensi Tuhan yang biasanya diikuti dengan penyebutan sifat-sifat Tuhan lainnya. Dengan kata lain, *tauhid rububiyyah* merupakan konsep teologis ketuhanan yang menyangkut tauhid tentang zat Tuhan (Allah) dan penciptaan. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Intelektual-Intelegensia dan Peilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), hlm.432. Dalam kaitannya dengan pendidikan, melalui *tauhid rububiyyah* ini, manusia diajarkan untuk berfikir rasional, empiris dan matematis dengan jalan observasi dan eksperimen. (2) *Tauhid Uluhiyyah*, yaitu tauhid yang menjelaskan tentang perlunya atau keharusan untuk beribadah hanya kepada Allah. Sehingga tauhid ini lebih akrab dikenal sebagai tauhid peribadatan (penyembahan) hanya kepada Allah. *Tauhid uluhiyyah* mengajarkan kepada manusia sikap bebas dan kritis tanpa memandang siapa yang di atasnya, selain Tuhan. Dari sini, timbul sifat keberanian untuk mengatakan yang benar dalam rangka mengkritisi setiap keadaan yang berbentuk ritus, kultus, rasialisme dan otoriterisme. Lihat Syamsul Syamsul dan Ahmad Barizi. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001), hlm. 102.

[15] M. Amin Rais, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987), hlm.13-14.

Islam yang dibangun dan dikembangkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, mendapatkan justifikasi dan perwujudan secara operasional dalam proses pembudayaan dan pewarisan serta pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi.[16]

Berangkat dari pengertian pendidikan Islam, secara teori berarti memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani sesuai ajaran Islam baik melalui lembaga atau sistem kurikuler. Sedangkan tujuan fungsionalnya adalah pengembangan potensi dinamis manusia yaitu keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak dan pengalaman. Sebagai lingkaran proses pendidikan Islam yang akan mengantarkan manusia sebagai hamba Allah yang mukmin, muslim, muhsin, dan mushlihin mutaqin.

Sedangkan objek pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia sebagai makhluk individu yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna dan lebih mulia dari makhluk lain (QS. al-Shād: 71-72), memiliki kedudukan yang lebih tinggi (QS. al-Isrā': 70). Disamping itu manusia diberi beban tanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat (QS. al-Isrā': 15).

Sejalan hal itu, pendidikan Islam menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial yang harus mengadakan interelasi (QS. al-Anbiyā': 92), berinteraksi, gotong-royong dan bersatu (QS. Ali-Imrān: 103), bersudara (QS. al-Hujurāt: 10), tanpa membedakan berbagai perbedaan baik bahasa atau warna kulit (QS. al-Rum: 22). Di samping itu juga tidak melupakan bahwa manusia sebagai hamba Allah yang diberi fitrah untuk beragama. Sehingga watak dan sikap religiusnya perlu dikembangkan agar mampu menjiwai dan mewarnai

[16] Muhaimin, *Paradigma Pendidikan,* hlm.30.

kehidupannya sesuai firman Allah dalam QS. al-An'ām: 102-103.

C. Pola Dasar dan Fungsi Pendidikan Islam

Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan luas, maka pendidikan Islam bersifat terbuka dan akomodatif terhadap tuntutan zaman sesuai norma-norma Islam. Pendidikan merupakan upaya untuk pembudayaan manusia untuk merngembangkan potensinya secara optimal yang dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada sang pendidik. Sehingga mereka dituntut untuk memenuhi semua persyaratan sebagai seorang pendidik yang ideal. Sedangkan faktor pembawaan anak merupakan sasaran utama oleh para pendidik.

Aktivitas pendidikan berkaitan erat dengan proses pemanusiaan manusia (*humanizing of human being*) atau upaya untuk membantu subyek (sosial atau individual) secara normatif berkembang lebih baik.[17] Upaya membantu manusia berkembang normatif lebih baik dimulai dari proses merumuskan pola dasar pendidikan Islam itu sendiri.

Adapun pola dasar pendidikan Islam menitikberatkan pada hal-hal berikut:

1. Segala fenomena alam adalah ciptaan Tuhan dan tunduk kepada hubungan mekanisme sebagai sunnatullah. Maka manusia harus dididik agar bisa menghayati segala fenomena alam sehingga bisa menanamkan rasa iman dan takwa;
2. Manusia sebagai makhluk palimg mulia dibanding makhluk lain menjadi khalifah. Maka ia dibekali ilmu

[17]Ismail Thoib, *Wacana Baru Pendidikan, Meretas Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 2.

agar bisa memberdayakan bumi dengan ilmunya untuk kemaslahatan umum sesuai tuntunan Tuhan;
3. Manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung untuk berkumpul, berinteraksi dengan orang lain dan membentuk suatu tali persaudaraan; dan
4. Manusia sebagai makhluk moralitas yang cenderung untuk memeluk agama. Pendidikan seumur hidup sebagai dasar proses pendidikan sebagai konsep pemikiran yang berorientasi pada keimanan dan akhlak yang terpadu membentuk dan mewarnai pendidikan Islam.

Berdasarkan pola dasar tersebut – secara idealitas –, pendidikan Islam yang bertujuan menciptakan dan membina akhlaq yang terpuji sangat mengharuskan adanya pewarisan, pembudayaan dan pemberian contoh yang baik terhadap anak didik. Hal ini mengandung tujuan tertinggi yang bersifat mutlak dan universal, yaitu tujuan yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, melaksanakan tugas *khalîfah* di muka bumi. Dengan tujuan ini, maka pendidikan Islam mempunyai arah untuk mencetak anak didik menjadi "wakil Tuhan" untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan penghuninya. Tugas ini dapat terwujud dengan mempersiapkan anak didik dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme dalam bidang tertentu.[18]

Dengan demikian, pendidikan Islam sebagai proses yang berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan memiliki tugas dan fungsi yang perlu diemban, yaitu pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi

[18]Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 95-97.

pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis mulai dari kandungan hingga akhir hayat.[19]

Secara umum tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Secara struktural, pendidikan Islam menuntut adanya struktur organisasi yang mengatur jalannya proses pendidikan, baik dalam dimensi vertical maupun horizontal. Sementara secara institusional, ia mengandung implikasi bahwa proses pendidikan yang berjalan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang.

Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan Islam dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu :

1. Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial,serata ide-ide masyarakat dan nasional.
2. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan *skill* yang dimiliki, serta melatih tenaga manusia (peserta didik) yang produktif dalam menemukan perimbangan perubahan sosial-ekonomi yang demikian dinamis.[20]

---

[19]Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 138.

[20] Ibid, hlm.144.

3
KOMPONEN DASAR PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam sebagai suatu ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Karena di dalamnya banyak segi-segi atau komponen-komponen yang ikut terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kajian mengenai komponen pendidikan Islam berarti kajian tentang sistem pendidikan Islam. sistem tersebut merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen pendidikan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk suatu kebulatan yang utuh dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

Adapun komponen-komponen yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam adalah sebagai berikut :

A. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup setiap manusia atau umat Islam. Untuk mengetahui tujuan hidup muslim terlebih dahulu harus disadari bahwa manusia ini ada yang menciptakan yakni Allah SWT., maksud dan tujuannya dijadikan manusia ini tergantung pada Allah sebagai al-Khaliq, dan untuk mengetahui hal ini

kita kembali memeriksa asasi ajaran Islam yaitu al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan maksud dan tujuan manusia dijadikan Allah antara lain:

1. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 yaitu:

وما خلقت الجن والإ نس الا ليعبدون

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".

2. Surat Al-Bayyinah ayat 5 yaitu:

ومامروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…."

3. Surat Ali-Imran ayat 102 yaitu:

يايهاالدين امنوا اتقوا الله حق تقته ولاتموتن الاوانتم مسلمون.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam".

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi atau menjadi hamba Allah. Hamba Allah mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepadanya.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tujuan pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan manusia diciptakan yakni untuk berbakti kepada Allah sebenar-benarnya bakti atau dengan kata lain untuk membentuk manusia bertaqwa yang berbudi luhur serta memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam.

Tujuan agama Islam pada pokoknya berintikan kepada tiga aspek yaitu iman, ilmu dan amal dengan menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif, disiplin dan cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan anak yang nantinya menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT., menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan menyeluruh serta pengembangan agama Islam.

Mengenai sasaran pendidikan Islam, Kasy'at al-Masri memberikan masukan bahwa agar sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan secara Islami maka pendidikan meliputi beberapa hal di antaranya :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan segi-segi yang positif, membangkitkan bakat-bakat yang luhur dan kreatifitasnya yang membangun, dengan mewarnai ketiganya dengan warna corak Islam.
2. Meluruskan kecendrungan dan wataknya yang tidak baik, dengan mengarahkannya menuju perangai dan watak yang terpuji.
3. Menguatkan keyakinan, bahwa tujuan utama dari penciptaan manusia, ialah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT.[1]

Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam pada hakekatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri yang membawa misi bagi kesejahteraan ummat manusia sebagai hamba Allah SWT, lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagai hamba Allah yang berserah diri kepada khaliq-Nya, ia adalah hambanya yang berilmu pengetahuan dan beriman secara bulat sesuai kehendak penciptanya.

---

[1]Hasy'at Al-Masri, *Menyambut Kedatangan Bayi*, (Jakarta: Gema Insani Perss, Jakarta, 1998), hlm. 59-60

Menurut al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam adalah: *pertama,* Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat; *kedua,* Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat; dan *ketiga,* Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat.[2]

Sementara itu, Al-Attas menekankan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam akan menghasilkan manusia yang baik, dan bukan masyarakat seperti dalam perdaban Barat, atau warga yang baik yang dalam perspektif ini adalah individu-individu yang beradab, bijak, yang mengenali dan mengakui segala tata tertib realitas sesuatu, termasuk posisi Tuhan dalam realitas itu. Sebagai hasilnya, mereka akan selalu beramal sesuai dengan kaidah itu sendiri.[3] Hal ini mendeskripsikan bahwa bila pendidikan kita pandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. Suatu tujuan yang hendak dicapai pada hakekatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan.

Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menggejala dalam perilaku

---

[2] Mohammad Oemar Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam,* terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

[3]Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.40.

lahiriahnya. Dengan kata lain, perilaku lahiriyah adalah cermin yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang telah mengacu di dalam jiwa manusia sebagai produk dari proses pendidikan.[4]

Oleh karena itu, jika kita membahas nilai-nilai pendidikan, akan jelas melalui rumusan dan uraian tentang tujuan pendidikan, sebab di dalam rumusan tujuan pendidikan itu tersimpul dari semua nilai pendidikan yang hendak diwujudkan di dalam pribadi peserta didik.[5] Demikian pula, jika berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, berarti berbicara nilai-nilai ideal yang bercorak Islami. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang merealisasi idealitas Islami. Sedang idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.[6]

---

[4]Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm.119. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari nilai, dan nilai itu selanjutnya perlu diinstitusikan, institusionalisasi nilai yang terbaik adalah melalui pendidikan. Pandangan Freeman Butt dalam bukunya " *Cultural History of Western Education*" menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi nilai, proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekonstruksi nilai, serta penyesuaian terhadap nilai. Lihat Wayan Ardhana, *Dasar-dasar Kependidikan* (Malang: FIP-KIP, 1986), hlm. 36-39. Lebih dari itu, fungsi pendidikan, khususnya pendidikan Islam, adalah pewarisan dan pengembangan nilai-nilai *dîn al-Islâm* serta memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan tenaga di semua tingkat dan bidang pembangunan bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan ketahanan. Lihat Muhammad Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya* (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), hlm.19.

[5] Noor Syam, *Filsafat Pendidikan,* hlm. 140. Lihat juga Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filfasat dan Pendidikan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm.115.

[6] Arifin,*Filsafat Pendidikan,* hlm.119.

Dengan asumsi sebagaimana di atas, maka nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan Islam akan tercermin dari formulasi tujuan pendidikan itu sendiri yang senantiasa mengalami dinamika seiring kepentingan dan perkembangan masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, perumusan tujuan pendidikan harus berorientasi – setidaknya – pada empat aspek yaitu:

1. berorientasi pada tujuan dan tugas pokok manusia;
2. berorientasi pada sifat dasar (*nature*) manusia;
3. berorientasi pada tuntutan masyarakat dan zaman; dan
4. borientasi kehidupan ideal Islami.[7]

Maka dari itu, para ilmuwan muslim mencoba merumuskan tujuan pendidikan Islam, antara lain adalah Muhammad Fadhil al-Jumaly memberikan batasan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina kesadaran atas diri manusia dan sistem sosial yang Islami. Sikap dan rasa tanggung jawab sosial, juga terhadap alam ciptaan-Nya serta kesadaran untuk mengembangkan dan mengelola alam ini, diarahkan bagi kepentingan dan kesejahteraan manusia, dan yang penting lagi adalah beribadah kepada Allah SWT.[8]

Secara lebih rinci, Ahmadi membagi tujuan pendidikan Islam pada 3 aspek, yaitu:

---

[7] Dimensi ini mengandung nilai bahwa sistem pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan dan memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan dan keserasian antara kedua kepentingan hidup tersebut menjadi daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai gejolak kehidupan yang menghambat ketentraman dan ketenangan hidup manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, kultural, ekonomis, maupun ideologi dalam kehidupan pribadi manusia. Lihat M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm.3-4.

[8] Nizar, *Pengantar Dasar-dasar,* hm.105.

Pertama, tujuan tertinggi; tujuan yang bersifat mutlak dan universal, yaitu tujuan yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.

Kedua, tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan Islam yang berkaitan dengan perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian anak didik, sehingga mampu menghadirkan diri sebagai suatu kepribadian yang utuh. Inilah yang disebut dengan realisasi diri (s*elf realization*). Upaya realisasi diri dapat ditempuh dengan aktualisasi diri (*self actualization*) berupa penggalian potensi-potensi diri pada peserta didik.

Ketiga, Tujuan khusus adalah tujuan pendidikan Islam yang dijabarkan dari tujuan tertinggi dan tujuan umum. Tujuan ini dapat dirumuskan secara kondisional dan situasional namun harus tetap berdasar kepada tujuan tertinggi dan tujuan umum. Dengan kata lain tujuan ini adalah penjabaran dari tujuan tertinggi dan tujuan umum berdasarkan karakteristik, visi dan misi lembaga pendidikan.[9]

Sejalan dengan pandangan tersebut, Abdul Munir Mulkhan menyebutkan, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah sebagi proses aktualisasi akal peserta didik yang secara teknis terwujud dengan kecerdasan, terampil, dewasa, dan berkepribadian muslim yang paripurna, memiliki kebebasan berkreasi dengan tetap menjaga nilai kemanusiaan yang ada pada diri manusia untuk dikembangkan secara proporsional Islami.[10]

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam secara umum adalah pembentukan kepribadian yang utama atau pembentukan dan pembinaan *al-akhlâq al-karîmah*, yaitu

---

[9]Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 95-97.

[10] Mulkhan, *Paradigma Intelektual,* hlm.137.

sikap dan perilaku yang terpuji sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah SAW ke seluruh manusia, yakni untuk memperbaiki dan membina akhlak yang mulia.

Tujuan dalam proses pendidikan Islam adalah cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang ingin dicapai berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Membentuk manusia dewasa yang berakhak mulia, mengembangkan potensi mengintegrasikan ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Tujuan keagamaan pendidikan Islam adalah berorientasi pada kebahagiaan akhirat, dengan cara melaksanakan syariat Islam melalui pendidikan spiritual, misalnya (QS. al-A'lā: 14-17) tentang kehidupan akhirat adalah lebih penting. Sedangkan tujuan keduniaan adalah pendidikan berorientasi pada kepentingan dunia sebagaimana firman Allah QS. al-Jumu'ah: 10.

B. Guru/Pendidik

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang luhur dan mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara dan ditinjau dari sudut keagamaan. Guru sebagai pendidik adalah orang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan negara. Tinggi atau rendahya kebudayaan suatu masyarakat, maju atau mundurnya titingkat kebudayaan suatu masyarakat tergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru. Makin tinggi pendidikan guru, makin baik pula mutu pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh anak dan makin tinggi pula derajat masyarakat.[11]

Bagi masyarakat modern, citra dan konsep guru sangat jauh berbeda dengan konsep di masa lampau. Bila dulu 'guru' berarti orang yang berilmu yang arif dan bijaksana,

[11] M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), hlm. 81-82.

kini guru dilihat tidak lebih sebagai fungsionaris pendidikan yang bertugas mengajar atas dasar kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu. Untuk tugas tersebut, ia memperoleh imbalan materi dari negara atau pihak pengelola pendidikan lainnya.[12]

Dengan demikian, faktor terpenting dalam profesi guru dewasa ini adalah kualifikasi keilmuan dan akademis tersebut. Faktor-faktor lain seperti kearifan dan kebijaksanaan – yang merupakan sikap dan tingkah laku moral – tidak lagi *significant.* Padahal dalam konsep klasik, faktor moral berada di urutan teratas kualifikasi keguruan. Sedangkan faktor kompetensi – keilmuan dan akademis – berada di bawah kualifikasi moral.[13]

1. Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam

   Dalam perspektif Islam, seorang guru haruslah bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus pendidik. Karena itu, seseorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya. Dengan demikian, seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran Islam.[14]

---

[12]Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.165.

[13] Akibatnya, keteladanan moral pada guru tidak lagi begitu penting dalam proses pendidikan. Yang lebih utama adalah kecakapan dan keahlian dalam mengajarkan ilmu yang merupakan tugasnya. Meskipun ada seorang guru yang menurut kaidah-kaidah moral tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkah lakunya, namun ia akan tetap diperbolehkan memegang jabatan guru yang mulia ini. Lihat Ibid, hlm.165-166.

[14] Ibid, hlm.167.

Maka dari itu, dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut sebagai *ustâdz, mu'allim, murabbiy, mursyid, mudarris* dan *mu'addib.* Kata "*ustâdz*" biasa digunakan untuk memanggil seorang *professor.* Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan profesional, bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continous improvement,* yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan zamannya,[15] yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa yang akan datang.

Kata "*mu'allim*" berasal dari kata dasar *'ilm* yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Dalam setiap *'ilm* terkandung dimensi *teoretis* dan dimensi *amaliah.* Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan siswa untuk mengamalkannya.[16]

Kata "*murabbi*" berasal dari kata dasar "*rabb*". Tuhan adalah sebagai *Rabb al-'Alamin* dan *Rabb al-nas,* yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifah-Nya diberi tugas untuk menumbuhkembangkan

---

[15] Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

[16] Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.210.

kreatifitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya. Dilihat dari pengertian ini, tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya.[17]

Kata "*mursyid*" biasa digunakan untuk guru dalam *thariqah (tasawuf)*. Seorang *mursyid* berusaha menularkan penghayatan *(transinternalisasi*) akhlak dan/atau kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik yang berupa etos ibadah, etos kerja, etos belajar maupun dedikasinya yang serba *Li Allah Ta'ala*. Dalam konteks pendidikan Islam, mengandung makna bahwa guru merupakan model atau sentral identifikasi diri, yakni pusat anutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya.[18]

Kata "*mudarris*" berasal dari kata *"darasa-yadrusu-darsan wa durusan wa dirasatan"* yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan keterampilan seseorang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan iptek dan perkembangan zaman, sehingga guru dituntut memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui

[17] Ibid.
[18] Ibid, hlm. 211.

pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap *up to date* dan tidak cepat usang.[19]

Sedangkan kata "*mu'addib*" berasal dari kata *adab,* yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan batin. Dengan demikian, seorang guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban (*civilization*) yang berkualitas di masa depan.

Kedudukan guru yang istimewa tersebut, ternyata berimbang dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tidak ringan. Seorang guru agama bukan hanya sekedar sebagai tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai pendidik. Dengan kedudukan sebagai pendidik, guru berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi muslim sempurna.[20] Untuk mencapai tujuan ini, guru harus berupaya melalui beragam cara seperti; mengajar, melatih, membiasakan, memberi contoh, memberi dorongan, memuji, menghukum, dan bahkan mendoakan. Cara-cara tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Dalam perspektif pendidikan, mengajar adalah suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam beberapa pendapat, mengajar (*ta'lîm*) disetarakan dengan mendidik (*ta'dîb*). Namun demikian, mengajar dinilai lebih dahulu ada dari pada mendidik. Ini dapat dilihat dari sejarah Rasulullah yang mengajarkan membaca al-Qur'an kepada para sahabat-Nya. Bahkan al-Qur'an menyebutkan bagaimana Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam " *Dan Allah telah mengajarkan*

[19] Ibid, hlm.213.

[20]Hasan Langgulung, *Kreativitas dan Pendidikan Islam; Analisis Psikologi dan Falsafah* (Jakarta : Pusataka al-Husna, 1991), hlm.358-367.

kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya."[21] dan " *Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."*

Dalam hal mengajar, al-Ghazâlî mempunyai pandangan sebagai berikut:

a. Memelihara anak dari perbuatan tercela
b. Membimbingnya agar menjadi anak yang sholeh
c. Menjauhkan anak dari pergaulan yang jelek
d. Mengajarkan cara yang benar dalam mencari rizki
e. Mengajar anak agar tidak sombong
f. Mengajarkan al Qur'an
g. Memberikan kesempatan untuk bermain dan berolah raga untuk mengembangkan penalaran.[22]

Pandangan mengajar al-Ghazâlî sebagaimana tersebut diatas, menekankan pada aspek pembinaan moral yang mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, yang berkaitan dengan nilai nilai susila serta berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan benar atau salah.[23] Berkaitan dengan mengajar, al-Ghazâlî membahas kedudukan dan fungsi guru sebagai pengajar. Ia memandang guru sebagai berikut:

a. Guru sebagai pengajar sekaligus pembimbing

   Al-Ghazâlî menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun dan pembimbing bagi anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, al-Ghazâlî menganjurkan agar guru mengajar membimbing dengan penuh kasih sayang sebagaimana ia mengajar

---

[21] QS. al-Baqarah : 31.

[22] Asa'ril Muhajir, "Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazâlî dan John Lock Tentang Pendidikan Anak", *Jurnal Dinamika*, Vol. No 2, Oktorber, 2003, hlm. 204

[23] C.Adiningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa danBudayanya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 24 .

dan mendidik anaknya sendiri. "Didiklah muridmu dan perlakukanlah mereka seperti anakmu sendiri", pesan al-Ghazâlî pada para guru. Bahkan al-Ghazâlî mengutip Sabda Rasulullah; "Sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya.[24]

b. Mengajar adalah pekerjaan dan tugas yang mulia.

Berkaitan dengan hal ini, al-Ghazâlî menyatakan: "Maka seorang yang alim mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya maka ia yang dinamakan seorang yang besar di semua kerajaan langit, dia seperti matahari yang menerangi alam-alam yang lain. Dia mempunyai cahaya dalam dirinya dan ia seperti minyak wangi, yang memberikan kewangian kepada orang lain.[25]

Sedemikian tinggi penghargaan al-Ghazâlî terhadap pekerjaan guru sehingga ia memberikan perumpamaan sebagai matahari, yang merupakan sumber kehidupan dan penerangan di langit dan dibumi. Dengan ilmunya seorang guru dapat memberikan penerangan kepada ummat sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.[26]

Bahkan al-Ghazâlî memberikan dalil aqli terhadap kemuliaan guru yaitu dengan menyatakan bahwa seorang pandai emas lebih mulia dari pada seorang penyamak kulit, karena pandai emas mengolah emas yang termasuk logam mulia, sedangkan penyamak kulit mengulah kulit binatang yang telah mati. Jelas

---

[24] Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulumuddîn*, hlm. 231

[25] Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulumuddîn*, Juz I, hlm. 45

[26] Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm 68.

pekerjaan pandai emas lebih mulia dari pada penyamak kulit. Demikian juga seorang guru lebih mulia dari pada pandai emas karena seorang guru mengolah, membimbing manusia yang merupakan makhluk termulia di sisi Allah, sehingga pekerjaan guru lebih baik dan lebih mulia dari pada pekerjaan apapun.[27]

c. Dalam mengajar guru harus memberikan teladan bagi murid.

Sebagai seorang yang mengajar, membimbing dan mengarahkan, guru harus menjadi teladan dan contoh bagi murid-muridnya. Untuk ini seorang guru menjaga kewibawaan di hadapan murid-muridnya. Ia harus dapat menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, sehingga akan terpencar dari dirinya cahaya kemuliaan. Ini bukan berarti ia harus jauh dengan muridnya, namun ia tetap harus dekat dan penuh kasih sayang kepada murid dengan tetap memelihara kewibawaannya. Tentang perlunya guru berwibawa dan bersih dari perbuatan yang tercela, al-Ghazâlî menyatakan: " Hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan berbohong dalam perbuatannya. Guru yang membimbing muridnya seperti ukiran dengan tanah liat, atau bayangan dengan tongkat. Bagaimana sebuah tanah liat dapat diukir tanpa ada alat ukirannya dan bagaimana bayangan tongkat akan lurus kalau tongkatnya tidak lurus."[28]

---

[27] Ibid., hlm.69

[28] Al-Ghazâlî, Ihya *Ulumudddin,* hlm.58. Dalam nada yang sama Hasan Langgulung menyatakan bahwa dalam mengajar dan membimbing seorang guru harus dapat mendidik anaknya dan mengembangkan *insan kamil* dalam arti ia dapat mengaktualkan potensi-potensi fitrah yang ada pada anak didik. Untuk itu diharapkan seorang guru harus darpat mengusahakan dirinya sendiri sebagai *insan kamil*. Lihat Hasan

Dalam kerangka memberikan teladan itu, Muhaimin memberikan penekanan kepada fungsi dan kedudukan guru sebagai *mursyid*, yaitu bagaimana seorang guru dapat menularkan penghayatan (transinternalisasi) akhlaq atau kepribadiannya kepada anak didiknya, baik berupa etos kerjanya, etos ibadahnya maupun etos belajarnya dengan mengharap keridhaan Allah SWT.[29]

d. Guru harus memotivasi muridnya.

Sebagai seorang yang megajarkan ilmu kepada murid-muridnya, maka seorang guru harus dapat membangkitkan semangat belajar anak, terutama sekali bagaimana anak dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari gurunya. Di sinilah terletak tangggung jawab guru, yaitu ia dapat menularkan ilmunya kepada murid sekaligus bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar murid. Tentang tanggung jawab guru ini, al-Ghazâlî menyatakan: "Seorang guru harus bertanggung jawab pada pelajaran yang diajarinya dan membuka jalan yang seluas-luasnya untuk mempelajari bidang studi lain. Kalau ia mengajar beberapa bidang studi yang lain, maka harus menjaga kemajuan murid setahap demi setahap. [30]

Sebagai motivator itulah seorang guru harus membangkitkan semangat murid dalam belajar, yang menurut "motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung dalam stimulasi ke arah tujuan

---

Langulung, *Pendidikan Islam dalam Abad ke-21* (Jakarta: Pustaka Husna Baru, 2003), hlm. 105.

[29] Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm.213

[30] Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulumuddîn*, Juz I, hlm. 46

tertentu, dimana sebelumnya tidak ada gerakan ke arah tujuan tersebut."[31] Dengan demikian jelaslah bahwa guru harus memotivasi murid-muridnya agar dapat berhasil dalam kegiatan belajarnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Al-Ghazâlî berpandangan "idealistik" terhadap profesi guru. Idealisasi guru, menurutnya, adalah orang yang berilmu, beramal dan mengajar. Dari sini al-Ghazâlî menekankan keterpaduan ilmu dengan amal.[32] Berangkat dari perspektif inilah, al-Ghazâlî menandaskan bahwa orang sibuk mengajar merupakan orang yang "bergelut" dengan sesuatu yang amat penting, sehingga ia perlu menjaga etiket dan kode etik profesinya.

Menurutnya pendidik (guru) adalah orang yang berusaha membimbing, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan

---

[31] Omar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung : Sinar Baru, 200), hlm. 173.

[32] Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam, Perspektif Sosiologis-Filosofis,* terj. Mahmud Arif (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm.129. Berkaitan dengan hal ini Al-Ghazâlî menyatakan, mengajar adalah pekerjaan dan tugas yang mulia. Selanjutnya, ia menyatakan: "Maka seorang yang alim mau mengamalkan apa yang telah diketahuinya maka ia yang dinamakan seorang yang besar di semua kerajaan langit, dia seperti matahari yang menerangi alam-alam yang lain. Dia mempunyai cahaya dalam dirinya dan ia seperti minyak wangi, yang memberikan kewangian kepada orang lain. Lihat Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulumuddîn*, Juz I, hlm. 45. Sedemikian tinggi penghargaan al-Ghazâlî terhadap pekerjaan guru sehingga ia memberikan perumpamaan sebagai matahari, yang merupakan sumber kehidupan dan penerangan di langit dan dibumi. Dengan ilmunya seorang guru dapat memberikan penerangan kepada ummat sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lihat Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm 68.

Khaliqnya.[33] Tugas ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia terletak pada kesucian hatinya. Untuk itu, pendidik dalam persepktif Islam melaksanakan proses pendidikan hendaknya diarahkan pada aspek *tazkiyah al-nafs*.[34]

Seorang pendidik dituntut memiliki beberapa keutamaan yang menjadi kepribadiannya. Di antara sifat-sifat tersebut adalah: 1) Sabar dalam menanggapi pertanyaan murid; 2) senantiasa bersifat kasih, tanpa pilih kasih; 3) duduk dengan sopan, tidak riya' dan pamer; 4) tidak takabbur, kepada orang-orang yang dzalim dengan maksud mencegah tindakannya; 5) bersikap tawadlu' dalam setiap pertemuan ilmiah; 6) sikap dan pembicaraan

---

[33] Al-Ghazâlî menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun dan pembimbing bagi anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, al-Ghazâlî menganjurkan agar guru mengajar membimbing dengan penuh kasih sayang sebagaimana ia mengajar dan mendidik anaknya sendiri. "Didiklah muridmu dan perlakukanlah mereka seperti anakmu sendiri", pesan al-Ghazâlî pada para guru. Bahkan al-Ghazâlî mengutip Sabda Rasulullah; "Sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya. (HR. Abu Dawud, al-Nasâ'i, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân dari Abu Hurairah).

[34]*Tazkiyah al-nafs* merupakan konsep pembinaan mental spiritual, pembentukan jiwa dan mental sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dimaksudkan agar anak mempunyai perkembangan kejiwaan yang islami serta membentuk interaksi dan hubungan yang harmonis antara anak didik dengan sesama manusinya dan dengan Tuhannya. Lihat Yahya Jaya, *Spiritualisme Islam dalam Menubuhkembangkan Kpribadian dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Ruhana, 1994), hlm. 54. Lebih lanjut, Al-Ghazâlî menyatakan bahwa *tazkiyah al-nafs* berkaitan dengan upaya mencapai ma'rifah dan mengarah kepada hakikat. Sedangkan faktor-faktor yang menghalang hakikat adalah; (1) jiwa yang belum sempurna, (2) jiwa yang dikotori oleh perbuatan tercela, (3) sikap menuruti keinginan nafsu badaniyah, (4) penutup dalam yang menghalangi masuknya hakikat, dan (5) tidak dapat berpikir logis. Lihat Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazâlî* (Jakarta : Rajawali Press, 1988), hlm. 90.

hendaknya tertuju pada topik persoalan; 7) memiliki sifat bersahabat terhadap semua muridnya; 8) menyantuni dan tidak membentak orang-orang bodoh; 9) membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya; 10) berani berkata tidak terhadap masalah yang anda persoalkan; dan 11) menampilkan hujjah yang benar.[35]

2. Profesionalitas Guru Pendidikan Islam

Profesionalitas berasal dari kata profesi (*profession*) yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan. Profesi dapat juga diartikan sebagai beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi atau sebuah lembaga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu.[36] Sedangkan arti dari profesional adalah seseorang yang memiliki seperangkat pengetahuan atau keahlian yang khas dari profesinya.[37]

Profesionalitas merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh sebuah lembaga. Oleh sebab itu seorang Profesional berhak memperoleh *reward* yang layak dan wajar yang menjadi pendukung utama dalam merintis kariernya ke depan.[38]

---

[35] Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis,Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm.88.

[36]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 702

[37]Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Misak Galiza, 2003), hlm. 79

[38]Ibid, hlm. 79

Dalam proses belajar mengajar guru merupakan salah satu sumber belajar siswa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya proses belajar mengajar. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut pada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.[39]

Dalam mengajar seorang guru harus memiliki seperangkat kemampuan, baik dalam aspek kemampuan sikap maupun mendidik dan mengajarnya. Agar proses belajar mengajar berjalan efektif, maka guru harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila guru tidak mempunyai profesionalitas dalam mengajar maka proses belajar mengajar tidak akan efektif, sehingga tujuan pendidikan secara umum tidak akan terwujud.

Jadi guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga mencapai sasaran berupa pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang disampaikan dan mempunyai kemampuan yang maksimal.

Dengan demikian, guru pendidikan Islam dituntut untuk komitmen terhadap profesionalitas dalam

[39]Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaktif Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 37

mengemban tugasnya, sehingga dalam dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continous improvement,* yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan.[40]

Guru pendidikan Islam yang komitmen terhadap profesionalitasnya seyogyanya tercermin dalam segala aktivitasnya sebagai *murabbî, mu'allim, mursyid, mu'addib,* dan *mudarris.* Sebagai *murrabbî,* ia akan berusaha menumbuhkembangkan, mengatur dan memelihara potensi, minat dan bakat serta kemampuan peserta didik secara bertahap ke arah aktualisasi potensi, minat, bakat serta kemampuannya secara optimal, melalui kegiatan-kegiatan penelitian, eksperimen di laboratorium, *problem solving* dan sebagainya, sehingga menghasilkan nilai-nilai positif yang berupa sikap rasional-empirik, obyektif-empirik dan obyektif-matematis. Sebagai *mu'allim*, ia akan melakukan transfer ilmu/pengetahuan/nilai, serta melakukan internalisasi atau penyerapan / penghayatan ilmu, pengetahuan, dan nilai ke dalam diri sendiri atau peserta didiknya, serta berusaha membangkitkan semangat dan motivasi mereka untuk mengamalkannya. Sebagai *mursyid,* ia akan melakukan *transinternalisasi* akhlak/kepribadian kepada peserta didiknya. Sebagai *mu'addib,* maka ia sadar bahwa eksistensinya sebagai guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa

[40]Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.222.

depan melalui kegiatan pendidikan. Dan sebagai *mudarris,* ia berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka, baik melalui kegiatan pendidikan, pengajaran maupun pelatihan.[41]

3. Pengembangan Profesi Guru

Tidak salah kiranya bahwa salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah profesionalisme guru. Keberhasilam guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki, pemahaman kurikulum dan penguasaan materi menjadi prioritas utama, disamping mampu dan terampil di dalam metode mengajar dan mendayagunakan media pembelajaran. Tak kalah pentingnya pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap teknik evaluasi, karena teknik evaluasi menjadi faktor penentu dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran.[42]

Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip, yang menurut Undang-Undang Nomor 14/2005 (pasal 7) meliputi : a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latarbelakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki

[41]Ibid, hlm. 223-224.

[42] Isjoni, *Gurukah Yang Dipersalahkan? Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan Kita* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.158.

tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesinalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Jika merujuk pada Undang-Undang di atas, maka untuk menjadi guru profesional, seseorang harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,[43] sertifikat pendidik,[44] sehat jasmani dan rohani,[45] serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[46] Ada empat kompetensi yang harus dimiliki

[43]Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya (pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen). Menurut Barlow, kompetensi adalah "*the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately*" (Kemampuan seorang guru untuk menunjukkan secara bertanggung jawab tugas-tugasnya dngan tepat). Lihat Suparlan, *Guru sebagai Profesi* (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 85.

[44]Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

[45]Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat (penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen).

[46]Bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

guru profesional,[47] yaitu; kompetensi pedagogik (kemampuan mengelola pembelajaran), kompetensi kepribadian (kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik), kompetensi profesional[48] (kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam), dan kompetensi sosial (kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar).

Dalam rangka mengembangkan profesionalismenya, seorang guru dituntut mempunyai *basic* keilmuan yang jelas (*takhahssushât fî al-'ilm*) atau dengan kata lain harus mempunyai kompetensi dalam bidang tertentu. Selain itu, seorang guru dituntut memperkaya wawasan keilmuan.[49] Mereka juga harus mengetahui dan

[47]Bunyi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

[48]Bagi saya pendapat tersebut kurang tepat apabila penguasaan materi ajar secara luas, mendalam dan komprehensif disebut sebagai kompetensi profesional, karena telah menyempitkan makna profesional. Padahal pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, definisi profesional begitu luas, yakni sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jika merujuk pada definisi ini, mestinya kompetensi profesional menjadi payung bagi penyebutan kompetensi guru ideal yang harus memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, penguasaan isi, dan kompetensi sosial. Karena itu, kompetensi profesional sebagai sebutan bagi kecakapan penguasan materi, lebih tepat menggunakan kompetensi akademik. Pendapat serupa dapat dibaca dalam Muchlas Samani, et.al. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (Surabaya : Penerbit SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006), 40-41.

[49] Dalam konsep keilmuan yang integratif dan interkonektif, tidak mesti seorang guru harus menguasai berbagai keilmuan. Cukuplah mereka

memahami tata kerja keilmuan lainnya, sehingga nantinya dapat memaklumi hasil analisa dari perspektif ilmu lain.

Masih banyak sebenarnya faktor penunjang lainnya yang harus dimiliki guru seperti kemampuan (kecakapan) dasar[50] dan *performance* sewaktu mengajar di kelas. Semua yang disebutkan di atas, secara hakiki sudah dilakukan dan dimiliki guru akan tetapi ke depan kadar kepemilikian itu segera diwujudkan dengan sungguh dan motivasi kerja tinggi, dan ini menjadi beban moral guru dalam mewujudkan guru professional. Tanpa itu, mustahil pendidikan bermutu dapat terwujud.

Di samping itu, seorang guru harus menerima tanggung jawab mendidik sebagai pengabdian yang bernilai ibadah, bukan sekedar buruh pencari nafkah. Jabatan guru tidaklah sama dengan jabatan lainnya. Guru mendapat amanah untuk mendidik dan mengajar generasi penerus bangsa. Di tangan gurulah ada tanggung jawab masa depan generasi bangsa, sehingga ia harus mempunyai sifat-sifat terpuji dan interpersonal yang kuat, harus bisa bergaul dengan baik sehingga bisa

---

mempunyai satu spesialisasi keilmuan yang nantinya dikomparasikan dengan pengamatan ilmu lainnya. Hasil dari pertemuan berbagai perspektif ini akan melahirkan komunitas intelektual yang dapat melahirkan sebuah pemahaman bahkan kesimpulan yang komprehensif.

[50] Kecakapan dasar guru, paling tidak menurut Cooper, ada sepuluh aspek yaitu; (1) guru harus berperan sebagai pembuat keputusan, (2) guru harus bertindak sebagai perencana, (3) guru harus bertindak sebagai penentu tujuan pembelajaran, (4) guru harus mempunyai kecakapan untuk menyampaikan pelajaran, (5) guru harus cakap untuk mendinamisasi kelas, (6) guru harus memahami konsep pengajaran dan pembelajaran, (7) guru harus cakap berkomunikasi, (8) guru harus mampu mengendalikan kelas, (9) guru harus mampu mengakomodir seluruh kebutuhan peserta belajar, dan (10) guru harus dapat melakukan evaluasi.

muncul suasana ramah lingkungan dan bersahabat, mempunyai pola kehidupan yang jelas dan istiqamah, serta prinsip hidup yang senantiasa merujuk pada aspek akhlakul karimah, seperti kejujuran, bersih lahir batin, teratur, rapi, dan berpola pikir sistematis serta melaksanakan kebiasaan hidup yang terencana. Ini semua mencerminkan sosok dan profil guru yang layak diteladani para muridnya. Tak kalah pentingnya, guru juga harus senantiasa berjuang *(*baca: memiliki kepribadian *rûh al-jihâd)* dalam mengembangkan kualitas dirinya sesuai dengan kapasitas dan profesinya sebagai guru teladan, ia juga harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dengan selalu membina ilmu pengetahuan melalui berbagai cara agar suatu saat nanti informasi yang diperoleh itu bisa dipergunakan sebagai bekal untuk mengasah kecakapan dasar guna mensukseskan program pembelajarannya.[51]

Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama menegaskan, seorang guru harus mencerminkan lima karakter dasar yang yang dijadikan sebagai modal dasar terpenting untuk semakin meningkatkan kompetensinya dari segi teknis profesional, mencakup; *pertama,* mereka yang amanah, yang menerima tugas sebagai ibadah; *kedua,* mereka yang memiliki sifat interpersonal yang kuat; *ketiga,* mereka yang berpandangan hidup bermoral dan beradab; *keempat,* mereka yang menjadi teladan dalam kehidupan; dan *kelima,* mereka yang mempunyai hasrat untuk terus berkembang.[52]

---

[51]Atiqullah, "Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah" dalam *Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAINPamekasan, Vol. 2, No. 2, 2007), hlm. 289.

[52]Departemen Agama RI, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2005)

Maka untuk guru agama Islam, beberapa kompetensi tersebut di atas perlu diformulasikan menjadi; kompetensi *pedagogik-religius*, kompetensi *kepribadian-religius*, kompetensi *sosial-religius*, dan kompetensi *profesional-religius*. Kata religius perlu melandasi setiap kompetensi untuk menunjukkan adanya komitmen pendidik dengan ajaran Islam sebagai rohnya, sehingga segala masalah pendidikan dihadapi, dipertimbangkan, dan dipecahkan, serta ditempatkan dalam perspektif Islam.[53]

Dalam telaah hasil penelitian tentang efektivitas keberhasilan guru dalam menjalankan tugas kependidikannya. Medley menemukan beberapa asumsi keberhasilan guru yang pada gilirannya dijadikan titik tolak dalam pengembangannya, yaitu: *pertama,* asumsi sukses guru tergantung pada kepribadiannya, *kedua,* asumsi sukses guru tergantung pada penguasaan metode, *ketiga,* asumsi sukses guru tergantung pada frekuensi dan intensitas aktivitas guru dengan siswa; dan *keempat,* asumsi bahwa apapun dasar dan alasannya penampilan gurulah yang terpenting sebagai tanda memiliki wawasan, ada indikator menguasai materi, ada indikator menguasai strategi belajar mengajar, dan lain sebagainya. Asumsi yang keempat ini memang lebih komprehensif, sehingga dijadikan titik tolak dalam pengembangan guru, yang biasa disebut dengan PTKBK (Pendidikan Tenaga Kependidikan Berbasis Kompetensi) atau CBTE (*Competency based Teacher Education*).[54]

---

[53]Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya* (Bandung : Trigenda Karya, 1993), hlm. 173.

[54] Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru" dalam Ed. Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan* (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 105.

Dalam konteks pengembangan guru di masa depan, diperlukan secara cermat terhadap fenomena sosial dan kultural yang sedang aktual pada masa sekarang yang *nota bene* juga merupakan bagian dari proses dan produk pendidikan. Mengingat pada saat ini masih banyak orang yang cerdas, terampil, pintar, kreatif, produktif dan profesional, tetapi tidak dibarengi dengan kekokohan akidah dan kedalaman spiritual serta keunggulan akhlak.

Implikasi lebih jauh adalah munculnya gaya hidup (*life style*) yang cenderung bersikap sekuler, materialistik, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang cerdas intelektualitasnya dan terampil fisiknya, namun kurang terbina mental spiritualnya dan kurang memiliki kecerdasan emosional.[55] Orientasi hidup tersebut menjadi karakter masyarakat modern yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan.[56] Akibat dari yang demikian, banyak sekali para remaja yang terlibat dalam tawuran, tindakan kriminal,

[55]Perhatian masyarakat tentang perlunya kecerdasan emosional yang mengimbangi kecerdasan intelektual akhir-akhir ini tampak meningkat, mengingat telah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran IQ dalam meraih prestasi keberhasilan kerja hanya menempati posisi kedua setelah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kecakapan mengelola perasaan sedemikian rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif yang memungkinkan orang bekerja sama dengan lancar menuju sasaran bersama. Di dalam kecerdasan emosional tercakup kemampuan melakukan sambung rasa, empati dan komunikasi yang terbuka. Lihat Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 9.

[56]Kazou Shimogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme; Telaah Kritis atas Pemikiran Hasan Hanaffi,* ter. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 25. Lihat juga Akbar S. Ahmed, *Postmodernism and Islam* (New York: Routledge,1992), hlm. 6.

pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan dan sebagainya.[57]

Timbulnya fenomena tersebut memang tidak arif jika hanya semata-mata dikembalikan pada proses dan produk pendidikan kita. Namun demikian, "sistem pendidikan kita yang keliru" merupakan bagian dari *independent variables* yang ikut memiliki kontribusi terhadap munculnya fenomena tersebut. Sistem pendidikan yang berlangsung selama ini lebih banyak menekankan dimensi transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan aspek internalisasi dan amaliah (implementasi) belum banyak tergarap untuk membangun suasana masyarakat yang memiliki *the bound of civility* (ikatan keadaban atau tata karma) yang merupakan ciri masyarakat madani.[58] Sistem pendidikan

---

[57]Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), 231. Lihat juga Mudzaffar Akhwan, "Pendidikan Moral Keagamaan Anak dalam Masyarakat, Mempertegas Fenomena Pesantren Kilat dalam Pendidikan Islam", dalam *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial,* ed. Muslih Usa dan Aden Wijdan AZ (Yogyakarta: Aditya Media,1997), 71.

[58] Terma masyarakat madani sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk terjemahan dari konsep *civil society,* yakni sebuah entitas masyarakat yang memiliki ciri-ciri kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan *(self-generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), sehingga memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan kekuatan yang mendominasinya dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Rumusan ini adalah pengertian yang diajukan oleh Toequoville, dikutip dari Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 3. Dengan demikian masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun warga negara. Penekanan ini yang membuat konsep masyarakat madani sangat erat terkait dengan konsep demokratisasi dan demokrasi. Demokrasi

kita juga lebih menekankan peningkatan kualitas individu secara optimal dan mampu berkompetisi dengan yang lain, tetapi nilai-nilai kooperatif dan koaboratif sebagai karakteristik dari masyarakat patembayan (*gemeinschaft*) sudah mulai ditinggalkan.[59]

Karena itulah, diperlukan reorientasi pengembangan guru yang bertolak dari fenomena di atas dan filsafat pendidikan Islam yang yang komitmen pada pelestarian nilai-nilai insani[60] dan ilahi,[61] yang dibarengi dengan

---

hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat madani dan masyarakat madani hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis. Lihat Riswandha Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi," dalam *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi,* ed. Arief Subhan (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 54.

[59] Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru", hlm. 106-107.

[60] Nilai insani tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai ini bersifat dinamis. Sedangkan keberlakuan dan kebenarannya relatif (*nisbi*) yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan tata nilai, kenyataan ikatan-ikatan tradisional sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Lihat Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam,* hlm. 111-112.

[61] Nilai ilahi merupakan nilai yang dititahkan Tuhan melalui para rasul-Nya, yang berbentuk takwa, iman dan adil yang diabdikan dalam wahyu ilahi. Nilai ilahi selamanya tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat serta tidak berkecenderungan untuk merubah mengikuti selera hawa nafsu manusia dan berubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan tuntutan individual. Konfigurasi dari nilai-nilai ilahi mungkin berubah, namun secara instrinsiknya tetap tidak berubah. Hal ini karena bila instrinsik nilai tersebut berubah, maka kewahyuan (*revillatif*) dari sumber nilai yang berupa kitab suci al-Qur'an akan mengalami kerusakan. Lihat M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 121. Nilai *ilahiyah* dalam aspek teologi tak pernah mengalami perubahan, sedangkan aspek amaliahnya mungkin

sikap dinamis, kritis, progresif, terbuka, bahkan bersikap proaktif dan antisipatif, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kooperatif dan kolaboratif, toleran, serta komitmen pada hak dan kewajiban asasi manusia.

Dalam rangka reorientasi tersebut, maka dibutuhkan model pengembangan profesionalisme guru pendidikan Islam sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan secara berkesinambungan. Model pengembangan profesionalisme guru meliputi:

a. *Preservice Education and Training*

Pembinaan ini secara formal dilakukan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (baca: Fakultas/Jurusan Tarbiyah) yang memfokuskan pada penyiapan kebutuhan guru di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Maka dalam proses penyiapan ini perlu mengedepankan beberapa pandangan, yaitu: *pertama,* pembinaan calon guru pendidikan Islam senantiasa mengikutsertakan seperangkat kepribadian yang terkait dengan model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan dan teladan bagi peserta didiknya. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi dititikberatkan pada peningkatan kualitas akhlak dan kepribadian melalui pembiasaan

---

mengalami perubahan sesuai dengan tututan zaman dan lingkungan. Sebaliknya nilai *insaniyah* selamanya mengalami perkembangan dan perubahan menuju ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Tugas pendidikan adalah memadukan nilai- nilai baru dengan nilai-nilai lama secara selektif, inovatif, dan akomodatif guna mendinamisasikan perkembangan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan, tanpa meninggalkan nilai fundamental yang menjadi tolok ukur bagi nilai-nilai baru. Lihat M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 64-65.

yang diperkuat dengan pembentukan pengertian dan sikap serta pembentukan kerohanian yang luhur.[62]

Kedua, penguasaan seperangkat keilmuan yang dikembangkan melalui proses pendidikan di LPTKI, baik '*ilm nazhary* maupun '*ilm* '*amaly,* teoretis maupun praktis dilaksanakan secara profesional dan tetap diarahkan pada pembentukan calon guru yang profesional pula, yakni profesi yang bukan hanya mengandung makna kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian, tetapi juga tercakup pengertian *calling profession,* yaitu panggilan atas pernyataan janji yang diucapkan di muka umum untuk ikut berkhidmat guna merealisasi terwujudnya nilai mulia yang diamanatkan Tuhan dalam masyarakat melalui usaha kerja keras dan cerdas. *Ketiga,* perlu menciptakan interaksi mendidik di LPTKI di antara civitas akademika dengan menitikberatkan pada upaya pengembangan pandangan hidup islami yang diterapkan dalam sikap hidup dan diwujudkan dalam keterampilan hidup (*life skill*).[63] Kalau ketiga hal ini terlaksana dengan baik, maka calon guru tersebut dapat menjadi profesional dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai khidmat dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.

b. *Inservice Training*

Pola pengembangan guru ini dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan khusus seperti Balai Diklat Keagamaan. Lembaga ini dimaksudkan untuk meng-*up grade* tenaga kependidikan Islam di bawah pembinaan Departemen Agama RI.

[62] Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru", hlm. 109-110.
[63] Ibid, hlm. 110-112.

Mengingat kemampuan guru pendidikan Islam tidak dapat hanya mengandalkan dari apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan guru sebagai lembaga *preservice education anda training.* Sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihannya melibatkan elemen pendidikan yang lebih luas, seperti guru baru yang belum pernah mengikuti penataran, guru inti, instruktur, kepala dan pengawas lembaga pendidikan Islam (seperti madrasah).

Selain itu, para guru memiliki wadah pembinaan professional melalui organisasi yang dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Organisasi ini bertujuan: (a) menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran, (b) menyetarakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran, (c) mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, kondisi sekolah dan lingkungan, (d) membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan, perkembangan IPTEK, pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan system evaluasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, dan (e) saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK.[64]

[64] Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat, 2005), hlm. 131

c. *On the Job Training*

Pola pembinaan guru *on the job training* adalah proses pembinaan guru yang diprogramkan atau dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan lembaga pendidikan Islam di mana guru itu bekerja. Berbagai bentuk pembinaan tersebut antara lain: *pertama,* pengarahan dari pimpinan lembaga pendidikan tentang berbagai kebijakan pendidikan. *Kedua,* kegiatan dalam rangka pelaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. *Ketiga,* pemberian pengalaman dalam pelaksanaan tugas selama proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, dalam rangka pengingkatan kompetensi guru yang dilaksanakan, baik secara individual maupun kelompok. *Keempat,* pemberian tugas baik terkait dengan teknis edukatif maupun dalam bidang admnistratif yang diberikan kepada guru.

C. Peserta Didik

Peserta didik merupakan "*raw material*" (bahan mentah) didalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Berbeda dengan komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan karena kita menerima "material" ini sudah setengah jadi, sedangkan komponen komponen lain dapat dirumuskan dan disusun sesuai dengan keadan fasilitas dan kebutuhan yang ada.

Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.[65]

Dalam perkembangan peserta didik, ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Dimensi Fisik (Jasmani)
   Fisik atau jasmani terdiri atas organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna di bandingkan dengan organisme makhluk lainya. Pada dimensi ini, proses penciptaan manusia memiliki kesaman dengan hewan ataupun tumbuhan, sebab semuanya termasuk bagian dari alam.
2. Dimensi Akhlak
   Pendidikan akhlak mulai di tanamkan sejak manusia lahir kedunia, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang bermoral baik, berkemauan keras, bijaksana, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Namun perlu diketahui bahwa pendidikan akhlak akan terbentuk jika adanya pengamalan dari peserta didik.
3. Dimensi Rohani(kejiwaan)
   Dimensi yang sangat penting dan harus ada pada peserta didik. Hal ini dikarenakan rohani harus dapat mengendalikan keadaan manusia untuk hidup bahagia, sehat, tentram, aman dan damai.
4. Dimensi Sosial
   Dimensi ini erat kaitannya dengan suatu golongan kelompok maupun lingkungan masyarakat. Dalam Islam, dimensi sosoial dimaksudkan agar manusia mengetahui bahwa tanggung jawab tidak hanya diperuntukkan pada perubahan yang bersifat pribadi ataupun umum.

---

[65] Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 4.

Sementara itu, dalam mengembangkan kemampuan peserta didik, ada 4 (empat) kecerdasan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Kecerdasan Intelektual
   Kecerdasan ini kaitannya dengan kapasitas IQ peserta didik, bagaimana sisiwa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan IQ-nya. Kecerdasan intelektual pada diri manusia sangat erat kaitannya dengan proses berfikir atau kecerdasan berfikir yang disebut aspek kognitif.
2. Kecedasan Emosional
   Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, menjaga akan beban setres, tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati dan berdoa.
3. Keserdasan Spiritual
   Menurut Ary Ginanjar menyatakan bahwa inti dari kecerdasan spiritual adalah pemahaman tentang kehadiran manusia itu sendiri yang muaranya menjadi ma'rifat kepada Allah swt. Ketika menusia mendapatkan ma'rifat tersebut, maka secara langsung akan dapat mengenali dirinya sendiri sekaligus mengenal Tuhannya, dalam prespektif Islam hal ini merupakan tingkat kecerdasan yang paling tinggi.[66]
4. Kecerdasan Qalbiyah
   Kecerdasan Qolbiyah yang sempurna maka akan menghadirkan kecerdasan agama pada dirinya. Kecedasan agama adalah kecerdasan yang lebih tinggi di dalam diri manusia, dan secara langsung seorang tersebut

[66]Eksplorasi lebih jauh lihat Ary Ginanjar Agustian, *ESQ, Emotional Spiritual Quotient* (Jakarta: Arga, 2001).

akan melampaui kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual.

Berkaitan dengan kemampuan peserta didik, al-Ghazâlî menyatakan bahwa setiap manusia lahir membawa fitrah sebagai potensi dasar untuk beriman kepada Allah SWT. Fitrah itu sengaja disiapkan oleh Allah SWT sesuai dengan kejadian manusia, cocok dengan tabiat dasarnya yang memang cenderung kepada agama tauhid (Islam). Oleh karenanya, tugas orang tua dan pendidik diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan fitrah tersebut agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan penciptaan-Nya.[67]

Sejalan dengan tujuan pendidikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka belajar termasuk ibadah.[68] Oleh karena itu, segala bentuk ibadah (yang di dalamnya termasuk belajar) harus diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, melalui pendekatan (*taqarrub*) kepada-Nya.[69]

Dengan dasar pemikiran ini, maka seorang peserta didik yang baik harus memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu: *Pertama,* harus berjiwa bersih, terhindar dari budi pekerti yang hina dan sifat tercela lainnya. *Kedua,* harus menjauhkan diri dari persoalan-persoalan duniawi, mengurangi keteriakatan dengan dunia, karena akan mengganggu lancarnya penguasaan ilmu. *Ketiga,* hendaknya bersikap rendah hati atau tawadlu'. *Keempat,* peserta didik baru hendaknya

---

[67] Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam,* hlm.89.

[68]Dalam pandangan al-Ghazâlî, belajar adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran yang bertahap, dimana proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah menjadi manusia sempurna.

[69]Abdul Halim Mahmood, *Hal Ihwal Tasawwuf, dari al Munqidz Min al Dlalâl*, ter. Abu Bakar Basymeleh (Jakarta: Darul Ihya', 1994), hlm.179

hendaknya jangan memperlajari ilmu-ilmu yang saling berlawanan, atau pendapat yang saling berlawanan atau bertentangan. *Kelima,* hendaknya mendahulukan mempelajari yang wajib, misalnya tentang al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. *Keenam,* hendaknya mempelajari ilmu secara bertahap. *Ketujuh,* hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum menguasai disiplin ilmu sebelumnya. *Kedelapan,* hendaknya mengenal nilai setiap ilmu yang dipelajarinya.[70]

Lebih lanjut, untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, Hasyim Asy'ari menyarankan kepada peserta didik untuk memperhatikan sepuluh etika yang mesti dicamkan ketika belajar. Kesepuluh etika itu di antaranya adalah membersihkan hati dari berbagai penyakit hati dan keimanan, memiliki niat yang tulus – bukan mengharapkan sesuatu yang material – memanfaatkan waktu dengan baik, bersabar dan memiliki sifat qana'ah, pandai membagi waktu, tidak terlalu banyak makan dan minum, bersikap hari-hati, menghindari dari makan yang menyebabkan kebodohan, tidak memperbanyak tidur, dan menghindari dari hal-hal yang kurang bermanfaat.[71]

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baik, peserta didik mesti memilih dan mengikuti pendidik yang baik pula. Dalm hal ini perlu adanya batasan atau karakteristik pendidikan yang baik. Hasyim Asy'ari menyebutkan ciri-ciri tersebut, yaitu cakap dan profesional (*kalimat ahliyatuh*), kasih sayang (*tahaqqaqat syafâqatuh*), berwibawa (*zhaharat murû'atuh*), menjada diri dari hal-hal yang merendahkan

---

[70]Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 99-101. Lihat juga Ridla, *Tiga Aliran Utama,* hlm. 124-128.

[71] Hasyim Asy'ari, *Adâb al-'âlim wa al-muta'allim fîma Yahtâj Ilaih al-Muta'allim fî Ahwâl Ta'allumih wa ma yatawaqqaf al-Mu'alim fî maqâmat Ta'lîmih* (Jombang: Turats al-Islamiy, 1415 H.), hlm. 24-28.

martabat (*'urifat iffatuh*), berkarya (*isytaharat shiyânatuh*), pandai mengajar (*ahsan ta'lîm*), dan berwawasan luas (*ajwa tafhîm*). Kehatia-hatian dalam memilih pendidik ini didasarkan atas pandangannya bahwa itu sama dengan agama. Oleh karena itu, peserta didik harus tahu dari mana agama itu diperoleh.[72]

Berkaitan dengan etika seorang peserta didik kepada pendidik, Asy'ari menawarkan dua belas etika, yaitu hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendidik, memilih pendidik yang *wara'* (berhati-hati) disamping profesional, mengikuti jejak-jejak pendidik, memperhatikan apa yang menjadi hak pendidik, bersabar terhadap kekerasan pendidik, berkunjung kepada pendidik pada tempatnya atau mintalah ijin terlebih dahulu kalau keadaan memaksa untuk tidak pada tempatnya, duduklah dengan rapi dan sopan bila berhadapan dengan pendidik, berbicaralah dengan sopan dan lemah lembut, dengarkan segala fatwanya, jangan sekali-kali menyela ketika sedang menjelaskan, dan gunakan anggota yang kanan bila menyerahkan sesuatu kepadanya.[73]

Sedangkan etika peserta didik terhadap pelajaran, ia menyarankan agar memperhatikan etika berikut: memperhatikan ilmu yang bersifat fardhu 'ain untuk dipelajari, harus mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung ilmu *fardhu 'ain,* berhati-hati dalam menaggapi *ikhtilaf* para ulama, mendiskusikan dan menyetorkan hasil belajar kepada orang yang dipercayainya, senantiasa menganalisa dan menyimak ilmu, pancangkan cita-cita yang tinggi, bergaullah dengan orang yang berilmu tinggi, ucapkan salam bila sampai di *majlis ta'lim*, hendaklah bertanya apabila ada hal-hal yang belum dipahami, bila kebetulan

[72] Ibid, hlm.29.
[73]Ibid, hlm. 29-43.

bersamaan dengan banyak tema, maka sebaiknya jangan mendahului antrian kalau tidak mendapatkan ijin, jangan lupa membawa catatan setiap kita bepergian, pelajari pelajaran yang telah diajarkan dengan kontinyu (*istiqamah*), tanamkan rasa antusias/semangat dalam belajar.[74]

D. Kurikulum Pendidikan Islam

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum.[75] Kurikulum merupakan "peta jalan" yang akan menjadi acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Dengan demikian, kurikulum mempunyai peranan sentral karena menjadi arah atau titik pusat dari proses pendidikan.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan, pengertian kurikulum tidak lagi diartikan secara sempit atau terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas dari itu, kurikulum bisa meliputi aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar

---

[74] Ibid, hlm.43-45.

[75]Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin *currere* yang berarti *to run* (menyelenggarakan) atau *to run the course*(menyelenggarakan suatu pengajaran). Dari sini kemudian muncul berbagai definisi mengenai kurikulum. Misalnya Harold B. Albertys (1965) memandang kurikulum sebagai " *all of the activities that are provided for students by the school"*. Dalam hal ini, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan diluar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Definisi ini melihat manfaat kegiatan dan pengalaman siswa di luar mata pelajaran tradisional. Sedangkan J.G. Saylor et.al. memandang kurikulum dalam empat sisi, yaitu : (1) kurikulum sebagai tujuan, (2) kurikulum sebagai kesempatan belajar yang terencana, (3) kurikulum sebagai mata pelajaran), dan (4) kurikulum sebagai pengalaman. Sementara Caswell mendefinisikan kurikulum sebagai jumlah atau keseluruhan pengalaman yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sekolah.

untuk mencapai suatu tujuan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan belajar-mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar-mengajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran, dan sebagainya[76].

Suatu kurikulum harus mencerminkan, baik secara eksplisit maupun implisit, asumsi-asumsi yang dianutnya, mengenai tujuan dan hakekat pendidikan, tujuan dan hakekat kurikulum, asumsi mengenai siswa, proses pendidikan dan pengajaran, visi penyusunan kurikulum mengenai harapan, tuntutan serta kebutuhan yang sedang dan akan dihadapi oleh pengguna jasa pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan substansi keunggulan kompetitif yang mampu bersaing secara substantif maupun metodologi.

Komponen kurikulum dalam pendidikan sangat berarti karena merupakan oprasionalisasi tujuan yang dicita-citakan, bahkan tujuan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan kurikulum pendidikan. Salah satu dari komponen pokok pendidikan, dan kurikulum sendiri juga merupakan komponen-komponen tertentu. Komponen kurikulum tersebut paling tidak mencakup tujuan, struktur program, strategi pelaksanaan yang menyangkut sistem penyajian pelajaran, penilaian hasil belajar, bimbingan penyuluhan, administrasi dan supervisi pendidikan.[77]

Di samping itu, kurikulum harus bisa memberikan arahan dan patokan keahlian kepada peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pengajaran pada suatu lembaga. Oleh karena itu, wajar bila kurikulum selalu

[76]Ibid., hlm. 34.
[77]Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, hlm. 183-184.

berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang terjadi.[78]

Dengan demikian, dalam kurikulum tergambar jelas secara terencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan anak didik. Jadi kurikulum menggambarkan kegiatan belajar-mengajar dalam suatu lembaga kependidikan. Di dalam kurikulum tidak hanya dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh pendidik (guru) kepada anak didik, dan anak didik mempelajarinya, akan tetapi juga segala kegiatan yang bersifat kependidikan yang dipandang perlu, karena mempunyai pengaruh terhadap anak didik, dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, misalnya olah raga, kepramukaan, seni budaya, mempunyai pengaruh cukup besar dalam proses mendidik anak didik, sehingga perlu di integrasikan ke dalam kurikulum.[79]

Kurikulum dalam pendidikan Islam, dikenal dengan kata *manhaj* yang berarti jalan yang terang, yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan.

M. Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.

---

[78]Khaeruddin dan Mahfud Junaidi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasinya di Madrasah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 23.

[79] M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara Baru, 1994), hlm. 84.

Kurikulum dalam pendidikan Islam, berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam hal ini proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna (*insan kamil*) yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam.

Berdasarkan beberapa definisi dan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama (pendidikan Islam) diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan pelajar.

Sistem pendidikan Islam menuntut pengkajian kurikulum yang islami, tercermin dari sifat dan karakteristiknya. Kurikulum seperti itu hanya mungkin, apabila bertopang yang mengacu pada dasar pemikiran yang islami pula., serta bertolak dari pandangan hidup serta pandangan tentang manusia (pandangan Antropologis) serta diarahkan kepada tujuan pendidikan yang dilandasi kaidah-kaidah islami.[80]

Menurut Abdurrahman An-Nahlawi dalam Uhbiyati Agar kurikulum pendidikan Islam tersebut diatas dapat terpenuhi maka dalam penyusunannya supaya selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

---

[80] Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 176.

a. Sistem dan perkembangan kurikulum tersebut hendaknya selaras dengan fitrah insani sehingga memiliki peluang untuk menyucikannya, menjaganya dari penyimpangan dan menyelamatkannya.
b. Kurikulum dimaksud hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan islam, yaitu ikhlas, taat dan beribadah kepada Allah.
c. Pentahapan serta pengkhususan kurikulum hendaknya memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik maupun unisitas (kekhasan)nya seperti karakteristik ke-anak-an (dalam berbagai tahapan perkembangannya), kewanitaan dan kepriaan. Demikian pula fungsi serta peranan dan tugas masing-masing dalam kehidupan sosial.
d. Dalam berbagai pelaksanaan, aktifitas, contoh dan nashnya, hendaknya kurikulum memelihara segala kebutuhan nyata kehidupan masyarakat, sambil tetap bertopang pada jiwa dan cita-cita ideal islamnya, seperti rasa syukur serta harga diri sebagai umat Islam serta tetap mendukung dan menegakkannya.
e. Secara keseluruhan struktur organisasi kurikulum tersebut hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan, bahkan sebaliknya, terarah kepada pola hidup islami, dengan kata lain, kurikulum tersebut berpulang untuk menempuh kesatuan jiwa umat.
f. Hendaknya kurikulum itu realistik, dalam arti bahwa ia dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta batas kemungkinan yang terdapat di negara yang akan melaksanakannya.
g. Hendaknya metode pendidikan/pengajaran dalam kurikulum itu bersifat luwes, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi dan situasi setempat, dengan mengingat pula faktor perbedaan

individual yang menyangkut bakat minat serta kemampuan siswa untuk menangkap, mencerna dan mengolah bahan pelajaran yang bersangkutan.

h. Hendaknya kurikulum itu efektif, dalam arti menyampaikan dan menggugah perangkat nilai edukatif yang membuahkan tingkah laku yang positif serta meninggalkan dampak efektif (sikap)yang positif pula dalam jiwa generasi muda.
i. Kurikulum itu hendaknya memperhatikan pula tingkat perkembangan siswa yang bersangkutan, misalnya bagi suatu fase perkembangan tertentu diselaraskan dengan pola kehidupan dan tahap perkembangan perasaan keagamaan dan pertumbuhan bahasa bagi fase tersebut.[81]

Menurut Al-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Agama dan akhlak itu harus diambil dari Al-Quran dan Hadits serta contoh-contoh dari tokoh terdahulu yang shaleh.
2. Kurikulum pendidikan islam harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal dan rohani. Untuk pengembangan menyeluruh ini kurikulum harus berisi mata pelajaran yang banyak, sesuai dengan tujuan pembinaan setiap aspek itu.
3. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal dan rohani manusia. Keseimbangan itu tentulah bersifat relatif karena tidak dapat diukur secara objektif.

[81] Ibid, hlm. 176-179.

4. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan juga seni halus, yaitu ukir, pahat, tulis-indah, gambar, dan sejenisnya. Selain itu, memperhatikan juga pendidikan jasmani, latihan militer, teknik, keterampilan, dan bahasa asing sekalipun semuanya ini diberikan kepada perseorangan secara efektif berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan.
5. Kurikulum pendidikan islam mempertimbangkan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang sering terdapat ditengah manusia karena perbedaan tempat dan juga perbedaan zaman. Kurikulum dirancang sesuai dengan kebudayaan itu.[82]

Salah satu komponen operasional pendidikan Islam sebagai suatu sistem adalah materi. Materi pendidikan Islam ialah semua bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu sistem institusional pendidikan.[83] Materi kurikulum sebenarnya hanyalah alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk mengetahui penting atau tidaknya disiplin ilmu dimasukkan ke dalam kurikulum, kita harus mengetahui prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam.

Prinsip-prinsip dalam pendidikan islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama yaitu Al-Quran dan Al-hadist, dimana kapan pun lembaga pendidikan itu berada. Prinsip yang ditetapkan Allah dan diperintahkan Rasulullah berikut ini dapat dijadikan pegangan dasar dalam kurikulum tersebut :

وابتغ فيما اتاك الله الدارالاخرة ولا تنس نصـيبك من الدنيا وأحسـن كما احسـن الله اليك

[82] Tafsir, *Ilmu Pendidikan,* hlm. 65-66.
[83] Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam,* hlm. 161.

Artinya: "Carilah segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu mengenai kehidupan diakhirat dan janganlah kamu melupakan nasib hidupmu didunia, dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu (al-Qashash: 77)

Sementara Muhaimin dan Abdul Mujib mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan Islam meliputi :[84]

a. Prinsip orientasi pada tujuan: "*al-umuru bi maqasidiha*" merupakan adagium ushuliyah yang berimplikasikan pengusulan, agar seluruh aktivitas kurikulum terarah, sehingga tujuan pendidikan yang tersusun sebelumnya tercapai. Di samping itu, perlu adanya persiapan khusus bagi para penyelenggara pendidikan untuk menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh anak didik seiring dengan tugas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT.
b. Prinsip relevansi: implikasinya adalah mengusulkan agar kurikulum yang ditetapkan harus dibentuk sedemikian rupa sehingga tuntutan pendidikan dengan kurikulum tersebut dapat memenuhi jenis dan mutu tenaga kerja yang dibutuhkan masyarakat serta tuntuta vertikal dalam mengemban nilai-nilai ilahi sebagai rahmatan lil 'alamin.
c. Prinsip Efesiensi. Implikasinya adalah mengusulkan agar kegiatan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, biaya dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai dan memenuhi harapan.
d. Prinsip efektifitas. Implikasinya membuahkan hasil sebanyaknya tanpa kegiatan yang mubadzir.

[84] Muhaimin dan Mujib, *Pemikiran Pendidikan,* hlm. 193-196.

e. Prinsip fleksibilitas program. Implikasinya adalah kurikulum disusun begitu luwes, sehingga mampu disesuaikan dengan situasi-situasi setempat serta waktu yang berkembang tanpa mengubah tujuan pendidikan yang diinginkan. Prinsip ini tidak hanya dilihat dari faktor saja, tetapi juga dilihat dari totalitas ekosistem faktor kurikulum, baik yang berkenaan dengan perkembangan anak didik (kecerdasan, kemampuan, dan pengetahuan yang diperoleh), metode-metode mengajar yang diguakan, fasilitas-fasilitas yang tersedia, serta lingkungan yang mempengaruhinya.
f. Prinsip integritas. Implikasinya pengupayaan kurikulum tersebut agar menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas dzikir dan fakultas fikir serta manusia yang dapat menyeleraskan struktur kehidupan dunia dan struktur kehidupan akhirat.
g. Prinsip kontinuitas. Implikasinya bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum lainnya baik secara vertikal atau horizontal.
h. Prinsip sinkronisme. Implikasinya adalah bagaimana suatu kurikulum dapat seirama, searah, dan setujuan, serta jangan sampai terjadi kegiatan kurikulum lain yang menghambat, berlawanan, atau mematikan kegiatan lain.
i. Prinsip objektivitas. Implikasinya adalah adanya kurikulum tersebut dilakukan melalui tuntutan kebenaran ilmiyah yang objektif dengan mengesampingkan pengaruh-pengaruh emosi dan irasional.
j. Prinsip demokrasi. Implikasinya adalah pelaksanaan kurikulum harus dilakukan secara demokrasi, artinya

saling mengerti, memahami keadaan dan situiasi tiap-tiap subjek dan objek kurikulum.

k. Prinsip analisis kegiatan. Prinsip ini mengandung tuntutan agar kurikulum dikonstruksikan melalui proses analisa isi bahan mata pelajaran, serta analisa tingkah laku yang sesuai dengan isi materi pelajaran .
l. Prinsip individualisasi. Prinsip kurikulum yang memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan pada umumnya yang meliputi selurh aspek pribadi anak didik, seperti perbedaan jasmani, watak inteligensi, bakat serta kelebihan dan kekurangannya.
m. Prinsip pendidikan seumur hidup. Konsep ini diterapkan dalam kurikulum mengingat keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang dan perlunya keutahan wawasan (orientasi) manusia sebagai subjek yang sadar akan nilai (yang mengkayati dan yakin akan cita-cita tujuan hidupnya).

Menurut al-Syaibani, prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan pada waktu menyusun kurikulum ada tujuh macam, yaitu: *Prinsip pertama* adalah pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilainya. *Prinsip kedua* adalah prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan dan kandungan kurikulum. *Prinsip ketiga* adalah keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. *Prinsip keempat* adalah berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan pelajar, begitu juga dengan alam sekitar fisik dan sosial, di mana pelajar hidup dan berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran pengalaman dan sikapnya. *Prinsip kelima* adalah pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan masalahnya dan juga memelihar perbedaan dan kelainan di antara alam sekitar dan masyarakat. *Prinsip keenam* adalah prinsip perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi sumber

pengambilan falsafah, prinsip, dasar kurikulum, metode mengajar pendidikan Islam, mencela keras sifat meniru (taklid) secara membabi buta dan membeku pada yang kuno yang diwarisi dan mengikuti tanpa selidik. *Prinsip ketujuh* adalah prinsip peraturan antara mata pelajaran, pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.[85]

Sedangkan menurut al-Abrasyi, prinsip kurikulum pendidikan Islam mencakup 5 aspek, yaitu:

a. Harus ada mata pelajaran yang ditujukan mendidik rohani atau hati. Ini berarti perlu diberikan mata pelajaran ketuhanan (*aqidah*).
b. Mata pelajaran harus ada yang berisi tuntunan cara hidup, yaitu ilmu fikh dan akhlak.
c. Mata pelajaran yang diberikan hendaknya mengandung kelezatan ilmiah, yaitu yang sekarang orang mempelajari ilmu untuk ilmu. Ilmu dipelajari untuk memenuhi rasa ingin tahu yang ada pada tiap manusia.
d. Mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan, dengan kata lain, ilmu harus terpakai.
e. Mata pelajaran yang diberikan berguna dalam mempelajari ilmu lain. Yang dimaksud ialah ilmu alat seperti bahasa dan semua cabangnya.[86]

Al-Syaibani menambahkan bahwa prinsip utama kurikulum pendidikan Islam, meliputi:

a. Berorientasi pada Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Adapun kegiatan kurikulum,baik berupa falsafah, tujuan, kandungan dan metode, cara melakukan dan hubungan-hubungan yang berlaku di lembaga harus berdasarkan Islam.

[85] Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam,* hlm. 161-163.
[86] Tafsir, *Ilmu Pendidikan,* hlm. 66-67.

b. Prinsip menyeluruh (*syumuliah*/universal), baik dalam tujuan maupun isi kandugannya.
c. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) antara tujuan dan kandungan kurikulum.
d. Prinsip interaksi (*ittishaliyah*) antara kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat.
e. Prinsip pemeliharaan (*wiqayah*) antara perbedaan-perbedaan individualitas.
f. Prinsip perkembangan (*tanmiyah*) dan perubahan (*taghayyur*) seiring dengan tuntutan yang ada dengan tidak mengabaikan nilai-nilai absolut.
g. Prinsip integritas (*muwahhadah*) antara mata pelajaran, pengalaman dan aktivitas kurikulum dengan kebutuhan anak didik, masyarakat dan tuntutan zaman, tempat anak didik berada.[87]

Persoalan kurikulum berkaitan erat dengan materi yang diberikan kepada peserta didik. Adapun mengenai materi pendidikan, al-Ghazâlî berpendapat bahwa al-Qur'an beserta kandungannya adalah merupakan ilmu pengetahuan. Isinya sangat bermanfaat bagi kehidupan, membersihkan jiwa, memperindah akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah.[88]

Dalam hal ini, al-Ghazâlî membagi ilmu menjadi dua macam, yaitu: *pertama, 'ilmu syar'iyyah*, yang terdiri atas ilmu ushul (ilmu pokok), seperti ilmu al-Qur'an, Sunnah nabi, pendpat-pendapat sahabat dan ijma', ilmu furu' (cabang) seperti fiqh dan akhlak, ilmu pengantar (*muqaddimah*) seperti ilmu bahasa dan gramatika serta ilmu pelengkap (*mutammimah*) seperti ilmu qiraat, tafsir, dan sebagainya. *Kedua, 'ilmu ghairi syar'iyyah*; yang mencakup selain beberapa

[87] Muhaimin dan Mujib, *Pemikiran Pendidikan,* hlm. 196-197.
[88] Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hlm.88.

ilmu tersebut di atas.[89] Sementara apabila dilihat dari sifatnya, ilmu pengetahuan terbagi dua, yaitu ilmu yang terpuji (*mahmudah*) dan ilmu yang tercela (*madzmumah*). Menurut al-Ghazâlî ilmu pengetahuan yang terpuji wajib dicari dan dipelajari. Sementara ilmu pengetahuan yang tercela wajib dihindari oleh setiap peserta didik.[90]

Sejalan dengan itu, al-Ghazâlî mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari di sekolah, yaitu: 1) ilmu al-Qur'an dan ilmu agama seperti fiqh, hadits dan tafsir. 2) sekumpulan bahasa, nahwu dan makhraj serta lafadz-lafadznya, karena ilmu ini berfungsi membantu ilmu agama. 3) illmu-ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi yang beraneka ragama jenisnya, termasuk juga ilmu politik. 4) ilmu kebudayaan seperti syair, sejarah dan beberapa cabang filsafat.[91]

Jika diamati secara seksama, nampak al-Ghazâlî menggunakan dua pendekatan dalam membagi ilmu pengetahuan, yaitu; *pertama,* pendekatan fiqh yang melahirkan pembagian ilmu pada yang wajib dan fardhu kifayah. *Kedua,* pendekatan tasawuf (akhlak) yang melahirkan ilmu pada yang terpuji dan tercela. Hal ini akan semakin jelas jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan di atas, yakni pendekatan diri kepada Allah.[92]

Di samping itu, Ikhwân al-Shafâ, membagi pengetahuan kepada tiga kelompok, yaitu: 1) pengetahuan adab/sastra, 2)

---

[89] Ramayulis dan Nizar, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam,*hlm.7.
[90] Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam,* hlm. 90.
[91] Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyah al-Uslamiyah: Ushuluha wa Tathawwuruha fi al-Bilad al-Arabiyyah* (Cairo: 'Alam al-Kutub, 1977), hlm.243.
[92] Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm.218.

pengetahuan syariat, dan 3) pengetahuan filsafat.[93] Sehingga kebutuhan jiwa manusia terhadap ilmu pengetahuan tidak memiliki keterbatasan pada ilmu agama (*naqliyah*) semata. Manusia juga memerlukan ilmu umum (*aqliyyah*). Dalam hal ini, ilmu agama tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu *aqliyyah*, terutama ilmu kealaman dan filsafat. Dalam hal ini, Ikhwân al-Shafâ mengklasifikasi ilmu pengetahuan *aqliyyah* kepada tiga kategori, yaitu matematika, fisika dan metafisika. Ketiga klasifikasi tersebut berada pada kedudukan yang sama, yaitu sama-sama bertujuan menghantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Ikhwân al-Shafâ, ketiga jenis pengetahuan itu dapat diperoleh melalui bantuan panca indera, akal dan inisiasi (bimbingan dan otoritas ajaran agama).[94]

Sedangkan Ibn Khaldûn menetapkan kategori ilmu pengetahuan Islam yang harus menjadi materi kurikulum sekolah, yaitu ilmu-ilmu naqli[95] atau ilmu-ilmu tekstual

---

[93] Pengetahuan syariat adalah pengetahuan *nubuwwah* yang disampaikan oleh para nabi melalui wahyu, sedangkan pengetahuan adab/sastra dan filsafat merupakan hasil upaya jiwa manusia. Bagi mereka, pengetahuan yang paling mulia adalah pengetahuan syariat, setelah itu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh tidak melalui wahyu, tetapi melalui pemikiran akal yang mendalam. Lihat Dahlan, "Filsafat", hlm.193.

[94] Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam,* hlm. 98.

[95] Klasifikasi ilmu-ilmu naqliyyah sangatlah banyak, dan kita dtuntut mempelajarinya karena menjadi bekal akademik untuk mengetahui hukum (ajaran) Tuhan. Hukum (ajaran) Tuhan tidak lain bersumber dari kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga pertama-tama pemahaman terhadapnya memerlukan elaborasi kara (redaksional)nya; ini menjadi kajian disiplin ilmu Tafsir. Lalu kita juga memerlukan pengetahuan tentang otentisitas pembacaannya yang merupakan ruang lingkup ilmu Qiraat. Kita perlu mengetahui jalur transmisi (sanad) hadits, kondisi perawinya dan sebagainya yang merupakan lingkup ilmu hadits. Selanjutnya, kita memerlukan peng-*istinbath*-an hukum dari dalil pokok (sumber baku), sehingga dibutuhkan metodologi *istinbath,* yang

seperti ilmu al-Qur'an, hadits, fiqh, kalam, tasawuf, dan ilmu-ilmu kebahasaan serta ilmu-ilmu aqli atau ilmu-ilmu intelektual,[96] yang meliputi logika, fisika, matematika dan metafisika.[97]

Bila dilihat urgensinya Ibn Khaldûn membagi ilmu pengetahuan sebagai berikut, yaitu: 1) ilmu syariah dengan semua jenisnya, 2) ilmu filsafat, termasuk ilmu alam dan ketuhanan, 3) ilmu alat yang bersifat membantu ilmu-ilmu agama, seperti ilmu lughah dan lain-lain, dan 4) ilmu alat yang membantu falsafah, seperti ilmu mantik (logika).[98]

E. Metode Pendidikan Islam

Istilah metode sering kali disamakan dengan istilah pendekatan, strategi, dan teknik sehingga dalam penggunaannya juga sering saling bergantian yang pada

---

merupakan kajian ilmu Ushul Fiqh. Lalu, kita akan mempunyai kemampuan mengetahui hukum-hukum Tuhan terhadap perilaku orang-orang Mukallaf, yakni ilmu Fiqh. Dengan pembatasan Ibn Khaldûn terhadap ilmu-ilmu naqliyyah hanya pada umat Islam, baik dalam teori maupun praktik, tampak bahwa ia meletakkan eksplorasi intelektual akal pikir dalam lingkup keilmuan ini di antara dua pembatas, yaitu *pertama,* larangan menkaji kitab-kitan suci selain al-Qur'an. *Kedua,* penyerahan (percaya) sepenuhnya terhadap generasi terdahulu (*salaf*) berkenaan dengan buah pemikiran mereka dalam ruang lingkup ilmu tersebut. Lihat Ridla, *Tiga Aliran Utama,* hlm.188-189.

[96] Adapun dengan ilmu-ilmu aqliyyah (intelektual), Ibn Khaldûn bersikap bebas dan terbuka. Ia mengakui watak generl "kebudayaan dan kemanusiawian: keilmuan ini di satu sisi, dan juga watak "progresivitas-dinamisnya" bagi peradaban manusia di sisi lain. Menurutnya, ilmu-ilmu inetelektual merupakan karakter dasar manusia sebagai makhluk berpikir. Ilmu-ilmu ini tidak terbatas pada agama dan budaya tertentu, melainkan mempunyai akses yang sama terhadap penguasaan selainnya. Lihat Ibid.

[97]Armahedi Mazhar, "Tradisi Sains dan Teknologi" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, vol.4, hlm. 238. Lihat juga Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam,* hlm.138.

[98] Ibid, hlm. 139.

intinyanadalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan atau cara yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.[99]

Sedangkan metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan yang didasarkan pada asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai supra sistem. M. Athiyah al-Abrasyi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman peserta didik. Dengan demikian, metode diartikan sebagai cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berfikir, serta cinta ilmu, guru dan sekolah.[100]

Dalam proses pembelajaran, seluruh metode mengajar yang ada, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karenanya, kita tidak dapat menentukan metode mengajar yang mana yang dikatakan sebagai metode mengajar yang efektif. Oleh karena itu, dalam memilih metode mengajar perlu diperhatikan kriteria berikut: [101]

1. Metode mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar haruslah sesuai dengan tujuan pelajaran.
2. Metode mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan pikiran murid.
3. Metode mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar tidak memerlukan waktu lama (efisien).
4. Metode mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar haruslah memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada.

---

[99] Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm.90.
[100] Ibid, hlm. 91-92.
[101]Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 191-193

Demikian pula dalam mengajar, guru tidak seharusnya selalu tergantung pada suatu metode tertentu, melainkan harus melihat murid dan juga melihat silabi yang ada, agar nantinya apa yang diharapkan bisa tercapai. Selama mengajar, seorang guru itu dituntut untuk menggunakan metode yang bervariasi, serta sesuai dengan keberadaan siswa, agar nantinya siswa tersebut tidak merasa jenuh.

Adapun macam-macam metode mengajar adalah sebagai berikut: [102]

1. Metode ceramah

   Metode ceramah adalah "suatu metode ilmiah di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan"
2. Metode tanya jawab

   Metode tanya jawab adalah "penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab".
3. Metode diskusi

   Metode diskusi adalah "suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah".
4. Metode demonstrasi

   Metode demonstrasi yaitu "suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyyah melakukan sesuatu. (Misalnya: proses cara mengambil

---

[102] Zuhairini, et. al., *Methodik Khusus Pendidikan Agama* (Malang: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1983), hlm. 83-112.

wudhu', proses cara mengerjakan shalat jenazah dan sebagainya).

5. Metode sosiodrama dan bermain peran

   Metode sosiodrama ialah "Bentuk metode mengajar dengan mendramakan atau memerankan hubungan sosial. Sedangkan bermain peranan lebih menekankan pada kenyataan di mana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan di dalam mendramakan masalah-masalah hubungan sosial".

6. Metode karya wisata

   Metode karya wisata yaitu "suatu karya metode pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak-anak keluar kelas untuk dapat memperhatikan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran".

7. Metode resitasi

   Metode resitasi yaitu "suatu metode dengan cara penyajian bahan pelajaran, di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggungjawabkan".

8. Metode kerja kelompok

   Metode kerja kelompok yaitu "kelompok kerja dari kumpulan beberapa individu yang bersifat paedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik (kerja sama) antara individu serta saling percaya-mempercayai".

9. Metode drill/latihan siap

   Metode drill yaitu "suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan".

10. Metode problem solving

    Metode problem solving yaitu "suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-

anak untuk menghadapi masalah-masalah yang paling sederhana sampai kepada yang sulit".

11. Metode eksperimen

    Metode eksperimen yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mangalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.

Dalam konteks pendidikan Islam, metode dalam pendidikan mempunyai tugas dan fungsi memberi cara yang baik untuk pelaksanaan operasional pendidikan Islam. Metode harus sejalan dengan substansi dan tujuan ilmu pengetahuan induknya, dan dalam penerapannya bersumber pada al-Qur'an dan Hadits yang meliputi:

1. Al-Qur'an menunjukkan fenomena bahwa firman Allah sesuai dengan sasaran dan tempat yang dihadapi. Allah memberikan metode pengajaran alternatif yaitu pilihan dan setiap individu berbeda kemampuannya.
2. Allah mendidik manusia disesuaikan dengan kemampuan masing-masing
3. Bersifat *multi approach*, yaitu melalui pendekatan religius, filosofis, sosio-kultural dan *scientific*.

Secara normatif, banyak sekali prinsip dalam al-Qur'an yang bisa dijadikan metode dalam pengajaran, di antaranya adalah:

1. Metode suasana gembira (QS. al-Baqarah: 25 dan 185)
2. Metode lemah lembut (QS. Ali-Imrān: 159)
3. Metode bermakna (QS. Muhammad: 16)
4. Metode prasyarat atau muqadimah (QS.al-Baqarah: 1-2)
5. Metode komunikasi terbuka (QS. al-A'rāf: 179)
6. Metode memberikan pengetahuan baru (QS. al-Baqarah: 164 dan al-Fushilat: 153)
7. Metode uswatun hasanah (QS. al-Ahzāb: 21)
8. Metode praktek atau pengamatan aktif (QS. al-Shaf: 2-3 dan al-Baqarah: 25)

9. Metode bimbingan, penyuluhan dan kasih sayang (QS. al-Anbiyā': 107 dan al-Nahl: 25)
10. Metode cerita (QS. al-A'rāf: 176)
11. Metode perumpamaan (QS. Ibrāhim: 18)
12. Metode hukuman dan hadiah (QS. al-Ahzāb: 72-73)

F. Evaluasi Pendidikan Islam

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation*. Menurut Wand dan Brown dalam buku *Essentials of Educational Evaluation*, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu.[103] Sedangkan menurut Mehrent dan Lehmann. Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.[104]

Kegiatan evaluasi pembelajaran secara umum bertujuan untuk mengatahui tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari suatu program. Melalui evaluasi, berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran dapat diketahui. Hasil dari evaluasi memberikan masukan yang berharga tentang pencapaian siswa terhadap target kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan. Lebih dari itu, hasil evaluasi tersebut memberikan masukan kepada guru dan pengambil kebijakan lainnya tentang kemungkinan perlunya peninjauan kembali trhadap rumusan kompetensi/tujuan, materi, atau strategi

[103]Wayan Nurkancana dan Sumartana, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 1.

[104]Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan tekhnik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 3.

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi evaluasi tidak semata-mata bertujuan mengungkap pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga mengungkap efektifitas kegiatan pembelajaran itu sendiri.

Fungsi evaluasi pendidikan adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan jarak dari sasaran pokok kurikulum secara komprehensif, penetapan bagi tingkah laku apa yang harus direalisasikan oleh siswa dan meyeleksi atau membentuk instrumen yang valid, terpercaya dan praktis untuk meniai sasaran utama proses pendidikan atau ciri khusus perkembangan dan pertumbuhan anak didik.

Secara lebih rinci, tujuan evaluasi pendidikan adalah:

a. Untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum.
b. Untuk dapat mengambil keputusan tentang materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan kepada atau dipelajari oleh siswa.
c. Untuk mengetahui hasil belajar siswa.
d. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah.
e. Untuk mengetahui dan memutuskan apakah siswa yang dapat melanjutkan ke program berikutnya, ataukah harus memperoleh tindakan remedial.
f. Untuk mendiagnosa kesulitan siswa.
g. Untuk dapat mengelompokkan siswa secara cermat.

Evaluasi belajar dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu:

1. Prinsip keseluruhan

   Maksudnya evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara bulat, utuh dan menyeluruh. Prinsip ini juga dikenal dengan prinsip komprehensif. Tidak boleh dilakukan secara terpisah atau sepotong-potong melainkan harus mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku peserta didik, karena evaluasi hasil belajar dapat mengungkap aspek proses berpikir serta aspek kejiwaan lainnya seperti aspek nilai, sikap, keterampilan dan lain-lain.
2. Prinsip kesinambungan

   Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan prinsip kontinuitas. Maksudnya evaluasi hasil belajar harus dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu kewaktu. Dengan prinsip kesinambungan guru dapat memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran atau mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik diawal sampai akhir program pendidikan yang mereka tempuh. Dan guru dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijakan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya agar tujuan intruksional khusus yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan sebaiknya.
3. Prinsip Obyektivitas

   Dalam Prinsip Obyektivitas evaluasi hasil belajar dapat dikatakan baik apabila dilakukan tanpa adanya interfensi dari luar dan terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif. Oleh sebab itu guru harus betul-betul obyektif

dengan senantiasa berfikir dan bertindak wajar sesuai dengan kenyataan. Apabila ada hal-hal yang bersifat subyektif maka evaluasi hasil belajar kemurniannya ternodai.[105]

Dalam perspektif pendidikan Islam, evaluasi memiliki beberapa implikasi paedagogis, yaitu:[106]

1. Untuk menguji daya kemampuan manusia yang beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialami (QS. al-Baqarah : 155).
2. Untuk mengetahui sejauhmana atau sampai dimana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya, seperti evaluasi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada burung hud hud (QS. al-Naml : 27).
3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keimanan dan ke-Islaman seseorang, seperti evaluasi yang dilakukan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail (QS. al- Shāffāt : 103-107).
4. Untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia tentang pelajaran yang telah diberikan Allah kepada mereka, seperti evaluasi yang dilakukan Allah terhadap Nabi Adam yang telah diajarkan nama-nama sesuatu dan diperintahkannya kepada para malaikat (QS. al-Baqarah: 31).
5. Memberikan kabar gembira (*tabsyîr*) bagi yng berkelakuan baik dan memberikan ancaman (*tandzîr*) bagi manusia yang berperilaku buruk (QS. al-Zalzalah : 7-8). *

---

[105]Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31-33.

[106]Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam,* hlm. 280.

4
POTRET LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Pesantren: Unsur-unsur dan Karakteristiknya

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.[1] Pondok pesantren merupakan model lembaga pendidikan Islam pertama yang mendukung keberlangsungan sistem pendidikan nasional,[2] dan memiliki akar tradisi sangat kuat di lingkungan masyarakat Indonesia.

Secara historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia (*indigenous*).[3] Sebagai lembaga *indigenous,* pesantren muncul

---

[1]M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 80. Lihat juga Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 1.

[2]Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 49.

[3]Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 3.

dan berkembang dari pengalaman sosiologis dan memiliki keterkaitan erat dengan komunitas lingkungannya.[4] M. Dawam Rahardjo menyebut bahwa pesantren merupakan salah satu simbol budaya pendidikan asli Indonesia (Nusantara), karena sistem pendidikan yang dikembangkan di pesantren memang berakar pada tradisi pendidikan keagamaan semasa Hindu dan Budha berkembang di Indonesia.[5]

---

[4]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 108.

[5]M. Dawam Rahardjo (ed.), hlm. *Pergulatan Dunia Pesantren*: *Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), hlm. tt. Islamisasi yang berlangsung sangat intensif di Nusantara sejak abad XIII telah mentransformasikan budaya pendidikan tersebut menjadi pondok pesantren. Dalam hal ini, Islamisasi Nusantara memberikan muatan pemaknaan baru dari versi Islam terhadap sistem pendidikan keagamaan Hindu dan Budha tersebut. Itulah sebabnya, dari segi nama, "pesantren" sering kali dikaitkan dengan istilah dalam bahasa India "*shastri*" yang berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu atau orang yang ahli tentang kitab suci. Istilah "*santri*" yang sering dikaitkan dengan kata "*sattiri*" dalam bahasa Tamil yang bermakna orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan secara umum. Lihat Departemen Agama RI, *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Jakarta: Dirjen Binbaga, 1999), hlm. 95. Namun Martin van Bruinessen, barang kali termasuk salah seorang yang meragukan bahwa pesantren berasal dari tradisi Hindu atau lokal, mengingat bentuk kelembagaan seperti pesantren juga terdapat di bagian kawasan muslim lainnya seperti India, Turki atau Pakistan. Dengan demikian, patut diragukan asumsi umum bahwa pesantren berasal dari tradisi lokal. Martin bahkan mengatakan ada perbedaan mendasar antara pesantren Hindu atau lokal dengan pesantren yang Islam. Perbedaan itu antara lain adalah pesantren Islam tidak hanya mengajarkan tentang kitab suci seperti halnya pesnatren lama yang sampai sekarang di tempat-tempat tersebut hanya diajarkan kitab-kitab suci mereka, mengingat konsep teologi keduanya berbeda. Lihat M.Ali Haidar,"Akar Tradisi Pesantren dalam Masyarakat Indonesia," dalam *Tarekat, Pesantren dan Budaya Lokal,* ed. M. Nazim Zuhdi, et.al. (Surabaya: Sunan Ampel Press, 1999), hlm. 72.

Identifikasi asal usul pesantren yang dihubungkan dengan tradisi pendidikan keagamaan Hindu dan Budha memiliki pembenaran dari unsur-unsur pembentuk kultur pendidikan pesantren itu sendiri. Model tradisional pesantren memang menunjukkan ciri khas sebagai pusat pendidikan ilmu-ilmu keagamaan di mana terdapat di dalamnya paling sedikit lima unsur utama,[6] yaitu :

a. Pondok (asrama)

Ada beberapa alasan pentingnya pondok dalam suatu pesantren, yaitu : *pertama,* banyaknya santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kyai yang masyhur keahliannya. *Kedua,* pesantren-pesantren tersebut terletak di desa-desa di mana tidak tersedia perumahan (*akomodasi*) yang cukup untuk menampung para santri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu asrama khusus bagi para santri. *Ketiga,* sikap timbal balik antara kyai dan santri, di mana para santri menganggap kyainya sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kyai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi.[7]

Di samping alasan tersebut, kedudukan pondok sebagai salah satu unsur pokok pesantren besar sekali manfaatnya. Dengan adanya pondok, maka suasana belajar santri baik yang bersifat intra kurikuler, ekstra kurikuler, kokurikuler maupun *hidden* kurikuler dapat dilaksanakan secara efektif.[8]

b. Masjid

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme

---

[6]Fuad Jabali dan Jamhari (ed.), hlm. *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 95.

[7]Dhofier, *Tradisi Pesantren,* 46-47.

[8]Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 16.

dari sistem pendidikan Islam tradisional.[9] Sejak zaman Nabi saw, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam.[10] Di mana pun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, aktivitas administrasi dan kultural. Hal berlangsung selama 15 abad.[11]

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi ini. Para kyai selalu mengajar santrinya di masjid dan menganggapnya sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan sikap disiplin para santri dalam mengerjakan kewajiban shalat lima waktu, khutbah dan shalat Jum'at, memperoleh pengetahuan dan kewajiban agama yang lain. Di Jawa, biasanya seorang kyai yang mengembangkan sebuah pesantren, pertama-tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya. [12]

---

[9]Pendidikan Islam dan masjid merupakan sebuah kesatuan yang integral, di mana masjid merupakan *Islamic centre* (pusat dan urat nadi kegiatan keislaman), hlm. yang meliputi aktivitas keagamaan, politik, kebudayaan dan yudikatif. Lihat Muhammad Munir Mursi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah, Usuluha wa Tatawwuruha fi al-Bilad al-Arabiyah* (Kairo: Alam al-Kutub, 1977) terutama bahasan *Marakiz al-Ta'lim al-Islamiy,* 91-110. Maka dari itu, sejarah Islam menggambarkan bahwa masjid sebagai embrio institusi pendidikan sejak awal merupakan tempat sentral bagi muslim untuk beribadah, berkumpul dan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan keagamaan, keduniaan dan kenegaraan di samping masalah pendidikan dan syariat Islam yang diemban oleh Rasul saw. Pada perkembangan selanjutnya masjid merupakan penyebaran siar Islam dan tempat pendaratan bagi pemikiran-pemikiran kreatif spekulatif. Lihat Abd al-Latif Abdullah Ibn Dohaish, *Growth and Development of Islamic Libraries* (tt: Der al-Islam, 1989), hlm. 290.

[10]Muhammad Athiyah al-Abrashi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah* (tt: Dar al-Qaumiyah, 1964), hlm. 63.

[11]Dhofier,*Tradisi Pesantren,* hlm.49.

[12]Ibid.

c. Pengajaran Kitab-kitab Klasik

Kitab-kitab Islam klasik yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning, ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan.[13] Kitab Kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari proses belajar mengajar dalam komunitas pesantren sangat penting dalam membentuk kecerdasan intelektual dan moralitas pada diri santri.[14] Kajian terhadap kitab klasik tersebut pada gilirannya telah menumbuhkan warna tersendiri dalam bentuk paham dan nilai tertentu.[15]

Pengajian kitab klasik yang dikembangkan dan menjadi karakteristik khusus muatan kurikulum pondok pesantren didominasi oleh masalah yang bersifat *normatif, ritualistik* dan *eskatologis*[16] dengan kajian yang hanya terbatas pada bidang *tafsīr-hadīth*, teologi, etika (*tashawwuf*) dan ilmu instrumen lainnya seperti morfologi (*sharf*), sintaksis *(nahw*), *balaghah*, dan leksikografi (*mu'jam*).[17]

Kesamaan kitab yang diajarkan dan sistem pengajaran tersebut menghasilkan *homogenitas* pandangan hidup, kultural dan praktek-praktek keagamaan di kalangan santri. Bahkan sistem pendidikan pesantren yang tradisional ini, yang dianggap sangat "*statis*" dalam kenyataannya tidak hanya sekedar

---

[13]Daulay, *Historisitas,* hlm.18.

[14]Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 51.

[15]Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 90.

[16]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 132.

[17]Ulil Abshar Abdalla, "Humanisasi Kitab Kuning: Refleksi dan Kritik atas Tradisi Intelektual Pesantren" dalam *Pesantren Masa Depan,* ed. Marzuki Wahid, et.al. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 292.

membicarakan bentuk (*form*) dengan melupakan isi (*content*) ajaran yang tertuang dalam kitab tersebut, tetapi juga memberikan pandangan-pandangan (*interpretasi*) pribadi, baik mengenai isi maupun bahasa dari teks.

Sebagai elemen dasar pengajaran di pesantren, literatur universal tersebut dipelihara dan diajarkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad, secara langsung berkaitan dengan konsep kepemimpinan kyai yang unik.[18] Kitab-kitab klasik tersebut, bila dilihat dari sudut pandang masa kini, menjamin keberlangsungan "tradisi yang benar" dalam rangka melestarikan ilmu pengetahuan agama sebagaimana yang ditinggalkan kepada masyarakat Islam oleh para imam besar masa lalu. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga standar tertinggi ilmu pengetahuan agama yang dapat diraih di masa depan.[19] Dengan demikian, ilmu-ilmu keislaman klasik yang berporos pada piramida kalam, fiqh dan tasawuf dengan berbagai variasi aksentuasi pembidangan yang menjadi ciri khas masing-masing pesantren merupakan wilayah sekaligus media pelestarian dan pengamalan ajaran dan tradisi Islam.[20]

---

[18]Kepemimpinan kyai di pesantren sangat unik karena mereka memakai sistem kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial antara kyai-ulama-santri dibangun atas landasan kepercayaan, bukan karena patron-klien sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Ketaatan santri kepada kyai lebih dikarenakan mengharap *barakah (grace), hlm.* sebagaimana dipahami dalam konsep sufi. Lihat Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan" dalam *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren,* ed. Marzuki Wahid, et.al. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 14.

[19]Wahid, *Menggerakkan Tradisi,* hlm.174.

[20]Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), hlm. 30. Bandingkan dengan Muhtarom H.M, *Reproduksi Ulama di Era GlobalisasiResistansi Tradisional Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7.

d. Santri

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren. Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Dalam tradisi pesantren, santri terbagi menjadi santri mukim dan santri kalong.[21]

Ada beberapa alasan, santri pergi dan menetap di suatu pesantren. *Pertama,* ingin mempelajari kitab-kitab lain yang membahas Islam secara lebih mendalam di bawah bimbingan kyai yang memimpin pesantren. *Kedua,* ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren. *Ketiga,* ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan oleh kewajiban sehari-hari di rumahnya.[22]

Dalam konteks yang sedikit lebih modern, para santri dalam hal ini sering dilibatkan secara langsung dalam unit-unit kegiatan pesantren, seperti dalam pengelolaan unit usaha koperasi, dan sebagainya. Model eksperimentasi semacam ini dapat mendorong santri untuk mengembangkan diri, sehingga diharapkan mereka tidak gagap ketika telah kembali atau bergumul dengan masyarakat luas. Dengan demikian, pesantren sendiri sesungguhnya dapat merupakan sebuah lembaga pendidikan yang ideal karena menyediakan laboratorium kecakapan hidup yang sangat bermanfaat bagi

[21]Santri mukim yaitu santri yang berdatangan dari tempat yang jauh dan menetap dalam pesantren itu. Sebagai santri mukim ia memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Sedangkan santri kalong adalah siswa yang berasal dari sekitar yang memungkinkan mereka pulang ke tempat tinggal masing-masing. Santri versi ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dengan pesantren. Lihat Daulay, *Historisitas,* hlm.15.

[22]Dhofier, *Tradisi Pesantren,* hlm.52.

pengembangan keilmuan dan aktualisasi diri para santri.[23]

e. Kyai

Kyai merupakan elemen yang paling *esensial* dari suatu pesantren. Maju mundurnya pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma kyai. Tujuan dan program pendidikan di pesantren ditetapkan atas maksud dan pengarahan kyai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan tradisi khusus dari setiap kyai menjadi faktor terpenting yang turut menentukan masing-masing tujuan pendidikan di pesantren.[24]

Kebanyakan kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai kerajaan kecil, di mana kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan pesantren. Tidak ada seorang pun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaannya kecuali kyai lain yang lebih besar pengaruhnya. Para santri selalu mengharap dan berfikir bahwa kyai yang dianutnya adalah orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri (*self confident*) baik dalam pengetahuan Islam maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren.[25]

Dengan menggunakan sikap hidupnya sendiri sebagai pedoman, terutama dalam rangka asetisme yang dijalaninya, kyai mengasimilir nilai-nilai budaya baru ke dalam tata nilai yang telah dimiliki pesantren. Sehingga dengan demikian, – tanpa disadari – kyai telah terlibat

---

[23]M. Dian Nafi', et.al. *Praksis Pembelajaran Pesantren* (Yogyakarta: Institute for Training and Development, 2007), hlm. 55.

[24]Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 155.

[25] Ibid., hlm.56.

dalam proses penyesuaian secara terus menerus antara tata nilai yang ada di masyarakat dan nilai-nilai baru yang disentuhnya.[26] Lebih dari itu, kyai mempunyai peranan aktif dalam memelopori terjadinya perubahan masyarakat menurut caranya sendiri.[27]

Kelima unsur tersebut merupakan struktur dasar kelembagaan seluruh pesantren tradisional yang ada di Indonesia. Pesantren tradisional di sini dipahami dalam konteks aktivitas pendidikannya semata-mata difokuskan pada *tafaqquh fi al-dīn,* yaitu pendalaman pengalaman, perluasan pengetahuan dan penguasaan khazanah ajaran agama Islam. Sementara itu, dalam tinjauan Abdurrahman Wahid, unsur-unsur pesantren tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya santri. Peranan kyai dan santri dalam menjaga tradisi keagamaan akhirnya membentuk sebuah subkultur pesantren, yaitu suatu gerakan sosial budaya yang dilakukan komunitas santri dengan karakter tertentu dengan tata nilai yang berlaku di dalam pesantren.[28] Watak utama yang melekat pada pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah menjadikannya memiliki tradisi keilmuan sendiri, namun tradisi ini mengalami perkembangan dari masa ke masa dan menampilkan manifestasi yang berbeda-beda.[29]

Jika dicermati setidak-tidaknya ada tiga karakteristik yang dikenali sebagai basis utama kultur pesantren. *Pertama,*

---

[26]Abdurrahman Wahid, *Bunga RampaiPesantren* (t.t.:CV. Dharma Bhakti, t.t.), hlm. 21.

[27]Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial,* terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. xvii.

[28]Wahid, *Bunga Rampai Pesantren,* hlm.19-23.

[29]Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

pesantren sebagai lembaga tradisionalisme. Tradisionalisme dalam konteks pesantren harus dipahami sebagai sebagai upaya mencontoh tauladan yang dilakukan para ulama salaf yang masih murni dalam menjalankan ajaran Islam agar terhindar dari *bid'ah*, *khurafat*, *takhayul* dan klenik. *Kedua,* pesantren sebagai pertahanan budaya (*cultural resistance*). Mempertahankan budaya dengan ciri tetap bersandar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Ide *cultural resistance* telah mewarnai kehidupan intelektual dunia pesantren. *Ketiga,* pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pendidikan pesantren didasari, digerakkan dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran dasar ini berkelindan dengan struktur sosial atau realitas sosial yang digumuli dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan pesantren didasarkan atas dialog yang terus menerus antara kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini memiliki nilai kebenaran mutlak dan realitas sosial yang memiliki kebenaran relatif.[30]

Maka dari itu, sebagai lembaga Islam tradisional, kelahiran pondok pesantren tidak saja terbatas pada bidang pendidikan, melainkan sebagai lembaga sosial keagamaan. Kelahirannya berkaitan erat dengan kondisi lingkungan suatu komunitas tertentu, sehingga bentuk dan fasilitas yang dimiliki tidak jauh dari kondisi masyarakat tersebut. Perkembangan masing-masing pesantren di Indonesia memiliki akselerasi yang berbeda dan gejala ini dapat diketahui dari faktor sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat sekitar pondok pesantren.[31]

---

[30]Ibid., hlm.16-17.

[31]Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 140

Merujuk pada uraian di atas, kita dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik pendidikan pesantren berdasarkan sistem pendidikan yang dijalankan, yaitu dari segi materi pelajaran dan metode pengajaran, penjenjangan pendidikan, sarana dan tujuan pesantren.

Dari segi materi, pada dasarnya pesantren hanya mengajarkan ilmu dengan sumber kajian atau mata pelajaran kitab-kitab yang ditulis atau berbahasa Arab.[32] Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren pesantren adalah *wetonan*,[33] *sorogan*,[34] dan hafalan.[35]

---

[32]M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: LaksBang, 2006), hlm. 158.

[33]Metode *wetonan* adalah metode yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar secara kolektif. Lihat Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 26. Lihat juga Sudjoko Prasedjo, et.al, *Profil Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 53; Amir Hamzah, *Perubahan Pendidikan dan Pengajaran Islam* (Jakarta: Mulia Offset, 1989), hlm. 26; Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, hlm.14.

[34]Metode sorogan adalah metode yang santrinya cukup pandai me "sorog"kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca di hadapannya. Kesalahan dalam bacaannya itu langsung dibetulkan (dibenarkan) oleh kyai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar individual. Inti metode ini dapat membentuk tata nilai santri karena berlangsung dengan intensif, atau ada proses "*delivery culture*". Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bakti, 1982), hlm. 8.

[35]Metode hafalan berlangsung di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Materi hafalan biasanya dalam bentuk syair atau *nadham*. Sebagai pelengkap metode hafalan sangat efektif untuk memelihara daya ingat santri terhadap materi yang dipelajari, karena dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas.

Berkenaan dengan jenjang pendidikan, dalam pesantren tidak dibatasi seperti dalam lembaga-lembaga pendidikan yang memakai sistem klasikal. Umumnya, kenaikan tingkat santri didasarkan kepada isi mata pelajaran tertentu yang ditandai dengan tamat dan bergantinya kitab yang dipelajarinya. Apabila seorang santri telah menguasai suatu kitab yang telah diuji oleh kyainya, maka ia berpindah pada kitab lain yang lebih tinggi tingkatannya.[36]

Hal lain yang hingga kini masih dimiliki pesantren adalah penekanannya pada nilai-nilai yang dianutnya seperti kemandirian, kesederhanaan, dan keikhlasan. Nilai-nilai dasar ini dibingkai dengan paradigma yang sangat menekankan kepada apresiasi terhadap segala tradisi yang baik sekaligus akomodatif terhadap bentuk-bentuk reformasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai yang cukup kental di dunia pesantren ini pada prinsipnya merupakan nilai-nilai keagamaan otentik yang memiliki benang merah kuat dengan kesejarahan umat dan normativitas Islam hakiki.[37]

Dengan menyandarkan diri kepada Allah SWT, para kyai pesantren memulai pendidikan pesantrennya dengan modal niat ikhlas dakwah untuk menegakkan kalimat-Nya, didukung dengan prasarana sederhana dan terbatas. Keterbatasan sarana ini, ternyata tidak menyurutkan para kyai dan santri untuk melaksanakan program-program pesantren yang telah dicanangkan. Mereka seakan sepakat

---

[36]Sulthon, *Manajemen Pondok Pesantren,* 159. Sebagai konsekuensi dari cara penjenjangan di atas, pendidikan pesantren biasanya menyediakan beberapa cabang ilmu (*funūn al-'ilm*) atau bidang-bidang khusus yang merupakan fokus masing-masing pesantren untuk dapat menarik minat para santri menuntut ilmu di dalamnya.

[37]Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 19.

bahwa pesantrren adalah tempat untuk melatih diri (*riyādhah*) dengan penuh keprihatinan.[38]

Relevan dengan jiwa kesederhanaan di atas, tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, mandiri, bebas, dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan agama Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.[39] Sehingga dapat dikatakan bahwa keunggulan utama pada pendidikan pesantren adalah penanaman keimanan.[40]

B.Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaharuan pemikiran di kalangan umat Islam terutama pada awal abad ke-20 dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.[41]

Munculnya gerakan pembaharuan di Indonesia pada awal abad ke-20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks. Streenbrink mengidentifikasi empat faktor yang mendorong gerakan pembaharuan Islam di Indonesia awal abad ke-20, antara lain: 1) faktor keinginan untuk kembali al-Qur'an dan al-Hadith; 2) faktor semangat

---

[38]Ibid., hlm.159-160

[39]Ibid., hlm.160.

[40]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 203.

[41]Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 81-82.

nasionalisme dalam melawan penjajah; 3) faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan politik; dan 4) faktor pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa keempat faktor tersebut tidak secara terpadu mendorong gerakan pembaharuan, melainkan disebabkan oleh salah satu atau dua faktor tersebut. Dengan kata lain, menurut Steenbrink, gerakan pembaharuan tersebut memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda. [42]

Dalam batas yang cukup jauh, usaha pembaharuan itu dilakukan sejalan dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia dipengaruhi secara cukup kuat oleh tradisi madrasah di Timur Tengah masa modern. Namun demikian, dalam kenyataan politik di tanah air pada zaman pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem pendidikan persekolahan, agaknya cukup beralasan untuk berasumsi bahwa perkembangan madrasah di Indonesia juga merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu.[43]

---

[42]Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah,* hlm. 26-29.

[43]Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya,* hlm.92. Ada beberapa aturan yang mengikat bagi pembukaan sekolah atau pendidikan Islam pada khususnya. Pada tahun 1882, Belanda membentuka suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Dari aturan ini, orang Islam yang memberikan pengajaran agama Islam harus terlebih dahulu meminta ijin pemerintah Belanda. Demikian pula, kebijakan pemerintah Belanda dalam mengawasi madrasah adalah penerbitan Ordonansi Guru . Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak setiap orang, meskipun ahli agama, dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Selanjutnya lihat Ibid., hlm.115.

Perlu diketahui bahwa selama menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, pemerintah Belanda melarang pendidikan agama diajarkan di sekolah umum milik pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap *netral*.[44] Kebijakan yang demikian memunculkan reaksi umat Islam, yang dapat dikelompokkan ke dalam dua corak, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif ditunjukkan dengan cara menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat pada sistem pendidikan tradisional pesantren yang mengambil tempat di daerah-daerah pedalaman untuk menjauh/menghindar dari pengaruh dan pantauan Belanda. Dengan cara ini, pesantren di satu sisi memang berhasil menjauh dari intervensi Belanda, tapi di sisi lain pesantren menjadi terasing dari perkembangan

---

Lihat juga Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm. 121-122.

[44]Larangan ini termaktub dalam aturan yang tertuang dalam pasal 179 (2) Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*)—yang secara singkat dinyatakan bahwa pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah. Lihat Daulay, *Historisitas dan Eksistensi*, hlm.49. Dalam praktik, aturan tersebut tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Belanda lebih berpihak pada agama Kristen. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1988), hlm. 186-188, 333. Bandingkan dengan Zuhairini, et.al, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 148.

masyarakat sehingga agak terlambat melakukan pembaharuan.[45]

Corak responsi umat Islam juga bersifat progresif memandang bahwa tekanan pemerintah Hindia Belanda itu merupakan kebijakan diskriminatif. Usaha umat Islam diarahkan untuk mencapai kesetaraan dan kesejajaran, baik dari sudut kelembagaan ataupun kurikulum. Ketergantungan pada tekanan penjajah justru semakin akan melemahkan posisi umat Islam sendiri. Begitu pun sebaliknya, membiarkan sikap defensif terus menerus akan semakin memberikan ruang lapang bagi gerakan pendidikan Hindia Belanda. Untuk itu, diperlukan upaya mengembangkan lembaga pendidikan secara mandiri *ala* Belanda tetapi berbasis Islam, yakni tidak tercerabut dari akar keagamaannya. Dengan demikian, cara progresif ini dilakukan umat islam dengan cara "menolak sambil meniru". Reaksi progresif ini terutama dipelopori sejumlah ulama pembaharu, yaitu mereka yang mulai bersentuhan dengan gerakan pembaharuan yang telah menggema di Timur Tengah sejak awal abad ke 19. [46]

Wujud konkrit dari upaya ini adalah berdirinya sejumlah madrasah dan sekolah umum berciri khas Islam dengan beberapa corak, yaitu: *Pertama*, pendirian madrasah dengan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum (madrasah plus), sebagaimana dilakukan Madrasah

[45]Maksum, *Madrasah*, hlm.116-117. Mengomentari pendekatan *defensif* ini, Nurcholish Madjid mengatakan, "seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren itu tidaklah begitu jauh terpencil di daerah pedesaan seperti kebanyakan pesantren sekarang ini, melainkan akan berada di kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, atau sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana". Lihat Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, hlm.4.

[46]Maksum, *Madrasah*, hlm.106 . Lihat juga Azra, *Pendidikan Islam*, hlm.36-38.

Adabiyah Padang Panjang (1909). *Kedua*, pendirian sekolah umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama (sekolah plus), seperti yang ditawarkan Sekolah Adabiyah Padang (1915). *Ketiga*, pendirian madrasah dengan bidang kajian sepenuhnya agama (madrasah *diniyah*) yang dikelola secara modern, sebagaimana ditawarkan Madrasah Sumatera Thawalib (1919). Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara massif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air.[47]

---

[47]Mohammad Kosim, "Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)" dalam *Tadris Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Vol. 2 No.1, 2007), hlm. 45. Termasuk dalam bentuk ini adalah usaha yang dilakukan oleh Pesantren Manbaul Ulum Surakarta (1906) yang tetap mempunyai basis pada pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu Islam serta memasukkan pelajaran membaca ke dalam kurikulumnya. Rintisan Pesantren Manbaul Ulum diikuti oleh beberapa pesantren lainnya seperti Pesantren Tebu Ireng (1916) yang mendirikan "madrasah salafiyah" yang tidak hanya mengadopsi sistem pendidikan modern, tetapi juga mengajarkan berhitung, bahasa Melayu, ilmu bumi, dan menulis huruf latin. Model tersebut diadopsi oleh Pesantren Rejoso Jombang yang mendirikan madrasah pada tahun 1927. Respon yang sama tetapi dalam nuansa yang sedikit berbeda terlihat dalam pengalaman Pondok Pesantren Modern Gontor yang berdiri tahun 1926. Berpijak pada basis sistem dan kelembagaan pesantren, Pondok Modern Gontor memasukkan sejumlah mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya, mendorong santrinya mempelajari bahasa Inggris selain bahasa Arab dan melaksanakan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, dan sebagainya. Organisasi-organisasi Islam lain yang bergerak di bidang pendidikan mendirikan madrasah dan sekolah dengan nama, jenis dan jenjang bermacam-macam. Matlaul Anwar di Menes, banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Diniyah. PUI pada tahun 1927 mendirikan Madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan Madrasah Pertanian. Perti tahun 1928 mendirikan madrasah dengan berbagai nama, di antaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, dan Uliyah Syari'ah. Sejak berdiri tahun 1926, NU juga mendirikan Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya. Sementara di Tapanuli Medan, Al-

Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap madrasah terus berlanjut. BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam maklumatnya tertanggal 22 Desember 1945 di antaranya menganjurkan: "dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya dianjurkan pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan". Sebagai tindak lanjut dari maklumat tersebut, pada tanggal 27 Desember 1945 BP KNIP merekomendasikan agar kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang intinya agar madrasah dan pesantren mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah, karena madrasah dan pesantren-pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya.[48]

Perhatian pemerintah RI terhadap madrasah dan pesantren semakin terbukti ketika pemerintah – atas usul BP KNIP – membentuk Kementerian Agama melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD/1946, tanggal 3 Januari 1946. Sejak terbentuknya kementerian ini, segera dilakukan upaya-upaya lebih serius untuk memantapkan keberadaan

---

Wasliyah (1930) menyelenggarakan Madrasah Tajhiziyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul 'Ali, dan Tahassus. Di samping itu, ada madrasah yang menggunakan nama formal Islam (Kuliyah Muallimin Islamiyah) didirikan Mahmud Yunus di Padang 1913 dan *Islamic College* didirikan Pesantren Muslim Indonesia (Permi) tahun 1931. Lihat Supiana, *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung, dan Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 39-40.

[48]Ary H.Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 32-33.

pendidikan Islam, temasuk madrasah. [49] Kementerian agama ini dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, kementerian ini menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus di kalangan pengambil kebijakan.

Salah satu gambaran dari perkembangan madrasah yang cukup menonjol adalah pendirian Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Pendirian kedua madrasah ini dimaksudkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah.[50]

Melalui sejumlah kebijakan, beberapa modifikasi terhadap madrasah dilakukan meskipun menghadapi kendala dan tantangan yang tidak ringan. Sesuai dengan maksud Undang-undang, pada tahun 1958, Kementerian

---

[49]Langkah pertama Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberikan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya operasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dalam peraturan tersebut dijelaskan agar madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang digelar. Pengetahuan umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung (untuk tingkat dasar). Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam (untuk tingkat lanjutan). Ketentuan tersebut juga mengatur penjenjangan madrasah yang meliputi: (a) Madrasah Tingkat Rendah, dengan lama belajar sekurang-kurangnya 4 tahun, dan siswa dibatasi pada usia 6 sampai 15 tahun; dan (b) Madrasah Lanjutan, dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tamat Madrasah Tingkat Rendah, siswa berumur 11 tahun ke atas. Lihat Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam*, 53-54.

[50]Maksum, *Madrasah,* 124.

Agama mengusahakan pengembangan madrasah dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan lama belajar 8 tahun. MWB dimaksudkan sebagai usaha awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah dalam rangka penyeragaman kurikulum dan sistem penyelenggaraan dengan madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat.[51] Model MWB ini dapat dipandang sebagai salah satu tonggak perkembangan dan pembaharuan madrasah di Indonesia yang merupakan kontribusi pemerintah Orde Lama.[52]

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan dalam beberapa hal mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan sebelumnya. Pada tahap ini, madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah. Menghadapi kenyataan ini, maka langkah pertama dalam pembaharuan pendidikan madrasah adalah melakukan

---

[51]Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 195.

[52]Samsul Nizar dan Muhammad Syaifudin, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 40. MWB diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa untuk kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi. Materi pelajaran meliputi : pendidikan agama, umum, dan keterampilan untuk mendukung kesiapan anak untuk berproduksi atau bertransmigrasi dengan swadaya. Kurikulum MWB merupakan gabungan dari tiga perkembangan; akal, hati nurani, dan keterampilan. Dengan komposisi mata pelajaran; 25% mata pelajaran agama dan 75% mata pelajaran umum dan keterampilan. Lihat Daulay, *Historisitas dan Eksistensi*, hlm.76.

formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi dilakukan dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur pemerintah, di samping mendirikan madrasah-madrasah negeri yang baru. Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahap berikutnya, antara akhir tahun 1970-an sampai dengan akhir tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Usaha menuju ke arah ini agaknya tidak sederhana karena secara konstitusional pendidikan nasional masih diatur oleh UU No.4 Tahun 1950 jo.No.12 Tahun 1954 yang mengabaikan pendidikan madrasah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada tahap ini adalah memperkuat struktur madrasah – baik dalam jenjang maupun kurikulumnya – sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan ini dikeluarkan kebijakan berupa Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.[53]

[53]Bunyi SKB tersebut antara lain: 1) Madrasah meliputi tiga tingkatan : Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar; Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama; dan Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (Bab I pasal 1 ayat 2); 2) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas; Siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat (Bab II pasal 2); 3) Pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama; Pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah

Memasuki dekade 90-an, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai madrasah secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Untuk tujuan ini pemerintah mengeluarkan Undang-undang Sisdiknas Nomor 2/1989 yang mengubah secara signifikan posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah tidak lagi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, melainkan menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam. Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.[54]

Demikian pula kehadiran Undang-undang Sisdiknas Nomor 20/2003 yang semakin memperkuat posisi madrasah sebagaimana telah dirintis dalam Undang-undang sebelumnya. Salah satu indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya.[55]*

---

dilakukan oleh Menteri Agama; Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Bab IV pasal 4). Lihat Ibid., hlm.150-151.

[54]Ibid., hlm.132-133.

[55] Kosim, "Madrasah di Indonesia", hlm.56.

5
PTAI SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN MORAL

A. Budaya Hidup Konsumerisme

Perkembangan masyarakat Indonesia sudah memasuki masyarakat global atau juga disebut masyarakat informasi[1] yang satu sama lainnya dihubungkan dengan berbagai jenis sistem komunikasi mutakhir.[2] Perkembangan ini merupakan kelanjutan dari masyarakat modern dengan ciri-cirinya yang bersifat rasional, berorientasi ke masa depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif.[3] Sebagai konsekuensinya, budaya baru global telah berkembang dan

---

[1]Masyarakat informasi ditinjau oleh penguasaan terhadap teknologi informasi, mampu bersaing, serba ingin tahu, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan menguasai berbagai metode dalam memecahkan masalah. Lihat Jalaluddin Rahmat, "Islam Menyongsong Peradaban Dunia Ketiga" dalam *Ulumul Qur'an* (Vol.2,1989), hlm. 46. Lihat juga Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.77.

[2]Amer al-Rouba'ie, "Globalisasi dan Posisi Peradaban Islam" dalam *Islamia* (No.4/Januari-Maret 2005), hlm.11.

[3]Deliar Noer, *Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Mutiara,1987), hlm.24.

didominasi sebagian besar oleh ciri-ciri modernisasi, gaya hidup konsumerisme yang merupakan ciri-ciri budaya Barat. Dalam situasi yang demikian, intensitas hubungan meningkat secara lebih meluas ke berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, ideologi, agama, bahasa, ilmu pengetahuan, lingkungan dan teknologi.[4]

Pada masyarakat informasi, peranan media elektronika sangat memegang peranan penting dan bahkan menentukan corak kehidupan. Peranan media elektronika yang demikian besar akan menggeser agen-agen sosialisasi manusia yang berlangsung secara tradisional seperti yang dilakukan oleh orang tua, guru, pemerintah dan sebagainya. Media elektronik global telah meminamilisir perlindungan terhadap budaya lokal melalui proses liberalisasi (swastanisasi) pasar dan perdagangan luas. Distribusi luas produk budaya Barat seperti film, literatur, gaya hidup, nilai-nilai baru melalui media elektronik, siaran satelit, internet, koran-koran dan majalah telah mencemari budaya lokal.[5] Kemajuan dalam bidang informasi ini, pada akhirnya akan berpengaruh pada kejiwaan, kepribadian dan moral masyarakat.[6]

Implikasi lebih jauh adalah munculnya gaya hidup (*life style*) yang cenderung bersikap sekuler, materialistik, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang cerdas intelektualitasnya dan terampil fisiknya, namun kurang terbina mental spiritualnya dan kurang memiliki kecerdasan

---

[4]al-Rouba'ie, "Globalisasi dan Posisi Peradaban Islam", hlm.11. Bandingkan dengan Hasan Langgulung, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2002), hlm.17.

[5]Ibid, hlm.15.

[6]Nata, *Manajemen Pendidikan,* hlm. 78.

emosional.[7] Orientasi hidup tersebut menjadi karakter masyarakat modern yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan.[8] Akibat dari yang demikian, banyak sekali para remaja yang terlibat dalam tawuran, tindakan kriminal, pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan dan sebagainya.[9]

Dalam konteks tersebut, di bidang pendidikan Islam dibutuhkan sebuah pendidikan unggulan dalam menyikapi arus perkembangan zaman tersebut. Menyikapi hal itu, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai lembaga pendidikan lanjutan dari jenjang pendidikan Islam-madrasah dan pesantren perlu mewujudkan cita-cita itu. Karena PTAI merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki ciri khas keislaman, yang membedakannya dengan perguruan tinggi umum lain.[10] Ciri keislamannya tidak

---

[7]Perhatian masyarakat tentang perlunya kecerdasan emosional yang mengimbangi kecerdasan intelektual akhir-akhir ini tampak meningkat, mengingat telah banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran IQ dalam meraih prestasi keberhasilan kerja hanya menempati posisi kedua setelah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kecakapan mengelola perasaan sedemikian rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif yang memungkinkan orang bekerja sama dengan lancar menuju sasaran bersama. Di dalam kecerdasan emosional tercakup kemampuan melakukan sambung rasa, empati dan komunikasi yang terbuka. Lihat Daniel Goleman, *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm.9.

[8]Kazou Shimogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme; Telaah Kritis ata Pemikiran Hasan Hanaffi,* ter. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm.25. Lihat juga Akbar S. Ahmed, *Postmodernism and Islam* (New York: Routledge,1992), hlm.6.

[9]Nata, *Manajemen Pendidikan,* hlm. 231. Lihat juga Mudzaffar Akhwan, "Pendidikan Moral Keagamaan Anak dalam Masyarakat, Mempertegas Fenomena Pesantren Kilat dalam Pendidikan Islam", dalam *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial,* ed. Muslih Usa dan Aden Wijdan AZ (Yogyakarta: Aditya Media,1997), hlm.71.

[10]Watak, corak, dan budaya akademik di kalangan Perguruan Tinggi Umum (PTU) ternyata berbeda dengan Perguruan Tinggi Agama Islam

hanya menjadikan Islam sebagai obyek kajian ilmiah, melainkan lebih dari itu, diharapkan suasana kampus PTAI dan para civitas akademikanya juga mencerminkan kualitas akhlak dan perilaku Islami.[11]

B. Gaya Hidup Global ; Refleksi Pergeseran Nilai

Bagi masyarakat modern yang hidup di era global[12] dan era keterbukaan dengan ciri rasionalitasnya tentu aspek moralitas agama dan spiritual sedikit tergeser. Karena manusia telah merasa mampu untuk berbuat atau tidak

---

(PTAI). PTU mengasuh berbagai ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu kesehatan, teknik pertanian dan ekonomi. Ilmu-ilmu ini syarat dengan nilai-nilai ekonomi dan keteknoratisan dalam menjawab dan memecahkan berbagai masalah kehidupan, dan umumnya bernuansa duniawi. Sedangkan PTAI lebih banyak mengasuh ilmu-ilmu agama sebagaimana tercermin dalam program/fakultas/jurusan yang dikembangkan (seperti Ushuluddin, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Adab). Semuanya sarat dengan nilai-nilai imtaq, lebih kuat dengan nuansa *ukhrawi*. Corak ilmu-ilmu yang dikembangan PTAI memiliki misi dakwah Islamiyah, menegakkan kebenaran, meniadakan kemungkaran, dan kebatilan. Para civitas akademikanya terpanggil untuk mengamalkan ilmu sebagai panggilan agama. Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.51-52.

[11]Said Aqil Husien al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press,2003), hlm. 58.

[12]Gaya hidup global dipastikan akan berbenturan dengan gaya hidup yang masih terikat dengan sekat kultural domestik yang secara tradisional dihayati oleh negara miskin di dunia. Sehingga paling tidak ada tiga karakteristik masyarakat global, yaitu: *pertama,* gaya hidup global kurang memperdulikan nilai-nilai spiritual dan aspek agama, karena pengakuan secara sepihak atas suatu agama dikhawatirkan akan mengaburkan konsep budaya global. *Kedua,* selalu memandang sesuatu dengan kaca mata kolektivitas dan universalitas, sehingga tidak terbelenggu oleh salah satu konsep budaya, tetapi justru berada di atas nilai budaya yang beragam. *Ketiga,* penekanan gaya hidup global terletak pada pandangan materialistis empiris. Karena nilai-nilai empiris akan lebih menjanjikan untuk terbangunnya semangat toleransi budaya ketimbang hal-hal yang transenden.

berbuat untuk dirinya sendiri. Sejumlah nilai yang semula dijunjung tinggi masyarakat kemudian diabaikan dan kurang diperhatikan. Dampaknya sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai-nilai yang mengajarkan penghormatan pada para pemimpin, ulama, tokoh masyarakat, cendikiawan, pendidik dan orang tua tidak lagi dianut dan diamalkan secara konsisten.[13] Peran nilai agama mulai berada pada posisi marginal.[14] Akibat selanjutnya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berdimensi spiritual akan terdegradasi oleh proses teknologi, yang merupakan hasil rekayasa dan kemampuan rasio. Padahal kekayaan nilai-nilai dasar (*fundamental values*) secara normatif dipandang akan dapat memberikan kepastian hidup di masa yang akan datang. Bahkan tata nilai dapat dijadikan acuan sebagai posisi jatuh dan bangun peradaban. Artinya, di suatu masa manusia akan tegar bangun dan berdiri pada kehidupan yang bertata nilai, dan di lain waktu jatuh terkapar dalam keadaan meninggalkan tata nilai dan mengabaikan aspek spiritualitas.[15]

Kejatuhan manusia dari kehidupan bertata nilai spiritual menuju kehidupan materialis adalah akibat munculnya humanisme, yakni paham yang menfigurkan manusia

---

[13] Ibid, hlm.45.

[14]Agama masih berada pada posisi *periferal*, pinggiran atau bahkan tidak diperdulikan sama sekali oleh kosmos peradaban modern. Agama sebagai superstruktur ideologis dalam sistem devolusi modernisasi tidak lagi berfungsi memberikan kerangka konseptualisasi kehidupan dalam struktur sosial dan infrastruktur material, tetapi hanya dipandang sebagai salah satu komponen yang tersubordinasi. Pemahaman dan persepsi terhadap agama dapat ditelaah pada misalnya, Moh. Nurhakim, *Islam, Doktrin, Pemikiran dan Realitas Historis* (Malang: UMM Press,1998), hlm.265.

[15]Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam, Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan Moralitas* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama,2004), hlm. 177.

sebagai titik sentral kosmos yang bergerak ke arah pengukuran manusia sebagai manusia super. Maka akibatnya akan muncul suatu generasi yang hanya mengandalkan budi daya untuk merumuskan prinsip-prinsip kehidupan yang semu, karena paradigma dan epistemologi yang dipakainya kering dari nuansa tata nilai spiritual.[16] Manusia semakin membanggakan diri dengan kemampuan teknologi empiris tanpa memperdulikan aspek mental spiritual dan nilai moral. Dengan kebudayaan global, manusia akan melangkah menuju tata nilai humanistik yang merasa bahwa dirinya lebih mampu tanpa bantuan dari hakikat yang transendental.[17] Kehidupan manusia betul-betul telah keluar dari orbit ketuhanan. Fenomena yang nampak setidaknya menunjukkan pengingkaran atas-Nya dalam perilaku, walaupun pengakuan terhadap Tuhan masih ada dalam bentuk verbal sebagai tradisi.[18] Pengingkaran atas eksistensi Tuhan dalam bentuk penolakan agama dan doktrinnya hanya akan melahirkan sebuah peradaban yang tidak bermoral.[19]

Demikian halnya dalam aspek pendidikan yang telah lama diperkenalkan dengan peradaban sekuler yang memberikan tekanan pada pembinaan pribadi demokratik dengan dasar *anthropocentric* murni. Asas *theocentric*, masalah-masalah spiritual manusia, hubungan yang ada antara realisasi spiritual dan esensi nilai-nilai moral, dan hubungan-hubungan yang integral antara nilai-nilai moral

---

[16]Ahmad Muflih Saefuddin,"Tata Nilai dan Kehidupan Spiritual Abad 21" dalam *Permasalahan Abad 21: Sebuah Agenda,* ed. Said Tuhuleley (Yogyakarta: SI Press,1993), hlm. 4-5.

[17]Jamali, "Kaum Santri dan Tantangan Kontemporer" dalam *Pesantren Masa Depan*, ed. Marzuki Wahid, et.al. (Bandung: Pustaka Hidayah,1999), hlm. 143.

[18]Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam,* hlm. 178.

[19]Ibid, hlm. 176.

dan tindakan manusia, semuanya terkucil dari persoalan pendidikan untuk kemudian menjadi persoalan yang sangat bersifat pribadi.[20]

Gejala *split personality* atau kepribadian ganda[21] pun dipahami sebagai konsekuensi logis dari semakin jauhnya pembangunan intelektual dari arahan, binaan serta kontrol nilai moral dan spiritual. Betapa kita terpaksa harus mengerutkan dahi ketika menyaksikan kasus-kasus penyimpangan dan dekadensi moral yang dilakukan generasi muslim, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, minuman keras dan seterusnya yang merupakan tampilan sebuah krisis agama sebagai problem yang dihadapi dalam kebudayaan.[22]

Munculnya perilaku bebas tanpa kontrol moral merupakan bukti adanya kelompok yang mengingkari fungsi nilai. Sehingga pada pemahaman selanjutnya, mereka akan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan, pendidikan, seni dan kreativitas adalah bebas nilai (*value free*).[23] Untuk itu mereka membiarkan hidup berjalan sesuai dengan kehendak

---

[20]Munzir Hitami, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam* (Pekanbaru: Infinite Press,2004), hlm. 3.

[21]A. Malik Fajar, et.al. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Logos, 2001), 33.

[22] Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam,* hlm. 169.

[23]Dengan demikian, peran pendidikan yang dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah budaya menempatkan posisinya yang strategis dan menentukan. Artinya, apabila pendidikan dengan dimensi ilmu yang melekat padanya telah dipisahkan dari konteks nilai, maka penampakan budaya yang akan muncul adalah kebudayaan yang bebas nilai. Padahal ilmu pengetahuan yang dikembangkan-- melalui proses pendidikan--adalah bertujuan untuk mewujudkan ideal-ideal masyarakat itu sendiri. Sehingga pada batasan ini agaknya amat sulit untuk menerima pandangan bahwa ilmu itu bebas nilai. Bahwa ketinggian derajat dan marwah masyarakat Islam di masa kejayaannya adalah karena ketinggian nilai rohaniah dan akhlak dalam pergaulan hidup.

naluriah kemanusiaan yang berupa naluri hewaniah (*animal instink*).[24]

Persoalannya sekarang adalah apakah betul ilmu pengetahuan, seni, pendidikan dan kreativitas itu bebas nilai. Apakah suatu pemahaman yang obyektif, jika menganggap hidup tidak memerlukan nilai etika keagamaan. Menjawab serangkaian pertanyaan itu tentu membutuhkan perenungan yang mendalam, perenungan filosofis. Sebab ia akan berdampak pada pergaulan sosial. Artinya, kesalahan pada memahami bebas atau tidaknya suatu nilai dalam kehidupan akan mengakibatkan terbentuknya suatu pola perilaku masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari pemahaman mengenai urgensitas sebuah nilai.

C. Nilai Strategis Pendidikan Agama

Perubahan yang berkembang secara global telah mempengaruhi dimensi religiusitas, nampaknya telah menjadi kesadaran bersama. Namun sepenuhnya mengatakan, bahwa yang akan menjadi *main stream* dalam proses perubahan secara keseluruhan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak benar secara mutlak, kecuali perlu disikapi dengan penuh ekstra hati-hati.

Bagaimana pun, agama mempunyai kedudukan fundamental dan eksistensial dalam kehidupan manusia. Kecuali itu, disadari sekarang bahwa kemajuan manusia yang semata-mata bertitik tumpu pada signifikansi di bidang keilmuan, selamanya tidak akan memberikan pemuasan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, akibat tidak adanya sikap secara etis dan kritis dalam pengembangan budaya telah mendatangkan implikasi kemanusiaan yang

[24] Ibid, 176-177.

secara negatif akan mempengaruhi masa depan umat manusia.[25]

Setelah menyadari beberapa ekses negatif perubahan, muncul kesadaran baru untuk kembali kepada nilai-nilai agama. Kesadaran semacam itu dapat dibaca pada tema-tema pembicaraan dewasa ini seperti perlunya respiritualisasi dan revivalitisasi peran agama. Kesemuanya merefleksikan adanya suatu keinginan untuk menampilkan kembali agama, tidak saja dalam bentuknya sebagai bagian dari sistem nilai seperti dalam pengertian budaya, tetapi kedudukan dalam sifatnya yang paradigmatis dalam kehidupan manusia.[26]

Dalam kedudukannya sebagai bagian dari sistem nilai, agama akan mengalami relatifitisasi sebagaimana nilai-nilai lainnya yang dihasilkan melalui refleksi filosofis manusia. Semestinya, agama secara epistemologis membingkai seluruh nilai-nilai lainnya. Dalam konteks perubahan, agama tidak cukup hanya ditempatkan dalam pengertian di atas. Karena itu, agenda pemikiran penting sekarang dalam rangka revitalisasi nilai-nilai agama, adalah merekontruksi peran agama. Dengan cara demikian, agama akan dapat memberikan bingkai etik dan moral dalam proses perubahan.[27]

Dalam studi sosiologis terdapat dua peran agama yang sangat signifikan dikembangkan. *Pertama,* peran sebagai *directive system,* yaitu agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan. Dengan demikian, agama akan dapat berfungsi sebagai *supreme morality* yang memberikan landasan dan kekuatan elit-spiritual masya-

---

[25] Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan* (Yogyakarta: SI Press,1994), hlm. 121.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

rakat ketika mereka berdialektika dalam proses perubahan. Dengan pemaknaan semacam ini, agama tidak lagi dipandang sebagai penghambat perubahan seperti dalam filsafat materialisme.[28] Berdasarkan upaya tersebut, agama menjadi daya dorong luar biasa bagi terciptanya perubahan ke arah coraknya yang konstruktif dan humanistik bagi masa depan umat manusia.[29]

Kedua, peran sebagai *defensive system,* agama menjadi semacam kekuatan resistensial bagi masyarakat ketika berada dalam lingkaran persoalan kehidupan yang semakin kompleks di tengah derasnya arus perubahan. Dalam konteks demikian, masyarakat akan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan diri dan tidak ada rasa kekhawatiran serta keraguan dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Di sinilah sesungguhnya peran penting kecerdasan akal manusia dalam mengkontekstualisasikan ajaran agama. Suatu usaha yang didukung oleh infrastruktur pendidikan yang kondusif dalam rangka pemberdayaan agama tersebut. Secara makro, pendidikan agama mempunyai makna strategis sebagai institusi agama yang dapat menjalankan fungsi pokoknya mensosialisasikan dan mentransformasi-kan nilai-nilai keagamaan dalam konteks dialektika kehidupan ini.[30]

---

[28] Pembahaan lebih lanjut lihat Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung : Mizan,1999).

[29] Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya*, hlm. 122.

[30]Ibid, 123. Dalam konteks ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengimbangi dampak global adalah dengan membangkitkan kesadaran umat Islam ke jalan Tuhan. Karena keterlenaan umat terhadap pemandangan modern yang menggiurkan akan menyebabkan tidak tersosialisasinya nilai-nilai Islam. Hal lain yang harus dilakukan umat Islam adalah mengurangi sifat fanatisme terhadap globalisasi dan semua yang berbau Barat, karena sifat fanatisme yang demikian hanya akan menimbulkan hasrat untuk mengadopsinya sebagai upaya internal secara

D. Peran PTAI

Menyadari nilai strategis tersebut, maka pendidikan agama perlu memberikan pengayaan nuansa-nuansa keagamaan. Suatu upaya pengayaan yang menyentuh aspek formal agama maupun dimensi etik, moral,[31] dan spiritual agama. Dengan pengayaan demikian, pendidikan agama tidak hanya sebagai lembaga yang hanya dapat mempertahankan kemapanan dogmatika agama.

Dalam konteks tersebut PTAI seyogianya dapat merespon perkembangan yang terjadi dan menjadikan lembaga panutan dan sumber lahirnya SDM yang menjunjung moral ke depan. PTAI tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa yang berciri khas keagamaan, lebih dari itu, PTAI juga

---

membabi buta. Lihat Ali Syari'ati, *Membangun Masa Depan Islam,* ter. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 29.

[31]Moral didefinisikan sebagai kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat, yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut. Tindakan tersebut haruslah mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan atau keinginan pribadi. Lihat Zakiah Drajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung,1978), hlm. 63. Dalam perspektif Islam, moral sering merupakan terjemahan dari kata akhlak. Pembahasan tentang akhlak secara lebih luas lihat misalnya, Murtadha Muthahhari, *Falsafah Akhlak* (Bandung: Pustaka Hidayah,1995), hlm. 30-32; Ibn Maskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq* (Kairo: Dar al-Kutub, t.t.), hlm. 143; Abuddin Nata, *Akhlak/Tasawuf* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1994), hlm. 32. Sehingga penggunaan "moral" dan "akhlak" acapkali dipergunakan untuk menunjukkan suatu perilaku, baik atau buruk, sopan santun, kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan norma kehidupan. Tetapi istilah ini umumnya dipergunakan untuk menggambarkan kepribadian yang utuh, termasuk disiplin, bertanggung jawab, etos kerja, amanah, pegang janji, kearifan dan kemandirian. Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam,* hlm. 135.

dituntut memainkan peran sebagai basis pembangunan moral bangsa di tengah masyarakat global.[32]

Melihat fenomina sejumlah PTAI yang berupaya mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum serta kedudukannya yang semakin kuat dalam sistem pendidikan nasional, maka sekurang-kurangnya PTAI dapat memainkan peran sebagai berikut: [33]

Pertama, media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bercirikan keagamaan, melalui sifat dan bentuk pendidikan yang dimilikinya, PTAI mempunyai peluang besar untuk berfungsi sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama kepada masyarakat secara lebih efektif karena diberikan dengan sistem pembahasan yang mendalam dan pengkajian yang serius serta penelitian-penelitian mahasiswa di berbagai lembaga pendidikan dan daerah. Sifat keagamaan yang melekat pada kelembagaan PTAI menjadikannya mempunyai mandat yang kuat untuk melakukan peran tersebut.

Kedua, maintenance of Islamic tradition (pemeliharaan tradisi keagamaan). Pemeliharaan tradisi keagamaan ini dilakukan di samping secara formal melalui pengajaran ilmu-ilmu agama[34] seperti al-Qur'an, hadits, aqidah, filsafat,

---

[32] Husien al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani*, hlm. 252.

[33] Ibid, hlm. 254-257. Bandingkan dengan Nata, *Manajemen Pendidikan,* hlm.223-225. Lihat juga Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), hlm.32-34.

[34] Untuk itu, dasar-dasar pendidikan Islam, secara prinsip diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an misalnya memberikan prinsip yang sangat penting bagi pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia serta memelihara kebutuhan sosial. Lihat Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: al-

fiqh, ushul fiqh, politik Islam dan lain sebagainya, juga dilakukan secara informal melalui pembiasaan berorganisasi, aktif di berbagai kegiatan sosial masyarakat. Peran ini belakangan sedang mendapatkan tantangan dari perkembangan kehidupan yang semakin materialistik dan individualistik sebagai dampak dari perkembangan global.

Quraisy Shihab mensinyalir, bahwa untuk mempertahankan nilai-nilai moral Islam adalah dengan memahami dan menghayati nilai-nilai dalam al-Qur'an secara komprehensif. Karena menurutnya perubahan dengan orientasi yang mengacu pada tatanan nilai islami hanya dapat dilakukan melalui penghayatan terhadap nilai-nilai al-Qur'an.[35]

Ketiga, membentuk akhlak dan kepribadian. Kepribadian diidentifikasikan dengan perwujudan lahiriah, watak atau peranan yang diperankan dalam sebuah kehidupan; sifat-sifat khusus yang dimiliki seseorang. Pemaknaan kepribadian yang ilmiah adalah integrasi dari seluruh sifat seseorang, baik sifat yang dipelajari ataupun sifat yang diwarisi yang menyebabkan kesan yang khas dan unik pada orang lain. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri atas sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian dirinya yang khas terhadap lingkungan. Dengan demikian, kepribadian ini dapat

---

Ma'arif, 1980), hlm. 196-206. Dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dan Sunnah atas prinsip mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan bagi manusia. Dengan dasar ini, maka pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka sosiologis, selain menjadi transmisi pewarisan kekayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia. Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 9.

[35] Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 245.

diinternalisasi perguruan tinggi Islam dalam rangka pengembangan moralitas bagi masyarakat.

Keempat, benteng moralitas bangsa. PTAI diharapkan dapat menjadi basis moralitas dan benteng penting bagi bangsa dalam menghadapi berbagai krisis yang dihadapi bangsa. Dengan pemahaman religius manusia dapat menyadari secara signifikan terhadap masalah yang dihadapi. Pendidikan moral dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik.

Kelima, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus dirubah dari pengajaran agama kepada pendidikan agama. Pengajaran agama dapat berarti *transfer of religion knowledge,* mengalihkan pengetahuan agama atau mengisi mahasiswa dengan pengetahuan tentang agama, sedang pendidikan agama dapat berarti membina dan mewujudkan perilaku mahasiswa sesuai dengan tuntutan agama serta membiasakan mahasiswa berbuat baik dan santun dalam berbagai perilaku.

Keenam, pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan yang *integrated*, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Pendidikan moral bukan hanya terdapat dalam pendidikan agama saja, melainkan juga terdapat pada pelajaran logika, bahasa, evaluasi, biologi, ilmu eksak dan sebagainya.

Ketujuh, sejalan dengan cara yang keenam di atas, pendidikan moral harus melibatkan seluruh dosen. Pendidikan moral bukan hanya menjadi tanggung jawab dosen agama seperti yang selama ini ditekankan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh dosen dan komponen pendidikan tinggi Islam.

Kedelapan, pendidikan moral harus didukung oleh oleh kemauan, kerja sama yang kompak dan usaha-usaha yang

sungguh-sungguh dari keluarga, sekolah dan masyarakat (*stakeholders*). Orang tua di rumah harus meningkatkan perhatian kepada anak-anaknya, dengan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, teladan, dan pembiasaan yang baik.[36] Orang tua harus berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang dan tentram. Perguruan tinggi juga harus berupaya menciptakan lingkungan yang bernuansa religius, seperti membiasakan shalat berjamaah, menegakkan disiplin, ketertiban, kejujuran dan tolong menolong, sehingga nilai-nilai agama menjadi kebiasaan, tradisi atau budaya seluruh civitas akademika. Sementara masyarakat juga harus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akhlak, seperti membiasakan shalat berjamaah, gotong royong, kerja bakti dan lain-lain.[37]

---

[36] Karena ternyata, menurut Abdullah Nashih Ulwan, penyimpangan moral anak lebih sering diakibatkan kelalaian orang tua di rumah dalam mengontrol pergaulan pendidikan anak di rumah tangga. Kelalaian itu berupa membiarkan anak bergaul dengan teman yang berperilaku buruk, memperkenankan anak menonton film yang bernuansa porno, menyediakan fasilitas bagi anak sehingga memudahkan mereka mendapatkan program acara telivisi yang bisa merusak mental dan memperngaruhi tingkah laku mereka terhadap literatur dan bacaan anak seperti majalah dan cara berbusana, sehingga anak termotivasi untuk bersikap seperti apa yang mereka baca dan mereka lihat. Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam,* ter. Saifullah dan Hery Noer Aly (Bandung: al-Syifa, t.t.), hlm. 212-213.

[37] Menurut Jalaluddin, upaya pembentukan realsi sosial memuat penerapan nilai-nilai moral dan akhlak dalam pergaulan masyarakat dapat melalui langkah-langkah berikut: *pertama,* melatih diri untuk tidak berbuat tercela, misalnya menipu, rentenir dan menyakiti sesama anggota masyarakat. *Kedua,* memperkokoh hubungan kerja sama dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan yang mengarah pada pembelaan terhadap kejahatan, seperti bersaksi palsu, mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat. *Ketiga,* menggalakkan perbuatan terhormat seperti suka memafkan kesalahan oprang lain, bersikap simpati terhadap orang miskin, dan sebagainya. *Keempat,* selalu membina hubungan menurut tata

Kesembilan, pendidikan moral harus menggunakan seluruh kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern. Kesempatan berekspresi, pameran, karyawisata dan lain sebagainya harus digunakan sebagai peluang untuk membina moral.

E. Wawasan Akademik yang Lebih Islami

Aspirasi umat Islam dalam pembentukan perguruan tinggi Islam secara umum didorong oleh setidaknya tiga tujuan: *pertama,* untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah. *Kedua,* untuk melakukan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam sehingga Islam dipahami dan dilaksanakan secara lebih baik oleh mahasiswa dan kaum muslimin pada umumnya. *Ketiga,* untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan lainnya, baik pada birokrasi negara maupun lembaga-lembaga sosial, dakwah dan pendidikan Islam swasta.[38]

Konsekuensi dari aspirasi, yang disebut ekspektasi sosial dan ekspektasi akademis, maka perguruan tinggi Islam memikul peran ganda; akademis dan sekaligus dakwah.[39] Peran ganda ini dalam praktiknya tidak selalu selaras, kalau tidak dapat dikatakan bahkan tak jarang mengalami semacam konflik. Sebagaimana perguruan tinggi lainnya, PTAI diharapkan untuk menjadi lembaga akademis, dengan melakukan pengajaran, pendidikan dan pengkajian-

terti, seperti berlaku sopan, menebar salam, dan seterusnya. Lihat Jalaluddin dan Usman said, *Filsafat Pendidikan Islam : Konsep dan Perkembangan Pemikirannya* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 102.

[38] Lihat Azra, *Pendidikan Islam,* hlm. 170.

[39] Pemahaman tentang peran dakwah dapat ditelusuri pada Fuad Jabali dan Jamhari (ed.), *IAIN dan Modernisasi di Indonesia* (Jakarta: Logos,2002), hlm. xiv-xv.

pengkajian dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya agama, sesuai dengan prinsip-prinsip akademis, ilmiah dan obyektif.[40]

Pada pihak lain, *expected role* yang dipikulkan umat Islam kepada PTAI sebagai lembaga dakwah mengakibatkan PTAI dituntut melakukan kajian-kajian agama tidak hanya untuk kepentingan akademis-ilmiah, tetapi lebih penting lagi untuk kepentingan dakwah Islam. Termasuk dalam kepentingan dakwah ini adalah, misalnya, "meluruskan" keimanan dan praktik keagamaan mahasiswa (dan umat Islam umumnya), memperteguh keimanan, menjaga mereka agar tidak "menyimpang". [41]

Karena itu, untuk memenuhi dua ekspektasi tersebut, PTAI dituntut untuk mewujudkan dinamika akademik yang lebih islami sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Syarat wawasan akademik islami mencakup:

Pertama, civitas akademika PTAI perlu memiliki materi keilmuan agama Islam lengkap dengan penguasaan nomenklaturnya, agar semakin mampu menyatakan gagasan tersebut, dan kita dapat memberikan bukti terbaik bahwa gagasan intelektual kita adalah logis. *Kedua,* metodologi ilmu pengetahuan agar mampu menjelaskan gagasan-gagasannya. Orang yang memiliki metodologi kuat akan mampu berargumentasi dan memanfaatkan ilmunya. Jika ia kekurangan materi, ia mengetahui di mana dan bagaimana cara mencari ilmu yang diperlukan. *Ketiga,* memiliki madzhab pemikiran yang jelas. Madzhab pemikiran merupakan pola pikir yang memungkinkan seorang ilmuwan mampu menangkap "api" atau spirit dari keahliannya. Ia merasa terpanggil untuk mengamalkan ilmu secara benar sebagai manifestasi tanggung-jawabnya. Ia

[40] Azra, *Pendidikan Islam,* hlm. 170.
[41] Ibid.

merupakan sekumpulan konsep filosofis, keyakinan keagamaan, nilai-nilai etika, dan metodologi praktis yang melalui hubungan rasional dapat melahirkan suatu konsep dan tindakan yang dinamis, bermakna, terarah, terpadu, dan hidup. Sehingga keahliannya dapat dikhidmatkan kepada perjuangan sosial, sebagai cerminan dari rasa tanggung jawab untuk memilih dan menentukan makna dan tujuan hidupnya.[42] *Keempat,* memiliki pandangan dunia, yakni pemahaman tentang wujud atau eksistensi. Misalnya, pandangan yang materialistis, fasistis realistis dan skeptis-teoritis. Jika seorang ilmuwan, katakanlah ahli politik, dan menganut paham fasis, maka dapat dipastikan orang tersebut akan sangat mencintai nasionalisme dan sosialisme dengan kuat dan berlebih-lebihan, lengkap dengan persetujuan dan diskriminasi rasial. Oleh karena itu, ilmuwan muslim perlu memiliki pandangan dunia yang tegas, jelas serta benar sesuai dengan ajaran Islam. *Kelima,* memiliki ideologi. Ideologi merupakan penajaman

[42] Hidup yang bermakna dapat diperoleh dengan merealisasikan tiga nilai kehidupan, yaitu, *pertama, creative value* (nilai-nilai kreatif); bekerja dan berkarya serta melaksanakan tugas dengan keterlibatan dan tanggung jawab penuh pada pekerjaan. Makna hidup bukan terletak pada pekerjaan, melainkan pada sikap dan cara kerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi pada pekerjaannya. Berbuat kebajikan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan termasuk usaha merealisasikan nilai-nilai kreatif. *Kedua, experiental value* (nilai-nilai penghayatan); meyakini dan menghayati kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan dan nilai-nilai lain yang dianggap berharga. Dalam hal ini cinta kasih merupakan nilai yang sangat penting dalam mengembangkan hidup bermakna. *Ketiga, attitudinal values* (nilai-nilai bersikap); menerima dengan tabag dan mengambil sikap yang tepat terhadap penderitaan yang tak dapat dihindari lagi setelah berbagai upaya dilakukan secara optimal tetapi tak berhasil mengatasinya. Pemahaman lebih lanjut lihat Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2002), hlm. 291.

pandangan dunia. Dengan ideologi dimaksudkan kepedulian atau kepemimpinan, keberpihakan yang jelas kepada siapa ilmunya diperuntukkan. Dengan ideologi pula, memungkinkan seorang ilmuwan terpanggil untuk mengamalkan ilmunya dan membela kebenaran.[43]

Dalam rangka menumbuhkembangkan lima syarat wawasan akademik di atas dalam sebuah PTAI, maka dapat dianalisis dengan mengikuti alur teoritis argumentatif berikut:

Pertama, kita sadari bahwa ilmu adalah bagian dari kebudayaan. Dalam pandangan Islam, kebudayaan itu lahir dari kekuatan spiritual yang memungkinkan manusia itu mengenal, memahami dan menghayati Tuhan. Dengan pandangan semacam itu, memungkinkan manusia memahami sunnatullah sebagai suatu hukum Tuhan yang sempurna, mutlak, pasti dan tidak berubah serta tidak satu makhluk pun yang mampu menghindarinya. Dari pandangan itu timbul paradigma integratif holistik mengenai kebudayaan. Sehingga PTAI berpeluang mengembangkan iptek yang tidak bebas nilai, atau dengan kata lain yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pengalaman dan pengembangan iptek yang dipadu oleh iman dan takwa kepada Allah SWT menurut akidah dan syariah Islam bukanlah satu hal yang utopis.[44]

Kedua, mahasiswa tidaklah datang dengan pengetahuan dan pengalaman kosong mengenai ajaran Islam. Sekalipun

---

[43] Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam,* hlm. 53-54.

[44]Eksplorasi lebih lanjut lihat Fuad Amsyari, *Strategi Perjuangan Umat Islam* (Bandung: Mizan,1992). Pengembangan nilai-nilai agama tidak harus bermakna pelestarian dan pemeliharaan nilai-nilai terdahulu yang dianggap relevan semata, tetapi juga bermakna memperkaya isi nilai-nilai agama dan memperbanyak alternatif operasionalnya. Lihat Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 16-17.

mereka tidak dapat melakukan shalat, misalnya, tetapi mereka pasti telah mendengar, mengamati, dan bahkan secara tradisi telah terlibat pengalaman dalam hidup beragama. Untuk itu, pelibatan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran menjadi suatu keharusan sehingga dapat mengembangkan nalar yang kritis dan mendalam, terutama pengembangan nalar islami.[45]

Ketiga, belajar tidaklah berarti mengasuh pengembangan akal atau kemampuan nalar semata, tetapi juga memahami dan menghayatinya, sehingga tumbuh rasa keterpanggilan untuk mengamalkannya. *Keempat,* perlunya diciptakan tradisi kehidupan kampus yang lebih islami, sebagai wadah realisasi amaliah keagamaan[46] Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan kampus. Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan

[45]Di samping itu, pola pembelajaran yang dikembangkan harus berorientasi masa depan (*futurism*). Sikap sadar terhadap masa depan, akan menjadikan produk PTAI dapat lebih fungsional dalam masyarakat, khususnya dalam hubungannya dengan gagasan reaktualisasi dan revivalitalisasi Islam. Singkatnya, *futurism* bertujuan untuk memperkuat kemampuan praktis produk PTAI untuk mengantisipasi dan mengadaptasikan diri dengan perubahan, baik melalui penemuan, penjelasan atau pengalaman, atau melalui resistansi dan akomodasi intelektual yang cerdas. Lihat Azra, *Pendidikan Islam,* hlm. 166. SDM yang mampu mengembangkan nilai-nilai serta menguasai iptek dalam mengantisipasi perubahan masyarakat masa depan dipandang sebagai SDM yang berkualitas tinggi dan kompetitif untuk menjawab tantangan zaman. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengembangan sistem pendidikan Islam yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai iptek, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai iptek, memilki kematangan profesional, sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama. Lihat Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 130.

[46] Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam,* hlm. 55-56.

hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi.[47]

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan wawasan akademik yang lebih islami, maka dapat dimulai dengan mengadakan berbagai kegiatan keagamaan yang pelaksanaannya ditempatkan di lingkungan kampus. Kegiatan-kegiatan keagamaan dan praktik-praktik keagamaannya yang dilaksanakan secara terprogram dan rutin (*istiqâmah*) di kampus dapat menciptakan pembiasaan berbuat baik dan benar menurut ajaran agama yang diyakininya. Untuk mewujudkan tujuan agung ini, peran pimpinan untuk menjadi model atau contoh bagi staf dan bawahannya dalam segala kegiatan sangat diperlukan.

PTAI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menfokuskan diri pada pengembangan pendidikan Islam berusaha membangun manusia yang utuh dalam rangka pembentukan kepribadian, moralitas, sikap ilmiah dan keilmuan, kemampuan bekerja, profesionalisasi sehingga mampu menunjukkan iman dan amal shaleh sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan.[48]

---

[47]Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam,* hlm. 293. Keberagamaan atau religiusitas, menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama atau ber-Islam secara menyeluruh (QS.2:208). Karena itu, setiap muslim, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk ber-Islam. Dalam melaksanakan aktivitas apapun, seorang muslim diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Di mana pun dan dalam keadaan apapun, setiap muslim hendaknya ber-Islam. Tidak ada satu pun pekerjaan yang dapat dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam (tauhid). Lihat Ibid, hlm. 297.

[48]Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik, Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam* (Yogyakarta: IRciSoD, 2004), hlm. 60.

Untuk itu, keberhasilan pendidikan agama tidak hanya menjadi tanggung jawab dosen, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan agama di kampus, agar moral dan akhlak mahasiswa PTAI khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya menjadi modal utama pembangunan dalam era global. Sehingga mahasiswa PTAI dapat menerapkan nilai-nilai keagamaan dan moral, yakni berilmu amaliah dan beramal ilmiah, dalam setiap perilaku dan tindakannya.*

6

PENDIDIKAN ISLAM DALAM TANTANGAN PLURALISME AGAMA

A. Fenomena Keberagamaan

Berbagai tindakan kekerasan dan kerusuhan massa yang terjadi secara beruntun di tanah air dewasa ini, menuntut kita melakukan kajian secara lebih mendalam terhadap wacana dan praksis kemajemukan (*plurality*) yang selama ini kita klaim berhasil dalam mengelolanya bagi terciptanya integrasi bangsa.[1] Terjadinya konflik sosial ini mengindikasikan bahwa mengelola masyarakat yang ditandai dengan berbagai kemajemukan seperti bahasa, etnis, budaya, agama dan lain sebagainya bukanlah hal yang mudah. Persoalan semakin mengandung nilai krusial yang tinggi jika konflik merambah pada wilayah keagamaan.[2]

Dalam konteks ini, kemajemukan agama patut memperoleh perhatian khusus karena sebagai masyarakat beragama (*religious society),* sering kita diguncang dengan banyaknya peristiwa di luar prediksi manusia yang bersifat

---

[1] Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru dalam Beragama* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000), hlm. 73.

[2] Ibid, hlm. 67.

rasial, *collective violence* dengan upaya-upaya mengail di " air keruh" sehingga tampaknya bermuatan keagamaan. Peristiwa yang sama sekali bukan bermuara agama berubah menjadi peristiwa yang sarat dengan sentimen-sentimen keagamaan, sehingga tidak jarang membuyarkan angan bahwa agama adalah pembawa damai dan keselamatan bersama. Agama menjadi semacam ancaman yang bisa dengan tiba-tiba datang memberangus kehidupan bersama di bumi ini.[3]

Ada sementara pendapat yang agak artifisial dan simplikatif, pluralitas agama dipandang menjadi pemicu munculnya kekerasan dan konflik agama. Indonesia yang menjadi tempat berkembangnya banyak agama dinilai

[3] Zuly Qadir, "Membangun Wacana Agama yang Toleran" dalam *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman,* ed. Nur Achmad, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 35-36. Konflik yang mengatasnamakan agama sama sekali berada di luar semangat keilahian (*divine spirit*) agama-agama. Semangat agama yang diwahyukan adalah cinta dan kasih. Semua nabi yang membawa semangat keilahian ini, yang dalam konfigurasi mainstream dipresentasikan nabi-nabi terkemuka dan terkemudian, Musa, Isa dan Muhammad, mendasarkan difusi profetiknya pada cinta dan kasih ini. Pada umumnya konflik yang mengatasnamakan agama disebabkan oleh oleh penyimpangan arah proses sosial yang berkorelasi logis dengan bentuk-bentuk menyimpang interaksi sosial antar umat beragama. Bila agama adalah cinta dan kasih, maka interaksi sosial antar umat beragama mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip cinta dan kasih. Namun, interaksi sosial antar umat beragama lebih didominasi pra sangka-pra sangka *in group/ outgroup* dan akan meruncing manakala bersentuhan dengan prasangka-prasangka kontravensif karena tajamnya disparitas status, kelas dan stratifikasi sosial, akumulasi akses politik atau ekonomi pada kelompok sosial tertentu dan distingsi penghayatan personal terhadap agama sebagai ajaran cinta dan kasih. Lihat C. Syamsul Hari, "Spiritualitas dan keberbagaian Agama" dalam *Atas Nama Agama,* ed. Andito (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 69-70.

mengandung potensi munculnya kekerasan dan konflik agama.[4]

Munculnya kekerasan dan konflik agama, lebih merupakan akibat dari tahapan historis dan sosiologis dari perkembangan situasi dan kondisi kultural manusia. Dalam bentuknya yang masih azali, agama jauh dari konflik. Konflik muncul ketika agama berkembang dalam bentuknya sebagai identitas formal. Agama mengalami reduksionalisasi menjadi dasar kesadaran kelompok primordial dan sektarian. Dengan begitu, agama semakin jauh membatasi kemanusiaan agama sekaligus manusia yang bersifat universal, yang justru melintasi agama itu dalam wujudnya yang formal.[5]

Melihat kondisi riil fenomena keagamaan di atas, diskursus pendidikan Islam sebagai *rahmatan li al 'alamin* sangat relevan diperbincangkan untuk konteks pendidikan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan Islam mampu menawarkan pola pembelajaran yang membebaskan

---

[4] Arifin, *Merambah Jalan Baru,* hlm. 79. Dien Syamsuddin membenarkan bahwa agama mempunyai watak yang mendua terhadap masalah kerukunan keagamaan. Pada satu sisi, ia dapat mendorong persatuan antar manusia atau memiliki daya perekat sosial yang kuat sehingga dapat mempersatukan masyarakat. Di sisi lain, agama juga memiliki potensi untuk mendorong munculnya konflik sehingga ia dapat memcah persatuan suatu masyarakat. Kenyataan historis telah menunjukkan adanya konflik yang dipicu oleh motif-motif yang bergerak atas unsur keagamaan. Hal ini lebih disebabkan oleh tiga watak suatu agama, yaitu: *pertama,* agama memiliki sifat yang absolut. Akibatnya, rasa keberagamaan hanya dirasakan diyakini oleh pemeluknya sebagai sesuatu yang mutlak. *Kedua,* agama memiliki karakteristik yang cenderung untuk mengadakan penyebaran diri. *Ketiga,* agama memiliki kecenderungan untuk membentuk masyarakat atau pengelompokan sosial yang berdasarkan atas kesamaan agama. Lihat Dien Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Ciputat: Logos, 2000), hlm.195.

[5] Ibid, hlm. 80

dan mampu mencerahkan peserta didik dalam membangun semangat saling menghargai, toleran, dan menerima perbedaan sebagai sunnatullah. Upaya strategis pendidikan Islam diarahkan untuk membangun metodologi yang dapat membangun karakter peserta didik menjadi arif dan memiliki wawasan kemanusiaan yang universal (*rahmatan lil alamin*). Beberapa pendekatan dan wawasan modern tentang pendidikan perlu diakses dan dicermati secara akademik ilmiah untuk menemukan sebuah model dan pola pendidikan agama berbasis pluralisme.

B. Pluralisme Agama dalam Perbincangan

Pluralisme tidak dapat hanya dipahami dengan mengatakan masyarakat kita majemuk beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai "kebaikan negatif" (*negative good),* hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticisme at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai "pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban" (*genuine angagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan penyeimbangan yang dihasilkannya.[6]

Sebagai sebuah fenomena sosiologis, pluralisme agama merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri – mungkin merupakan *sunnatullah* – dalam proses pembiakan dan penyebaran umat manusia . Pluralisme agama merupakan bagian dari bentuk pluralisme lain yang memperkaya khazanah kultur manusia. Dalam kehidupan

[6] Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 31.

agama, pluralisme tidak hanya muncul dalam wujud banyaknya agama, juga dalam satu agama, dengan banyaknya keragaman dalam interpretasi (penafsiran) dan penciptaan lembaga keagamaan.[7]

Dalam perspektif yang agak lebih luas, pluralisme agama perspektif Islam mengandung simplifikasi yang luar biasa, bahkan sering kali mengalami reduksi dan terkesan "liberal". Diantaranya adalah : *pertama,* memang Islam agama wahyu,[8] namun pemahaman orang terhadap Islam bisa bermacam-macam (*multi-interpretation*). Kesalahpahaman ini bukan saja di kalangan umat Islam, tetapi juga pada pengamat-pengamat "asing" yang sering memandang Islam dengan wajahnya yang tunggal termasuk dalam memandang pluralisme. Sifat multi-interpretasi terhadap Islam memungkinkan terjadinya diversifikasi

---

[7] Arifin, *Merambah Jalan Baru,* hlm. 79. Secara fenomenologis, pluralisme agama menunjuk pada fakta bahwa sejarah agama menunjukkan suatu pluralitas tradisi dan variasi. Secara filosofis pluralisme agama merupakan suatu teori yang merujuk pada hubungan antara berbagai tradisi agama, perbedaan dan klaim-klaim kompetisinya. Toeri ini berisi bahwa agama-gama besar dunia memiliki konsepsi yang beragama dan persepsi yang berbeda tentang Tuhan. Lihat Muhyar Fanani, "Mewujudkan Dunia Damai Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat" dalam *Ijtihad* (No.1 tahun 3, 2003*),* hlm. 21.

[8] Selain terkandung unsur ilahiyah, dalam Islam terdapat unsur *insaniyah*-nya. Para pengikutnya mempunyai otoritas (*ijtihad*) untuk menentukan arah historisitas ke-Islamannya sesuai dengan kecenderungan ruang dan waktunya masing-masing. Realitas kultur, tradisi, kontruksi sosial-budaya-politik dalam sutu ruangdan waktu tertentu berhak untuk berdialog dengan universalitas wahyu sebagai upaya mencari jawab eberagamaannya. Wahyu, dengan demikian, dipresentasikan sebagai realitas *ilahiyah* yang substansial dan tidak dapat diubah (*immutable*). Namun pada saat yang bersamaan, ia berinteraksi dengan kebutuhan-kebutuhan konkrit, mendesak dari para pelaku-pelaku sosial (*adaptable)* Lihat Affandi Muchtar, "Misi Universalitas Islam dalam Membangun Masyarakat Religius" dalam *Beragama di Abad Dua Satu.* ed. A. Syafi'i Mufid dan Munawar Fuad Noeh (Jakarta: Dzikrul Hakim,1997), hlm. 25.

terhadap pemahaman keagamaan, baik pada tingkat kognisi atau aksi. *Kedua,* disamping agama wahyu, Islam merupakan produk sejarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ilmu sejarah dapat digunakan untuk melihat tahapan-tahapan perkembangan Islam. Dalam kaitan ini juga, orang bisa melihat teks-teks ajaran agama dengan menggunakan kritik historis, fenomenologi dan sebagainya. *Ketiga,* dialektika Islam dengan dunia luar telah melahirkan sebuat sudut pandang baru terhadap Islam yang terkadang keluar dari mainstream aslinya.[9]

Fenomena ini tampak jelas tatkala Majlis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 29 Juli 2005 menetapkan fatwa keharaman bagi umat Islam memeluk paham pluralisme agama dan menyatakannya sebagai paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pluralisme didefinisikan sebagai paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran semua agama adalah *relatif*. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah (*truth claim*). Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.[10]

Bagi sebagian kalangan, fatwa tersebut tampaknya dilihat bagaikan "palu godam" yang berpotensi meluluhlantakkan paham pluralisme agama yang telah menyelusup jauh ke jantung pendidikan umat. Sehingga tidak ayal lagi, muncul respon negatif terhadap fatwa tersebut. Para penyokong paham ini memberi garis

---

[9] Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam, Potret Timur TengahEra Awal dan Indonesia* (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hlm. 216.

[10] Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 12.

pembatas yang jelas mengenai esensi pluralisme agama. Syafi'i Anwar misalnya, menyatakan bahwa pluralisme agama bukanlah menyamakan semua agama, melainkan lebih pada *mutual respect,* saling menghormati. Ulil Abshar Abdallah menyatakan, pluralisme artinya sikap positif dalam menghadapi perbedaan, yakni sikap ingin belajar dari yang lain yang berbeda.[11]

Pandangan ini sejalan dengan apa yang telah dilontarkan Alwi Shihab bahwa pluralisme agama merupakan bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinnekaan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim pemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu, banyak orang enggan menggunakan kata pluralisme agama, karena khawatir akan terperangkap dalam lingkaran relativisme agama.[12]

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah apabila konsep pluralisme agama hendak diterapkan di Indonesia maka ia harus disyaratkan satu hal, yaitu komitmen yang kuat terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama, tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati mitra dialognya. Tapi yang terpenting ia harus *committed* terhadap agama yang dinutnya. Hanya dengan sikap demikian kita dapat menghindari relativisme agama yang tidak sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

---

[11] Ibid.

[12] Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41-42.

C. Universalitas Islam

Islam adalah agama universal[13] yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan dan persamaan hak dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme menurut islam adalah sebuah aturan Tuhan (sunnnatullah) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui hak agama lain untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Namun Islam mempunyai garis batas penghargaan selama tidak didasarkan paganisme dan syirik.[14]

Penghargaan Islam terhadap pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham pluralisme sosial dan agama, sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Untuk memperkuat misi kemanusiaan ini, al-Qur'an secara implisit dan eksplisit mengakui dan melindungi keberadaan agama-agama di luar Islam. Hal ini termaktub dalam al-Qur'an:

> "*…. Andaikan Allah SWT tidak menolak (tindak kekerasan) antar suatu kelompok manusia dengan kelompok lain, niscaya gereja-gereja, sinagoge (rumah ibadah umat Yahudi), rumah*

---

[13] Universalitas Islam yang dimaksud bukanlah kesempurnaan sistem, prosedur, teknik atau manajemen, melainkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental bagi seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan beragama. Seperti prinsip keadilan (*al-Ta'adul)*.egaliterianisme (*al-Musawah*), toleransi *(tasamuh*), moderat (*al-Tasawuth*), kemanusiaan (*al-Basyariyyah*), demokrasi (*al-Syura*), keseimbangan (*tawazun*), solidaritas sosial (*al-Takaful al-Ijtima'I*). Misi utama Islam dari semua prinsip dan nilai-nilai universalitas itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan semesta (*rahmatan lil Alamin*). Lihat Affandi Muchtar, "Misi Universalitas Islam, hlm. 26

[14] Said Aqil Husein al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qurani dalam Pendidikan Islam.*(Ciputat: Ciputat Press, 2003), hlm. 119

ibadah apapun (shalawat) dan masjid-masjid, yang dalam semua rumah ibadah di atas, nama Allah banyak, itu akan dihancurkan."(QS. Al-Hajj, 22: 40).

Ayat ini menyatakan dengan tegas keberadaan agama-agama di luar Islam. Secara implisit, ayat tersebut menyatakan, bahwa esensi semua agama itu kembali kepada Allah. Mungkin yang berbeda hanyalah sebutan "Tuhan" pada setiap agama.[15]

Dalam pserspektif perenial, semua agama memang dapat dikatakan mengacu pada pengakuan, bahwa ada kekuatan *Maha Dahsyat dan Maha Kuasa di luar kemampuan manusia dan alam semesta ini.* Demikian juga dengan Islam, dalam kaitan keberadaan agama lain, Islam tetap menempatkan agama lain dalam kerangka realitas sosial untuk menjaga hak-hak "kebebasan" manusia untuk mengikuti dan meyakini suatu agama. Ini sekaligus mengakui, adanya pluralisme agama yang menjadi penuntut hidup manusia.[16]

Penghargaan Islam terhadap pluralisme agama juga dapat diungkapkan dari aspek kesadaran kontinuitas agama yang ditegaskan dalam doktrin Islam.[17] Penegasan itu

---

[15] Imam Ghazali Said, "Islam dan Pluralitas Masyarakat Bangsa" dalam *Islam di Tengah Arus Transisi,* ed. Abdul Mun'im D.Z. (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 39.

[16] Ibid, hlm. 39-40.

[17] Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah SWT diakui sebagai agama yang menyempurnakan proses pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dalam garis kontinuitas tersebut, dengan adanya ajaran bahwa "agama tidak boleh dipaksakan" (QS.al-Baqarah, 2: 256). Pada sisi lain, Islam mengisyaratkan bahwa "para penganut berbagai agama – asalkan percaya kepada Tuhan dan hari akhir serta berbuat baik - semua akan selamat". Inilah kemudian yang menjadi dasar toleransi agama Islam dalam sejarahnya yang autentik. Toleransi termasuk doktrin Islam yang telah dibangun Nabi Muhammad saw sejak memimpin kota madinah

disertai dengan perintah kepada kaum muslimin berpegang teguh kepada ajaran kontinuitas itu dengan beriman kepada semua para nabi dan rasul tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan antara mereka baik yang disebutkan dalam kitab suci maupun tidak sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah, 2: 136.[18]

Dalam perspektif ini, tampak jelas wajah universalitas Islam tidak perlu dibenturkan secara konflikal dengan tantangan-tantangan temporal. Karena Islam pada hakekatnya adalah nafas zaman itu sendiri, ruh yang mesti merasuk ke seluruh relung-relung peradaban dan kebudayaan. Islam selalu *welcome* dengan tantangan dan perubahan (*transformation, tathawur*) dan selalu kontekstual (*al-waqi'iyyah*) dengan segala ruang dan waktu. Namun kesemuanya itu hanya menyajikan kerangka teoritik (*al-nadhariyyah*), prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai fundamental. Sedangkan pranata sosial pendukungnya adalah kosmopolitanisme peradaban, yang sejak awal telah dicontohkan Rasul saw. dalam mengatur pengorganisasian masyarakat madinah dalam segala dimensinya.[19]

Dalam ajaran Islam – bahkan mungkin semua agama – dibedakan dua arah interaksi, yaitu vertikal dan horizontal. Pada wilayah vertikal, substansi ajaran agama merupakan wilayah keyakinan yang tak bisa dirasionalkan dan dipluralitaskan. Akan tetapi, dalam wilayah horizontal, terbuka peluang untuk melaksanakan konsep pluralisme selama hal tersebut tidak bertentangan dengan substansi nilai-nilai akidah dan mengakibatkan perpecahan antar umat. Artinya, tatkala pluralisme dipahami sebagai

---

yang memiliki masyarakat majemuk. Lihat al-Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai,* hlm. 121.

[18]*Ibid,* hlm. 120.

[19] Afandi, *Misi Universalitas,* hlm. 26.

keniscayaan dalam membangun peradaban, maka berarti semua implikasi budaya yang berangkat dari filosofi lintas agama akan dapat dibenarkan. Sebab dalam dataran filosofis, munculnya budaya tidak bisa dilepaskan dari motivasi agama yang diyakini oleh suatu komunitas.[20]

Bila paparan di atas ditinjau dari perspektif historis ajaran agama pada setiap utusan-Nya, maka eksistensi ajaran masing-masing agama secara sistematis disesuaikan dengan kebutuhan manusia pada masanya. Dengan sifat manusia yang dinamis dan semakin kompleks, maka ajaran agama yang dibawa oleh para rasul kemudian mengalami penyempurnaan. Proses penyempurnaan dilakukan langsung oleh Allah. Dengan penyempurnaan tersebut, maka ajaran agama yang hanya sempurna pada masa sebelumnya perlu untuk kemudian mengacu pada ajaran yang telah disempurnakan-Nya tersebut.

Realitas plural inilah, menuntut setiap individu dan kelompok berbeda, mengakui eksistensi individu dan kelompok lain, dan eksistensi yang diakui Islam bukan dalam kerangka teologis dan ritual.

D. Pendidikan Agama Berbasis Pluralisme

Islam dengan berbagai berbagai nuansa normatif yang dibawanya, sebenarnya dengan jelas lebih berorientasi pada suatu universalisme dan berkembang atas prinsip *rahmatan lil alamin*. Dengan berbagai atribut dan rambu-rambu yang ada di dalamnya, Islam lebih menempatkan diri pada gejala dan kecenderungan humanis, yaitu Islam yang mengajarkan dan menyukai persahabatan, perdamaian dan kerukunan.[21]

---

[20] Nizar, *Sejarah dan Pergolakan,* hlm. 220.

[21] Aden Wijdan SZ, "Pendidikan Islam dalam Pluralisme Agama Suatu Kajian Perspektif Kultural-Sosiologis" dalam Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial.* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) hlm. 112.

Kesadaran akan tersebut pada bagian tertentu tercermin pula dalam pendidikan Islam, sekalipun belum berlangsung secara universal. Kekurangan ini menempatkan pendidikan Islam pada posisi tidak dapat menjauhkannya pada label lembaga dan pendidikan yang cenderung eksklusif.

Kecenderungan eksklusifisme ini perlu dikonstruksi dalam penanaman nilai-nilai pluralisme. Pluralisme agama dalam pendidikan islam mengindikasikan bahwa pendidikan yang dilangsungkan dalam proses pengajaran tidak bersifat eksklusif akan tetapi mengembangkan sikap inklusifisme terhadap berbagai latar belakang kultur, agama, ras dan lain sebagainya, yakni pendidikan yang bersifat terbuka dan akomodatif terhadap semua pluralisme agama.

Pemahaman pluralisme agama dalam pendidikan Islam bermuara pada sebuah sikap demokrasi. Antara demokrasi dan masyarakat plural ber*simbiosa mutualisme*; masyarakat yang plural membutuhkan demokrasi sedangkan demokrasi muncul karena adanya pluralisme masyarakat.[22]

Dalam konteks tersebut, maka pendidikan Islam harus mampu merespon situasi yang terjadi dengan langkah menanamkan dan mensosialisasikan konsep Islam tentang pluralisme agama. Kepada peserta didik harus dipertegas

[22] Al- Munawwar, *Aktualisasi Nilai-nilai,* hlm. 125. Demokrasi sebagai muara pluralisme agama kemudian berimplikasi pada terwujudnya kerukunan, kemerdekaan beragama dan toleransi. Ketiga hal ini merupakan puncak tertinggi yang dicapai dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memberikan sikap kerukunan terhadap pemeluk agama lain dalam lingkungannya, termasuk terciptanya toleransi yang baik di antara peserta didik. toleransi ini kemudian dapat menjadi penertib, pengaman, pendamai dan pemersatu dalam komunikasi dan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Dengan demikian, anak dapat menumbuhkan sikap sosial yang tinggi kepada orang yang berlainan latar belakang, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama dalam lingkungan masyarakat dan agama.

bahwa Islam merupakan agama universal yang menghargai pluralitas sebagai bagian dari sunnatullah.

Melalui pendidikan Islam peserta didik perlulah ditanamkan pemahaman sebagai umat yang telah diberi seruan untuk mencari "kalimatun sawa" , maka selayaknya senantiasa mencari titik temu dan menonjolkan kesamaan dengan umat lain.[23] Di sini tidak diajurkan untuk menonjolkan perbedaan, tetapi dengan segala kearifan justru harus berusaha mengeliminasikan perbedaan yang ada untuk dipersoalkan dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin.*

Dimensi kebersamaan dalam membangun harmoni sesama penganut agama yang berlainan adalah proyek besar yang harus mulai dipikirkan oleh kita semua. Pola pengajaran agama yang bersifat doktriner dan anti dialog harus dibuka salurannya dengan pendekatan yang lebih dialogis. Oleh karena itu, pengajaran agama Islam yang selama ini cenderung berorientasi pada cara pandang fiqh (*fiqh oriented*) harus dibuka pada dimensi dan wacana lainnya. Sebab melihat agama semata-mata dalam kaca mata hukum akan mengakibatkan peserta didik menjadi *rigid*, kaku dan tidak *elegant* dalam pergaulannya di masyarakat yang multi etnis dan beragama budaya seperti di Indonesia. Jadi memikirkan pendidikan agama berbasis pluralisme sangat relevan dengan kondisi keindonesiaan.

---

[23] Bila nilai "kebaikan dan keselamatan" dijadikan titik temu semua ajaran agama, maka perlu dipertanyakan substansi esensial "kebaikan dan keselamatan" yang dimaksudkan masing-masing agama dalam mewarnai budaya umat beragama. Sebab, masing-masing agama memiliki makna esensial terhadap maksud "kebaikan dan keselamatan", terutama bila dikaitkan dalam makna vertikal dan horizontal. Untuk itu, sangat tidak tepat bila "kebaikan dan keselamatan" tersebut dijadikan dasar sebagai acuan pluralitas vertikal dan horizontal.

Pendidikan agama berbasis pluralisme ini penting diimplemetasikan di institusi pendidikan Islam untuk mencerahkan penganut agama Islam sehingga dapat meneladani sifat Tuhan yang Maha Agung. Signifikansi selanjutnya adalah realitas plural agama yang sejak lama telah ada di negeri ini, bukan untuk disesali dan justru menggelisahkan salah satu kelompok agama. Tetapi pluralisme agama ini dapat mendidik kita sebagai hamba Tuhan yang arif dan saling menghormati, yang hal ini menjadi inti dari semua agama.

E. Rekonstruksi Metodologi Pendidikan Islam

Melihat peta dan pola pendidikan Islam yang berlangsung dewasa ini, agaknya para peneliti, guru, dosen dan masyarakat pendidikan perlu mengevaluasi dan merekonstruksi kembali metodologi dan pola pembelajaran agama untuk menemukan hasil yang benar-benar dapat "menyelamatkan". Sebab terdapat banyak risiko jika memahami agama sebagai urusan vertikal semata tanpa merancangnya dalam berbagai urusan kemanusiaan dalam pola interaksi yang harmonis.[24]

---

[24]Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan Moralitas* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), hlm. 103. Dari asumsi ini lalui diabaikan pola interaksi antar individu sebagai dasar diperolehnya suatu keselamatan. Kecenderungan yang tidak imbang ini dapat dilihat dari materi dan silabus pembelajaran agama Islam yang kurang menekankan pada pola hubungan sesama manusia, tetapi lebih terkesan mengekspose termonologi ibadah dalam hubungan yang vertikal. Padahal pola ini akan mengakibatkan peserta didik kurang memiliki kepekaan sosial dan tidak mampu melatih rasa kasih sayang dan merasakan penderitaan sesama manusia yang kebetulan berlainan agama. Lihat *ibid,* hal. 102. Hal ini lebih dikarenakan oleh sulitnya mengukur wilayah keberagamaan yang bersifat substansial-esensial, sehingga pendidikan keagamaan seringkali hanya terhenti pada wilayah kognitif, dan tidak menyentuh wilayah afektif,

Pendidikan Islam terasa kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat *kognitif* menjadi "makna" dan "nilai' yang telah terkunyah dan terhayati dapat menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak, berbuat dan berperilaku secara konkrit-agamis dalam wilayah kehidupan praksis sehari-hari.[25]

Oleh karena itu, menurut Amin Abdullah, pengajaran dan pendidikan agama Islam tidak bisa tetap bersikukuh pada metodologi belajar dengan pola konvensional. Perlu dicari terobosan baru agar *content* dan metodologi pendidikan agama Islam menjadi aktual-kontekstual.[26]

Upaya yang bernuansa reformatif dan inovatif-konstruktif terhadap model pendidikan agama dan

---

apalagi psikomotorik secara seimbang. Doktrin agama, sejarah perjuangan para nabi, cukup untuk diketahui saja dan jangkauan sebagai identifikasi keteladanan hanya bersifat parsial atau hanya sekedar hafalan dan tidak mampu menjangkau sampai pada taraf pembentukan sikap hidup beragama dan gaya hidup yang agamis dalam menghadapi probelmatika kontemporer. Lihat M. Amin Abdullah, " Perspektif Link and Match Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Islam " dalam Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial (*Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 203.

[25] Metodologi pendidikan agama Islam dengan vokal fokusnya yang berorientasi pada transformasi nilai (*transformation of values*), setidaknya harus diarahkan pelaksanaannya agar bersifat fungsional. Pendidikan Islam mesti menghubungkan nilai-nilai normatif yang abstrak yang diterima peserta didik dengan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, peserta didik akan termotivasi untuk bersikap kritis dan inovatif dalam menghadapi realitas sosial. Jika pendidikan dapat memenuhi fungsi ini, maka pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi pada penumbuhan dan pemupukan sikap toleransi dan peningkatan kerja sama antar penganut agama dalam menghadapi masalah sosial universal. Lihat Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam,* hlm. 99.

[26] Amin Abdullah, "Problem Epistemologis Metodologis Pendidikan Islam", dalam Abdul Munir Mulkan, *Religiusitas Iptek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 52.

pendidikan sosial keagamaan sangatlah mendesak dilakukan. Metodologi pengajaran agama perlu disentesiskan secara kreatif sehingga menjadi perpaduan harmonis antara pendekatan doktriner dan saintifik. Dengan demikian diharapkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik tersaji dalam satu kesatuan yang utuh lewat berbagai diskusi yang melibatkan partisipasi peserta didik secara aktif responsif.

Disamping itu, metodologi pendidikan Islam harus mampu menggerakkan peserta didik untuk belajar dan mengamalkan ajaran agama universal. Pendidikan agama yang hanya menekankan hapalan kaidah-kaidah keagamaan dalam bentuk yang abstrak kurang mempunyai relevansi dengan usaha-usaha mengelola perubahan sosial melalui berbagai usaha pembangunan dan untuk membina peserta didik menghadapi masa modern ini secara positif dan konstruktif sebagai manusia susila.[27]

Dalam kaitan ini, maka studi pendidikan Islam di semua jalur dan jenjang pendidikan diarahkan kepada hal-hal fundamental strategis berikut :

1. Hendaknya ditujukan untuk membangun suasana iman yang dialogis. Di atas bangunan iman yang dialogis ini diharapkan akan tumbuh sikap yang apresiatif-kritis terhadap keyakinan-keyakinan dan kepercayaan di luar kepercayaan agamanya dengan tidak mengenyampingkan kepercayaan agamanya sendiri.
2. Hendaknya ditujukan untuk menumbuhkan etika pergaulan antarumat beragama. Di atas landasan etika ini diharapkan munculnya sikap terbuka untuk mengakui eksistensi umat agama lain dan bersedia untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai.

---

[27] Soejadmoko, *Pengaruh Pendidikan Agama terhadap Kehidupan Sosial.* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1988), hlm, 272.

3. Hendaknya diarahkan dan dikembangkan untuk menghilangkan bias-bias dari suatu kelompok umat beragama terhadap kelompok umat beragama yang lain.
4. Hendaknya diarahkan untuk "menghancurkan" apa yang lazim disebut " *cultural barriers"* (rintangan-rintangan budaya) sehingga bermuara pada terkikisnya sekat-sekat eksklusivisme agama yang pada gilirannya akan digantikan oleh sikap inklusif.
5. Hendaknya diarahkan untuk membangun tumbuhnya kesadaran akan adanya pluralisme agama baik di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya.
6. Hendaknya diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan perlunya solidaritas dan tanggung jawab bersama di kalangan pemeluk agama dalam menganggulangi berbagai keterbelakangan.
7. Hendaknya diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan akan nilai-nilai moralitas dan merealisasikannya dalam spektrum hidup keumatan dan kebangsaan.
8. Hendaknya diarahkan untuk mengembangkan tumbuhnya kesadaran *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah insaniyah.*[28]

Agar studi pendidikan Islam tersebut tepat sasaran maka pendekatan pembelajarannya diharapkan mampu memenuhi tuntutan universalitas Islam, yaitu *pertama,* pendekatan humanistik religius; esensi pendekatan ini adalah mengajarkan keimanan tidak semata-mata merujuk teks suci, tetapi melalui pengalaman hidup. *Kedua,* pendekatan rasional kritis. *Ketiga,* pendekatan fungsional; pendidikan Islam harus diupayakan memiliki hikmah (fungsional) dalam kehidupan individu dan sosial. *Keempat,*

---

[28] Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI,2002), hlm. 243-246

pendekatan kultural, yakni pendidikan dilakukan tanpa menggunakan label Islam, tetapi menekankan pengamalan nilai-nilai universal yang menjadi kebutuhan manusia yang berlaku di masyarakat. Dengan keempat pendekatan ini dimungkinkan pendidikan Islam dapat memberikan ruang gerak bagi proses humanisasi dalam memahami dan menghayati ajaran agama.[29]

Dengan demikian, rekonstruksi pendidikan Islam diharapkan agar jangan sampai menumbuhkan semangat fanatisme buta, sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia dan memperlemah kerukunan hidup beragama. Sebaliknya, pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan *ukhuwah islamiyyah* dalam arti luas, yakni persaudaraan yang bersifat islami, bukan sekedar persaudaraan antar umat islam sebagaimana selama ini dipahami, serta mampu membentuk kesalihan pribadi sekaligus kesalehan sosial.[30]

[29] Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 193-200.
[30] Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 172.

7

REORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI

A. Realitas Pendidikan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003[1] tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Tujuan pendidikan nasional tersebut tampak ideal

[1] Undang-undang ini dilatarbelakangi pemikiran yang demokratis sebagai pilihan kebijakan yang membawa konsekuensi perubahan paradigma sistem pendidikan lama yang sentralistik menjadi paradigma baru, pendidikan yang berpijak pada semangat desentralisasi dan otonomi pendidikan. Dalam paradigma baru tersebut, interaksi masyarakat dan negara akan berubah amat drastis. Lihat Taufikurrachman Saleh, "Sekolah Agama dalam Perubahan Sisdiknas," *Jawa Pos* (10 April 2004), hlm. 4.

dan jika dapat diwujudkan, maka akan dihasilkan manusia yang utuh, sempurna, terbina seluruh potensi jasmani, intelektual, emosional, sosial dan sebagainya.[2] Sehingga ia dapat diserahkan tanggung jawab untuk mengemban tugas baik yang berkenaan dengan kepentingan pribadi, masyarakat dan bangsa.[3]

Namun dalam praktik, ternyata tujuan pendidikan nasional belum sepenuhnya tercapai. Hal itu mengakibatkan lulusan yang dihasilkan belum mencerminkan perilaku-perilaku yang diharapkan oleh tujuan nasional tersebut.[4] Lulusan pada saat ini cenderung bersikap sekuler, materialistik, rasionalistik, hedonistik, yaitu manusia yang cerdas intelektualitasnya dan terampil fisiknya, namun kurang terbina mental spiritualnya dan kurang memiliki kecerdasan emosional. Akibat dari yang demikian, banyak sekali para pelajar yang terlihat "dalam tawuran", tindakan kriminal, pencurian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan dan sebagainya.[5]

Sistem pendidikan kita telah diarahkan pada suatu bentuk pendidikan yang sangat intelektualistis, karena hanya mengembangkan beberapa aspek terbatas dari

---

[2] Karena itu, pendidikan nasional di Indonesia tidak hanya bertugas membentuk warga negara yang cerdas dan baik, tetapi bertugas mencerdaskan bangsa secara terus menerus, khususnya untuk kepentingan generasi muda di seluruh Indonesia. Pendidikan dilakukan secara formal di sekolah dan secara non formal di lembaga luar sekolah, dengan maksud agar semua anak bangsa dapat merasakan pendidikan tersebut. Lihat Cece Wijaya, et.al. *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 11.

[3]Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 230.

[4] Husaini Usman,"Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan dan Kebudayaan,* 028 (Maret,2001), hlm. 97.

[5] Nata, *Manajemen,* hlm.231.

intelegensi manusia. Gardner telah menunjukkan bahwa intelegensia bukan hanya intelegensia akademik saja, tetapi bermacam-macam intelegensia yang perlu dikembangkan untuk menciptakan suatu kebudayaan yang kaya dan dinamis. Pengelolaan pendidikan yang terlalu berlebihan dalam memberi penekanan pada dimensi kognitif dan mengabaikan dimensi-dimensi lain ternyata telah melahirkan manusia Indonesia dengan kepribadian pecah (*split personality*).[6]

Seiring dengan "kegagalan" pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut, di tengah arus reformasi dewasa ini, gagasan mengenai masyarakat madani semakin mengemuka yang menginginkan perubahan dalam tatanan kemasyarakatan, yakni masyarakat baru yang mengharapkan terwujudnya kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, keterbukaan, keadilan, saling menghormati dan menghargai, menegakkan hukum dengan adil, menghargai hak asasi manusia, modern dan ingin meninggalkan pola-pola kehidupan masyarakat yang negatif.

B. Konsep Sosiologis Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani[7] yang dalam wacana akademik di Indonesia belakangan mulai tersosialisasi

---

[6] A. Malik Fajar, et.al. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 33.

[7] Para ilmuwan masih bersilang pendapat mengenai istilah tersebut. Literatur Islam sebenarnya tidak mengenal istilah itu, melainkan mengenal istilah serupa yaitu "*al-Madinal al-Fadilah*" artinya negara utama yang merupakan judul buka filosof muslim klasik, al-Farabi. Eksplorasi lebih jauh lihat Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama: Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam al-Farabi* (Jakarta: Tintamas, tt). Dalam konteks Indonesia, yang membawa pertama kali istilah tersebut adalah Dato Sri Anwar Ibrahim –ketika itu Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia –dalam suatu forum ilmiah Festival Istiqlal tahun 1995. Dalam

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*civil society*". Kata *civil society,* sebenarnya berasal dari bahasa Latin *civitas dei,* artinya kota "*Ilahi*" dan *society* yang berarti masyarakat. Dengan demikian, kata *civil society* diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju.[8]

Dalam berbagai diskursus, istilah masyarakat madani selalu diidentikkan dengan *civil society*, sehingga timbul berbagai asosiasi bahwa yang dimaksud dengan civil society adalah masyarakat itu sendiri, *vis a vis* negara. Mungkin juga *civil society* bukan dihadapkan dengan negara, tetapi lebih sebagai mitra negara, dan dapat pula *civil society* diasosiasikan dengan *non-government organization* atau *private voluntary association*, dan ada juga yang memahami *civil society* sebagai identik dengan masyarakat modern,

---

ceramahnya yang berjudul" Islam dan Pembentukan Mayarakat Madani" ia mengemukakan sebagai berikut: Yang dimaksud masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti UU dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan (*predictability*) serta ketulusan (*transparancy*) sistem. Lihat Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani," dalam *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa,* ed. Aswab Mahasin (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1995), hlm. 22. Sedangkan menurut Komaruddin Hidayat, dalam wacana keislaman di Indonesia, adalah Nurcholish Madjid yang menggelindingkan istilah masyarakat madani ini, yang spirit serta visinya terbakukan dalam nama yayasan Paramadinah (terdiri dari kata "para" dan "madinah", dan atau "parama" dan "dina"). Maka, secara "semantik" artinya kira-kira ialah, sebuah agama [dina] yang *excellent* (paramount) yang misinya ialah untuk membangun sebuah peradaban (madani). Lihat Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 119.

[8] Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 94.

masyarakat yang berkembang di Barat. Untuk itu, penggunaan istilah masyarakat madani yang diterjemahkan dengan *civil society* sebenarnya perlu dipertanyakan, karena apakah jika disebut masyarakat madani, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, atau masyarakat sipil, dan masyarakat berperadaban, apakah pengertian yang dimaksud sama dengan *civil society*.[9]

Dalam perspektif Islam, kata madani sepintas orang mendengar asosiasinya dengan kata Madinah, karena kata madani berasal dari dan terjalin erat secara etimologi dan terminologi dengan Madinah yang kemudian menjadi ibukota pertama pemerintahan Muslim. Maka dari itu, "Kalangan pemikir muslim mengartikan *civil society* dengan cara memberi atribut keislaman madani (*attributive* dari kata al-Madani). Oleh karena itu, *civil society* dipandang dengan masyarakat madani yang pada masyarakat ideal di (kota) Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.[10] Dalam masyarakat tersebut Nabi berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan

---

[9] Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 42-43. Di Indonesia, wacana *civil society* sering diungkapkan dengan istilah berbeda. Beberapa pemikir seperti Azyumardi Azra menggunakan terma 'masyarakat madani' untuk menyebut istilah *civil society.* Lihat Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan Fakta dan Tantangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999). Sedangkan Mansour Fakih lebih suka menggunakan 'masyarakat sipil' sebagai istilah yang menurutnya lebih mengena sebagai padanan dari *civil society*. Lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

[10] Nurcholish Madjid, "Masyarakat Madani dan Intervensi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 22.

terhadap kelompok minoritas,[11] yakni untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang suku dan agama.[12] Dengan begitu, kalangan pemikir Muslim menganggap masyarakat (kota) Madinah sebagai *prototype* masyarakat ideal produk Islam yang dapat dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep *civil society*".

Terma masyarakat madani yang dimaksudkan sebagai bentuk terjemahan dari konsep *civil society* tersebut, merupakan sebuah entitas masyarakat yang memiliki ciri-ciri kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan *(self-generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), sehingga memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan kekuatan yang mendominasinya dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.[13]

---

[11] Masyarakat Prinsip-prinsip tersebut termaktub dalam Piagam Madinah yang terdiri dari sepuluh prinsip dasar yaitu: (1) prinsip kebebasan beragama, (2) prinsip persaudaraan beragama, (3) prinsip persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, (4) prinsip saling membantu yaitu setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, (5) prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, (6) prinsip persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara, (7) prinsip penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu, (8) prinsip pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, (9) prinsip kedamaian dan keadilan. Hal ini berarti pelaksanaan prinsip-prinsip masyarakat Madinah tersebut tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran, dan (10) prinsip pengakuan hak atas setiap orang. Prinsip ini adalah pengakuan terhadap penghormatan atas hak asasi setiap manusia.

[12] Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 69.

[13] Rumusan ini adalah pengertian yang diajukan oleh Toequoville, dikutip dari Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 3. Dengan demikian masyarakat madani merupakan konsep

Hefner menyatakan bahwa masyarakat sipil (*civil society*) merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri mewujudkan peradaban. Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan, bercirikan kebebasan dan demokrasi serta berinteraksi di dalam masyarakat plural.[14]

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa, bentuk masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki "kemandirian aktivitas warga masyarakatnya" yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme), dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang dicita-citakan dan akan diwujudkan di bumi Indonesia, yang masyarakatnya sangat plural.

---

tentang keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun warga negara. Penekanan ini yang membuat konsep masyarakat madani sangat erat terkait dengan konsep demokratisasi dan demokrasi. Demokrasi hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat madani dan masyarakat madani hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis. Lihat Riswandha Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi," dalam *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi,* ed. Arief Subhan (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 54.

[14] Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm.49.

Senada dengan hal di atas, Ali Maschan Musa menegaskan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, koomperasi, koordinasi, simplikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi dan hak asasi. Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Sebab, masyarakat madani bisa berkembang hanya dalam iklim yang demokratis.[15]

Perbedaan yang tampak jelas adalah *civil society* tidak mengaitkan prinsip tatanan pada agama tertentu, sedangkan masyarakat madani (*al-Madaniy*) jelas mengacu pada Islam. Oleh karena itu, konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan, hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Dengan demikian, masyarakat madani dapat dipahami sebagai masyarakat yang berperadaban, beradab, masyarakat sipil dan menghargai pluralistik.[16]

C. Karakteristik Masyarakat Madani

Dari pandangan dan gambaran masyarakat madani di atas, timbul *prototype* bagaimanakah yang menjadi karakteristik atau ciri dari masyarakat tersebut. Dari pandangan di atas, secara umum dapat dipahami bahwa karakteristik masyarakat madani adalah masyarakat kota yang berperadaban, yang dapat menciptakan peradaban, dan memiliki pola kehidupan yang benar, yaitu pola kehidupan masyarakat yang menetap dan bukan masyarakat nomaden. Selain itu, juga masyarakat yang

[15] Ali Maschan Musa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 258

[16] Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam,* hlm.49.

terbuka, pluralistik, menjamin kebebasan beragama, jujur, adil, mandiri, harmonis, menjamin kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani tersebut, pelaku sosial akan selalu berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan yang selalu bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang plural dan heterogen.[17]

Masyarakat madani yang hendak diwujudkan antara lain mempunyai karakteristik, sebagai berikut: *pertama,* masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pemahaman mendalam akan agama serta hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. *Kedua,* masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Memberi tempat dan penghargaan perbedaan pendapat serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan. *Ketiga*, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. *Keempat,* masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya malu apabila melanggar hukum. *Kelima,* masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Mayarakat yang memiliki orientasi kuat pada peneguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keenam,* masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralistik).[18]

---

[17] Ibid, hlm.50.

[18]Ibid, hlm.50-51. Mengenai wacana dan ciri-ciri masyarakat madani, lihat juga Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta:

Pada sisi lain, Antonio Rosmini, seperti yang dikutip Mufid, menyebutkan pada masyarakat madani terdapat sepuluh ciri yang menjadi karakteristik masyarakat tersebut, yaitu: universalitas, supermasi, keabadian, dan pemerataan kekuatan (*prevalence of force*) adalah empat ciri yang pertama. Ciri yang *kelima*, ditandai dengan "kebaikan dari dan untuk bersama". Ciri ini bisa terwujud jika setiap anggota masyarakat memiliki akses pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan (*the tendency to equalize the share of utility*). *Keenam*, jika masyarakat madani "ditujukan untuk meraih kebajikan umum" (*the common good*), tujuan akhir memang kebajikan publik (*the public good*). *Ketujuh*, sebagai "perimbangan kebijakan umum", masyarakat madani juga memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada semua anggotanya meraih kebajikan itu. *Kedelapan*, masyarakat madani, memerlukan "*piranti eksternal*" untuk mewujudkan tujuannya. *Piranti eksternal* itu adalah masyarakat eksternal. *Kesembilan*, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan (*seigniorial or profit*). Masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat (*a beneficial power*). *Kesepuluh,* kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan

---

Paramadina, 1999), hlm. xviii, dan Ahmad Baso, *Civil Society vs Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 22-34. Senada hal tersebut, Daulay mengemukakan bahwa ciri-ciri masyarakat madani meliputi: 1) masyarakat rabbaniyah; 2) masyarakat demokratis; 3) masyarakat egalitarian; 4) masyarakat toleran; dan 5) masyarakat penegak dan pengamal Hak Asasi Manusia. Lihat Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam,* 120-121.

merata kepada setiap warganya, tak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogen.[19]

Sementara Mufid menyatakan bahwa masyarakat madani terdiri dari berbagai warga beraneka "warna", bakat dan potensi. Karena itulah, masyarakar madani di sebut sebagai masyarakat "multi-kuota" (*a multi quota society*). Maka, secara umum sepuluh ciri tersebut sangat ideal, sehingga mengesankan seolah tak ada masyarakat seideal itu. Kalau ada, yaitu masyarakat muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW yang relatif memenuhi syarat tersebut.[20] Diakui bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW merupakan *prototype* masyarakat ideal.

D. Membangun Masyarakat Madani Melalui Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan dalam rangka membangun masyarakat madani, tentu tidak terlepas dari karakteristiknya yaitu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, diperlukan suatu desain pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut. Namun secara definitif, Tilaar berpendapat bahwa, sebenarnya tidak ada pendidikan khusus untuk masyarakat madani Indonesia, karena pendidikan itu sendiri adalah bagian integral dan kegiatan *resiprokal* dari masyarakat dan kebudayaan.[21]

Pendidikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan bangsa hendaknya dibangun atas paradigma pendidikan, yang dapat memberikan rekonstruksi terhadap

---

[19] Mufid, "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani" dalam Tim Ed. PPS UMM, *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 213.

[20] Ibid, hlm.213-214.

[21] H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 167.

asas-asas yang mendasar atau arah pendidikan di dalam usaha meletakkan dasar yang paling rasional untuk mengubah praksis pendidikan di dalam rangka membangun masyarakat madani Indonesia yang demokratis, religius, inovatif, kompetitif, taat hukum, menghargai pluralisme, hak-hak asasi manusia, dan mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk menghadapi lingkungan global.[22]

Paradigma pendidikan di atas yang akan dibangun dengan empat pilar utama, yaitu *pertama*, pendidikan untuk semua warga masyarakat (*education for all)*. Cita-cita era reformasi tidak lain adalah membangun suatu masyarakat madani Indonesia. Oleh karena itu, paradigma baru pendidikan nasional diarahkan kepada terbentuknya masyarakat madani Indonesia tersebut, yaitu pendidikan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pendidikan berperan dalam membangun masyarakat madani dan tumbuh atas kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidupnya. Pendidikan harus berlangsung dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk semua masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan yang dikembangkan berasal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat bukan merupakan objek pendidikan dari negara atau sekelompok penguasa, tetapi partisipatif aktif dari masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan di dalam setiap langkah program pendidikannya. Pendidikan bersama-sama masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan di dalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan

[22] Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 61.

persetujuan masyarakat karena lahir dari kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, pendidikan demokratis.[23] Pendidikan yang dapat mengembangkan masyarakat madani adalah proses pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Pendidikan demokratis merupakan model pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokratis yakni pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Pendidikan demokratis diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang merdeka, berfikir kritis, sangat toleran dengan pandangan dan praktek demokrasi. [24]

---

[23] Dalam dunia pendidikan, variabel-variabel yang dapat dijadikan indikator demokratis tidaknya sebuah pengelolaan praktek pendidikan: (1) adanya pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan, (2) relevansi antara dunia pendidikan dengan pembangunan, (3) peningkatan kualitas pendidikan, (4) efesiensi dalam pengelolaannya. Ace Suryadi dan Tilaar meringkas menjadi 3 variabel; *educational access issue* (kesempatan masuk berbagai lembaga pendidikan), hlm. *educational survival issue* (efesiensi internal pendidikan), hlm. dan *educational outcome issue* (dampak pendidikan). Lihat Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Sebuah Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 9-11.

[24] Demokrasi di samping merupakan pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang menyolok, juga menjadi suatu cara hidup (*way of life*) yang menekankan pada nilai individu dan intelegensi. Manusia percaya bahwa dalam berbuat, mereka membutuhkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi dan *fair play.* Lihat Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 242. Sementara moment terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkehendak (*freedom of speak and press*). Artinya, dalam

Dengan demikian, pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial. Definisi ini memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Masing-masing mempunyai hak otonomi untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan.[25]

Ketiga, pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal. Bangsa Indonesia saat ini terancam disintegrasi bangsa. Hal ini sebagai akibat dari sistem pendidikan yang bersifat sentralistik yang telah lama diterapkan. Pendidikan sentralistik kurang mengakomodasi adanya kebudayaan

---

tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, pluralisme dan relativisme kebenaran akhirnya muncul untuk menggantikan absolutisme dan superioritas keserbatunggalan yang kini tampak lebih menjadi *aus* dan *usang* oleh petasan transformatif sosial budaya dan perubahan masyarakat modern. Lihat Masdar Farid Mas'udi, "Demokrasi dan Islam," dalam *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial,* ed. M.Masyhur Amin dan Mohammad Najib (Yogyakarta: LKPSM NU-DIY, 1993), hlm.4. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai potensi individu, yaitu individu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama. Dengan demikian, segala jenis *homogenisasi* masyarakat yaitu menyamaratakan anggota masyarakat menuju *uniformitas* adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi. Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan inti dari kehidupan demokrasi di dalam segala aspek kehidupan. Lihat H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 11. Bandingkan dengan Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001), hlm. 87.

[25] Arifin dan Barizi, *Paradigma Pendidikan,* 90-91.

kebhinekaan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan kebudayaan merupakan khazanah dalam mengembangkan sistem pendidikan. Unsur-unsur budaya lokal yang tersebar di bumi Indonesia ini dikaji dan dikembangkan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya kebudayaan nasional.

Pendidikan yang didasarkan pada kebudayaan menuntut pranata-pranata sosial untuk pendidikan seperti keluarga, sekolah, haruslah merupakan pusat-pusat penggalian dan pengembangan kebudayaan lokal dan nasional. Namun, yang terjadi dalam pendidikan kita tidak lagi berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan, yang ada adalah penyeragaman dan penyatuan kebudayaan bangsa yang beragam, sedangkan aspek-aspek kebudayaan lainnya kurang terintegralistik.

Sesuai dengan jiwa otonomi, artikulasi berbagai jenis dan jenjang pendidikan di daerah perlu segera dibangun agar sistem pendidikan secara keseluruhan menunjang ke arah terbentuknya masyarakat demokratis yang dimulai dari bawah (*grass root*). Otonomi daerah akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Dengan demikian aktualisasi pendidikan nasional sebagi proses pembudayaan akan lebih cepat dan berhasil.[26]

Keempat, pendidikan yang seimbang antara imtaq dan iptek. Pendidikan harus dikonsepsikan sebagai aktualisasi sifat-sifat Allah pada manusia dan disusun sebagai suatu proses sepanjang hayat dan harus meliputi pengalaman-pengalaman yang berguna dari berbagai sumber baik itu pengetahuan, keterampilan atau sikap, di dalam dan di luar sekolah yang akan menjadikan peserta didik dapat memikul

[26] Tilaar, *Paradigma Baru,* hlm.25, 93.

tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah, dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungannya.

E. Reorientasi Pendidikan Islam

Sejalan dengan bangunan pendidikan di atas, maka pendidikan Islam – sebagai subsistem pendidikan nasional – perlu juga untuk melakukan perubahan paradigma dalam pendidikan, sehingga paling tidak pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat dan dapat memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Proses perubahan paradigma yang mengarah pada perubahan sistem pendidikan harus dilakukan secara terencana dengan langkah-langkah yang strategis, yaitu mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan dan merumuskan langkah-langkah pembaruan yang lebih bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan atau lebih bersifat operasional. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan menyentuh semua aspek, mengantisipasi perubahan yang terjadi, mampu merekayasa terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, yang memiliki kemampuan inovatif dan mampu meningkatkan kualitas manusia.[27]

Berdasarkan uraian ini, ada dua alasan pokok mengapa konsep pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani sangat mendesak. *Pertama,* konsep dan praktek pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang

[27] Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam,* hlm.126.

betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani. *Kedua,* lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia disegala bidang. Maka, untuk menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam.

Suatu usaha pembaharuan pendidikan hanya bisa terarah dengan mantap apabila didasarkan pada beberapa strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu: *pertama,* reorientasi kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan. Filsafat pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan di atas dasar asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia [hakekat] kejadiannya, potensi-potensi bawaannya,[28] tujuan hidup dan misinya di

[28] Potensi-potensi itu dalam bahasa agama disebut *fitrah.* Konsep *fitrah* menunjukkan bahwa manusia membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman (kepercayaan) terhadap keesaan Tuhan (*tauhîd*). Lihat Mohammad Muchlis Solichin "Fitrah; Konsep dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam" dalam *Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 2. Nomor 2. 2007), hlm. 243-245. Alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrah manusia tersebut harus ditumbuhkembangkan secara optimal dan terpadu melalui proses pendidikan sepanjang hayatnya. Manusia diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk berikhtiar mengembangkan alat-alat potensial dan potensi dasar atau fitrah manusia tersebut. Dengan demikian, dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari adanya batas-batas tertentu, yaitu adanya hukum yang pasti dan tetap menguasai alam, benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri, yang tidak tunduk dan tidak tergantung kepada kemauan manusia. Hukum inilah yang dinamakan dengan *taqdir* ("keharusan universal" atau "kepastian umum" sebagai batas akhir dari ikhtiar manusia dalam kehidupannya di dunia). Lihat Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di*

dunia ini baik sebagi individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungan dengan lingkungan dan alam semesta dan akhiratnya hubungan dengan Maha Pencipta. Teori pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara penerapan atau pendekatan filsafat dan pendekatan emperis. Sehubungan dengan itu, konsep dasar pembaharuan pendidikan Islam adalah perumusan konsep filsafat dan teoritis pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan hubungannya dengan lingkungan dan menurut ajaran Islam.[29]

Konsep dasar filsafat dan teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat madani di mana pendidikan itu akan diterapkan. Apabila terlepas dari konteks masyarakat madani", maka pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam pada kondisi masyarakat tersebut (masyarakat madani). Jadi, kebutuhan umat yang amat mendesak sekarang ini adalah mewujudkan dan meningkatan kualitas manusia Muslim menuju masyarakat madani. Untuk itu umat Islam di Indonesia dipersiapkan dan harus dibebaskan dari ketidaktahuannya (*ignorance)* akan kedudukan dan peranannya dalam kehidupan masyarakat madani dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Islam haruslah dapat meningkatkan mutu umatnya dalam menuju masyarakat madani. Kalau tidak umat Islam akan

---

Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 19. Dengan demikian, pendidikan Islam harus dapat menumbuhkembangkan seluruh potensi dasar (*fitrah*) manusia terutama potensi psikis dengan tidak mengabaikan potensi fisiknya. Dengan konsep *fitrah,* Islam mempunyai landasan tersendiri dalam bidang pendidikan. Konsep tersebut senantiasa menjadi ketentuan normatif dalam mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan.

[29] Ibid, hlm.127-128.

ketinggalan dalam kehidupan masyarakat madani yaitu masyarakat ideal yang dicita-citakan bangsa ini. Maka tantangan utama yang dihadapi umat Islam sekarang adalah peningkatan mutu sumber insaninya dalam menempatkan diri dan memainkan perannya dalam komunitas masyarakat madani dengan menguasai ilmu dan teknologi yang berkembang semakin pesat. Karena, hanya mereka yang menguasai ilmu dan teknologi modern dapat mengolah kekayaan alam yang telah diciptakan Allah untuk manusia dan diamanatkan-Nya kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk diolah bagi kesejahteraan umat manusia.

Atas dasar konsep ini, maka konsep filsafat dan teoritis pendidikan Islam dikembangkan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam kontek lingkungan masyarakat madani tersebut, sehingga pendidikan relevan dengan kondisi dan ciri sosial kultural masyarakat tersebut. Maka dari itu, untuk mengantisipasi perubahan menuju masyarakat madani, pendidikan Islam harus didesain untuk menjawab perubahan tersebut. Usulan perubahan yang dimaksud meliputi: (a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena, dalam pandangan seorang muslim, ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah SWT, (b) pendidikan menuju tercapainya sikap dan perilaku "toleransi", lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (c) pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (d) pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan

jujur, (e) pendidikan Islam harus didisain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat madani.

Kedua, visi dan misi pendidikan Islam. Hal ini merupakan penjabaran atau spesifikasi dari misi pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk insan kamil yang berfungsi mewujudkan *rahmatan li al-'ālamīn*. Selain itu, visi dan misi tersebut juga perlu disesuaikan dengan latar belakang, kondisi lokal masing-masing, dna didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam serta nilai-nilai budaya.

Dalam upaya menyusun visi pendidikan Islam, Teuku Amiruddin, mengusulkan perlu mempertimbangkan lima visi dasar pendidikan manusia abad 21, sebagaimana yang diajukan oleh UNESCO yaitu: 1) *learning to know* (belajar untuk mengetahui, berfikir, bersikap kritis dan rasional), 2) *learning to do* (belajar untu berbuat, untuk bekerja profesional, dan untuk meningkatkan skill, 3) *learning to be* (belajar menjadi diri sendiri, belajar menyadari jati diri, untuk berkepribadian) dan 4) *learning to live together* (belajar hidup bersama orang lain, hidup dalam suasana pluralis, saling mengenal dan menghormati).[30]

Apabila konsep Islam dan UNESCO ini dipadukan, barangkali akan menjadi alternatif baru bagi pendidikan

[30] Hal ini berawal dari asumsi bahwa pendidikan di abad ke-21 diprediksi akan jauh berbeda dari pendidikan yang sekarang. Sehingga UNESCO mulai tahun 1997 sudah mulai menggali kembali dan memperkenalkan *the Four Pillars of Education* tersebut untuk mengantisipasi perubahan yang bukan hanya linier tetapi mungkin eksponensial yang diantisipasi akan terjadi dalam masyarakat yang mengglobal. Keempat kemampuan ini dimulai dari belajar untuk mengetahui. Setelah dapat belajar untuk mengetahui diharapkan dapat menerapkannya. Eksplorasi lebih detail lihat Wuri Soedjatmiko, "Pendidikan Tinggi dan Demokrasi" dalam *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, ed. Sindhunata (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 55-58. Lihat juga Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 132-135.

Islam. Artinya pendidikan Islam dapat dikembangkan dengan mengedepankan rasionalitas, sikap kritis, mandiri, mampu memecahkan masalah, mengembangkan sikap kreatif, memiliki daya fikir imajinatif, toleransi, menghargai hak asasi manusia serta siap bersaing dalam dunia global yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam.[31]

Ketiga, strategi pendidikan Islam. Pembangunan pendidikan dan pendidikan Islam di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yaitu: a) pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, b) relevansi pendidikan, c) peningkatan kualitas pendidikan, dan d) efesiensi pendidikan. Secara umum, strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi, yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu dapat meninhgkatkan efesiensi, efektifitas dan produktifitas pendidikan, sedangkan dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah.[32]

Untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata di semua kelompok strata dan wilayah tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, maka perlu menyusun strategi dan kebijakan pendidikan Islam, yaitu: a) menyelenggarakan pendidikan Islam yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia dalam menghadapi tantangan global; b) menyelenggarakan pendidikan Islam yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat; c) menyelenggarakan pendidikan Islam yang demokratis secara profesional; d) meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; e) memberi peluang yang luas dan meningkatkan kemampuan

[31] Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam,* hlm.143-144.
[32] Ibid, hlm.145-146.

masyarakat, sehingga terjadi diversifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat multikultural bangsa Indonesia; f) secara bertahap mengurangi peran pemerintah menuju ke peran fasilitator dalam implementasi sistem pendidikan Islam, dan g) merampingkan birokrasi pendidikan Islam sehingga lebih lentur (fleksibel) untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam lingkungan global.[33]

Keempat, reorientasi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang ada sekarang ini, dirasakan tidaklah benar-benar diarahkan pada tujuan yang positif, tetapi masih berorientasi pada tujuan hidup ukhrawi semata dan cenderung bersifat defensif, yaitu upaya menyelamatkan kaum muslim dari pencemaran dan pengrusakan yang ditimbulkan oleh dampak gagasan Barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan yang mengancam akan meledakkan standar-standar tradisional Islam. [34] Implikasinya, rumusannya lebih bersifat normatif dan tidak bersifat problematik.[35]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, rumusan tujuan pendidikan Islam diharapkan lebih bersifat antisipatif,

---

[33] Ibid, hlm.146.

[34] Peradaban modern sebagai budaya antroposentris yang diperkenalkan Barat tidak dapat disangkal lagi akan terus mempengaruhi penampilan manusia. Lihat Moeflich Hasbullah, " Pengantar Editor, Proyek Islamisasi Sains: Dekonstruksi Modernitas dan Rekonstruksi Alternatif Islam," dalam *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan,* ed. Moeflich Hasbullah (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm. xxviii-xxix. Dampak berupa gejala kegersangan batin dan kejiwaan modern adalah konsekuensi dari hal itu. Bahkan pendidikan di dunia muslim pun berurat berakar mengadopsi konsep Barat yang dikotomis dan tidak utuh. Lihat Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam, Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan Moralitas* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), hlm.145.

[35] Ibid, hlm.154.

menyentuh aspek aplikasi dan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat atau pengguna lulusan. Artinya, pendidikan Islam harus berupaya membangun manusia dan masyarakat yang utuh dan menyeluruh (*insān kāmil*) dalam semua aspek kehidupan yang berbudaya dan berperadaban yang tercermin dalam kehidupan manusia bertakwa dan beriman, berdemokrasi dan merdeka, berpengetahuan, berketerampilan, beretos kerja dan beramal saleh, berkepribadian dan berakhlakul karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta berkemampuan kompetitif dan kooperatif dalam era global dan berpikir lokal dalam rangka memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Dalam kerangka ini, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan meliputi aspek ilahiyyah (teosentris), fisik dan intelektual, kebebasan, akhlak, profesional dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya dna berperadaban, berkualitas, kreatif, dinamis sebagai *insân kâmil* dalam kehidupannya.[36]

Kelima, reorientasi kurikulum pendidikan Islam. Dalam bidang kurikulum, kurikulum pengajaran masih didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat *normatif, ritualistik* dan *eskatologis*. Apalagi materi ini kemudian disampaikan dengan semangat ortodoksi keagamaan yang memaksa peserta didik tunduk pada suatu meta narasi yang ada, tanpa diberi peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Bukan ortopraksis yaitu bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan nyata operasional.[37] Pada akhirnya agama

---

[36] Ibid, hlm.157.

[37] Amin Abdullah juga menyoroti kurikulum dan kegiatan pendidikan Islam yang selama ini berlangsung, yaitu: 1) pendidikan Islam lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teori keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis; 2) pendidikan Islam kurang *concern* terhadap bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna' dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam

dipandang sebagai suatu yang final yang harus diterima secara *taken for granted*. [38]

Mencermati beberapa kelemahan kurikulum pendidikan Islam di atas, maka dalam desain kurikulum harus diorientasikan pada: a) kemampuan mengetahui cara beragama yang benar; b) mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan, sehingga diharapkan dapat terbentuk perilaku manusia muslim yang memiliki komitmen, loyal serta dedikasi terhadap ajaran Islam dan sekaligus sebagai ilmuwan, peneliti, pengamat yang kritis untuk pengembangan keilmuan Islam yang memiliki kemampuan inovasi serta siap menerima dan menghadapi tantangan perubahan.[39]

Strategi pengembangan pendidikan Islam harus didasarkan pada kurikulum yang secara integral memiliki cakupan disiplin ilmu dan keterampilan yang dapat membentuk kompetensi-kompetensi tertentu dalam suatu

---

diri siswa lewat berbagai cara, media, dan forum; 3) pendidikan agama lebih menekankan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan pada aspek hafalan teks-teks keagamaan yang ada; 4) bentuk-bentuk soal ujian agama dalam sistem evaluasi menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif dan belum mempunyai bobot muatan "nilai dan "makna" spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari". Lihat Amin Abdullah, "Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam" dalam Abd. Munir Mulkan, et.al, *Religiusitas IPTEK* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 49-65.

[38] A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999). 132. Lihat juga Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 29. Muhammad Tholhah Hasan, salah seorang intelektual muslim dari kalangan NU pernah mengkritik bahwa tradisi pengajaran yang demikian membawa dampak lemahnya kreativitas. Kalau yang mendapat penekanan di pesantren adalah *fiqh oriented,* maka penerapan *fiqh* menjadi teralienasi dengan realitas sosial dan keilmuan serta teknologi kontemporer. Lihat Fajar, *Reorientasi Pendidikan,* 115-116.

[39] Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam*, 167

sistem yang utuh walaupun komponennya secara transparan berbentuk berbagai macama disiplin ilmu dan teknologi.[40]

Keenam, reorientasi metodologi pendidikan Islam. Harus diakui bahwa metodologi pendidikan Islam yang berjalan saat ini masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pendekatan hafalan dan hanya mewariskan sejumlah materi ajaran agama yang diyakini benar untuk disampaikan kepada anak didik tanpa memberikan kesempatan kepada anak didik agar disikapi secara kritis, mengoreksi, mengevaluasi dan mengomentari.

Sasaran setiap proses pembelajaran ditekankan pada asimilasi pembelajaran (*miximizing "student learning"),* dan bila perlu mengurangi porsi ceramah guru (*minimizing "teacher teaching")* dengan mengaktifkan peserta didik untuk mencari dan menemukan serta melakukan aktivitas belajar sendiri, sehingga konsep metodologi yang terbangun adalah pembelajaran (*learning*) bukan pengajaran (*teaching*).[41]

---

[40] Jusuf Amir Feisal, *Reformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 51.

[41]Terpenuhinya misi pendidikan tersebut sangat tergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan seting demokrasi pada peserta didiknya dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk belajar, yakni bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Sekolah bukan tempat pertunjukan bagi guru, tetapi tempat peserta didik untuk menambah dan memperkaya pengalaman belajarnya. Oleh sebab itu, pendidik harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang memberi peluang lebih besar bagi mereka untuk belajar. Sekolah harus menjadi *second home* bagi para peserta didik, mereka betah menghabiskan waktunya di sekolah, dengan belajar, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca dan aktivitas pembelajaran lainnya. John I. Goodlad, "Democracy, Education and Community", dalam *Democracy, Education and the School,* ed. Roger Soder (San Francisco: Jossey Bass, 1996), hlm. 113. Apabila konsep ini dilaksanakan, tentu akan menuntut fungsi pendidik sebagai fasilitator, dinamisator, mediator dan motivator,

Maka dari itu, metode pendidikan Islam yang digunakan adalah pembelajaran dengan menggunakan paradigma holistik, rasional, partsipatori, pendekatan empirik-deduktif, sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas, kreatif, inovatif yang mampu menerjemahkan dan menghadirkan agama dalam perilaku sosial dan individual di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Mampu mengembangkan dan mengamalkan ilmu serta keahliannya dengan bersumber pada ajaran Islam. Menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman keseharian, baik sebagai individu atau sebagai ilmuwan di tengah kehidupan modern yang semakin mengglobal, kompleks, kompetitif dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia. Selain itu, metode pendidikan Islam harus dapat mengembangkan potensi manusia demokratis yang bebas dari ketakutan, bebas berekspresi, dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya sesuai dengan ciri masyarakat madani Indonesia.[42]

Ketujuh, reorientasi manajemen dan sumber daya pendidikan Islam. Masalah klasik yang menjadi problem pokok pendidikan Islam adalah ketidakjelasan arah pengelolaan dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola pendidikan. Hal ini terkait dengan program kependidikan yang masih lemah dan pola rekrutmen tenaga kependidikan yang kurang selektif. [43]

Dengan demikian, masih lemahnya manajemen pendidikan sampai dewasa ini perlu disikapi dengan

---

sehingga dapat memberdayakan peserta didik untuk mampu mencari dan menemukan sendiri informasi yang diterimanya. Pendidik berupaya menciptakan iklim belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar dalam suasana yang dialogis, harmonis dan demokratis.

[42] Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam,* hlm.200.

[43] Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam*, hlm.14.

ketekunan untuk mengoptimalkan pengelolaan lembaga pendidikan. Otonomi bidang pendidikan yang menetapkan pembagian kewenangan pengelolaan bidang pendidikan dan kebudayaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah menuntut pengelolaan pendidikan secara lebih baik. Untuk itu diperlukan para manajer institusi pendidikan yang profesional, kredibel dan akuntabel dalam menjalankan program pendidikan nasional, tak terkecuali semua pimpinan lembaga pendidikan Islam.[44]

Berbagai sumber daya (*resources*) yang dimiliki lembaga pendidikan Islam harus dikerahkan dan dimanfaatkan untuk dapat menghadapi perubahan eksternal yang dipengaruhi dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pimpinan lembaga pendidikan Islam harus mendesain format pendidikan yang kompetitif dan inovatif untuk keperluan masa depan. Hanya dengan kesiapan manajemen pendidikan yang efektif, lembaga pendidikan Islam dapat merespon perubahan sehingga tidak akan mengalami stagnasi (kemacetan) dan ketinggalan dalam dinamika perubahan yang cepat.[45]

Berdasarkan reorientasi tersebut di atas, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam seyogyanya mulai memikirkan kembali desain program pendidikan untuk menuju masyarakat madani, dengan memperhatikan relevansinya dengan bentuk atau kondisi serta ciri masyarakat madani. Maka untuk menuju masyarakat madani, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendisain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing secara kompotetif dengan

---

[44] Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 5.

[45] Ibid, hlm.1-2.

lembaga pendidikan umum atau mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara kompotetif, misalnya mempersiapkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia.*

8
PENUTUP

Pendidikan Islam sebagai fenomena kehidupan sosial dan kultural tidak dapat lepas dari sistem dan nilai kehidupan. Sistem dan nilai tersebut dibangun atas asumsi bahwa dalam diri manusia ada aspek-aspek lahiriah, psikologis dan rohaniah. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia dalam fenomena pendidikan adalah paduan antara manusia sebagai fakta dan manusia sebagai nilai. Tiap manusia memiliki nilai tertentu sehingga situasi pendidikan memiliki bobot nilai individual, sosial dan bobot moral.

Itu sebabnya pendidikan Islam dalam praktiknya adalah fakta empiris yang sarat nilai dan interaksi manusia dalam pendidikan Islam tidak hanya timbal balik dalam arti komunikasi dua arah melainkan harus lebih tinggi mencapai tingkat manusiawi. Untuk mencapai tingkat manusiawi itulah pada intinya pendidikan Islam bergerak menjadi agen perubahan untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban yang humanis.

Untuk itu, pendidikan Islam dapat dilakukan dengan pendekatan yang *integrated*, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Pendidikan nilai bukan hanya terdapat dalam pendidikan agama saja, melainkan

juga terdapat pada pelajaran logika, bahasa, evaluasi, biologi, ilmu eksak dan sebagainya. Sejalan dengan hal ini, pendidikan Islam harus melibatkan seluruh komponen. Disamping harus didukung oleh oleh kemauan, kerja sama yang kompak dan usaha-usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga, sekolah dan masyarakat (*stakeholders*). Orang tua di rumah harus meningkatkan perhatian kepada anak-anaknya, dengan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, teladan, dan pembiasaan yang baik. Orang tua harus berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang dan tentram. Perguruan tinggi juga harus berupaya menciptakan lingkungan yang agamis, seperti membiasakan shalat berjamaah, menegakkan disiplin, ketertiban, kejujuran dan tolong menolong, sehingga nilai-nilai agama menjadi kebiasaan, tradisi atau budaya seluruh civitas akademika. Sementara masyarakat juga harus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan kepribadian muslim.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan Islam harus diarahkan indikatornya kepada perubahan kualitas perilaku anak didik, misalnya perilaku berfikir, perilaku sosial, perilaku pribadi, perilaku menanggapi dan menyelesaikan masalah, perilaku menyikapi keadaan, perilaku kemandirian dan lain-lain. Demikian pula, akal dan kecerdasan anak didik harus dikembangkan dengan baik. Karena sekolah/madrasah bukan hanya berfungsi sebagai *transfer of knowledge* (pemindahan pengetahuan) akan tetapi juga berfungsi sebagai *transfer of value* (pemindahan nilai), sehingga anak didik menjadi terampil dan berintelektual baik secara fisik maupun psikis.*

DAFTAR PUSTAKA

A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Abdalla, Ulil Abshar. "Humanisasi Kitab Kuning: Refleksi dan Kritik atas Tradisi Intelektual Pesantren" dalam *Pesantren Masa Depan,* ed. Marzuki Wahid, et.al.. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Abdullah, Amin. " Problem Epistemologis Metodologis Pendidikan Islam", dalam *Religiusitas Iptek,* ed. Abdul Munir Mulkhan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

--------. "Perspektif Link and Match Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Islam" dalam *Pendidikan Islam dalam peradaban Industrial,* ed. Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

--------. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997.

Abdurrahmansyah, *Wacana Pendidikan Islam, Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan Moralitas.* Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005.

al-Abrashi, Muhammad Athiyah. *al-Tarbiyah al-Islamiyah.* tt: Dar al-Qaumiyah, 1964.

Achmadi. "Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan", dalam *Paradigma Pendidikan Islam,* ed. Ismail SM, et.al. Yogyakarta : Pustaka Pelajar-Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2001 .

--------. *Ideologi Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Adiningsih, C. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa danBudayanya* . Jakarta: Rineka Cipta, 2004 .

Agustian, Ary Ginanjar. *ESQ, Emotional Spiritual Quotient.* Jakarta: Arga, 2001.

Ahmad, Amrullah. "Kerangka Dasar Masalah Pendidikan Islam," dalam ed. Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan fakta.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Ahmad, Zainal Abidin. *Negara Utama: Teori Kenegaraan dari Sarjana Islam al-Farabi.* Jakarta: Tintamas, tt.

Ahmed, Akbar S. *Postmodernism and Islam.* New York: Routledge,1992.

Akhwan, Mudzaffar. "Pendidikan Moral Keagamaan Anak dalam Masyarakat, Mempertegas Fenomena Pesantren Kilat dalam Pendidikan Islam", dalam *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial,* ed. Muslih Usa dan Aden Wijdan AZ. Yogyakarta: Aditya Media,1997.

Ardhana, Wayan. *Dasar-dasar Kependidikan.* Malang: FIP-KIP, 1986.

Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

--------. *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner.* Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

--------. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum).* Jakarta: Bina Aksara, 1991.

Arifin, Syamsul dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam.* Malang: UMM Press, 2001.

Arifin, Syamsul. *Merambah Jalan Baru dalam Beragama.*Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000.

Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Assegaf, Abdur Rahman. *Pendidikan Islam di Indonesia.* Yogyakarta: SUKA Press, 2007.

Asy'ari, Hasyim. *Adâb al-'âlim wa al-muta'allim fîma Yahtâj Ilaih al-Muta'allim fî Ahwâl Ta'allumih wa ma yatawaqqaf al-Mu'alim fî maqâmat Ta'lîmih.* Jombang: Turats al-Islamiy, 1415 H.

Atiqullah. "Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah" dalam *Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAINPamekasan, Vol. 2, No. 2, 2007.

Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan Fakta dan Tantangan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

--------. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos, 1999.

--------. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru.* Jakarta: Logos, 2000.

Badaruddin, Kemas. *Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Baso, Ahmad. *Civil Society vs Masyarakat Madani.* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat.* Bandung: Mizan, 1995.

Daulay, Haidar Putra. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

--------. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya.* Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.

--------. *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan.* Jakarta: Dirjen Bagais, 2005.

Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak didik dalam Interaktif Edukatif.* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Dohaish, Abd al-Latif Abdullah Ibn. *Growth and Development of Islamic Libraries.* tt: Der al-Islam, 1989.

Drajat, Zakiah. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental.* Jakarta: Gunung Agung,1978.

Fajar, A. Malik. *Reorientasi Pendidikan Islam.* Jakarta: Fajar Dunia, 1999.

--------. et.al. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Logos, 2001.

--------. et.al. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Logos, 2001.

Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fanani, Muhyar. "Mewujudkan Dunia Damai Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat" dalam *Ijtihad* No.1 tahun 3, 2003.

Feisal, Jusuf Amir. *Reformasi Pendidikan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Fuad Jabali dan Jamhari (ed.), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia.* Jakarta: Logos, 2002.

Goleman, Daniel. *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: Gramedia, 1999.

Goodlad, John I. "Democracy, Education and Community", dalam *Democracy, Education and the School,* ed. Roger Soder. San Francisco: Jossey Bass, 1996.

Gunawan, Ary H. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Haidar, M.Ali. "Akar Tradisi Pesantren dalam Masyarakat Indonesia," dalam *Tarekat, Pesantren dan Budaya Lokal,* ed. M. Nazim Zuhdi, et.al.. *Surabaya:* Sunan Ampel Press, 1999.

Hamalik, Omar. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung : Sinar Baru, 2000.

Hamzah, Amir. *Perubahan Pendidikan dan Pengajaran Islam.* Jakarta: Mulia Offset, 1989.

Hari, C. Syamsul. "Spiritualitas dan keberbagaian Agama" dalam *Atas Nama Agama,* ed. Andito. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Hasan, M. Ali dan Mukti Ali. *Kapita Selekta Pendidikan Islam.* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003.

Hasan, Muhammad Tholchah. *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya.* Jakarta: Galasa Nusantara, 1987.

Hasbullah, Moeflich. " Pengantar Editor, Proyek Islamisasi Sains: Dekonstruksi Modernitas dan Rekonstruksi Alternatif Islam," dalam *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan,* ed. Moeflich Hasbullah. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.

Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.

-------. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendra F, Sofyan. "Ijazah Palsu Cermin Pendidikan Buruk," *Jawa Pos* (1 Maret 2004).

Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society.* Jakarta: LP3ES, 1996.

Hitami, Munzir *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam.* Pekanbaru: Infinite Press,2004.

Husaini, Adian. *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual.* Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

Husien al-Munawwar, Said Aqil. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam.* Jakarta: Ciputat Press,2003.

Ibrahim, Anwar. "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani," dalam *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa,* ed. Aswab Mahasin. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1995.

Idi, Jalaluddin dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Imawan, Riswandha. "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi," dalam *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi,* ed. Arief Subhan. Jakarta: LSAF, 1999.

Isjoni. *Gurukah Yang Dipersalahkan? Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan Kita*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ismail, Faisal. *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur.* Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI,2002.

Jabali, Fuad dan Jamhari (ed.), *IAIN dan Modernisasi di Indonesia.* Jakarta: Logos,2002.

Jalal, Abd al-Fatah. *Asas-asas Pendidikan Islam* ter. Herry Noer Ali. Bandung: Diponegoro, 1988.

Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filfasat dan Pendidikan.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Jalaluddin dan Usman said. *Filsafat Pendidikan Islam : Konsep dan Perkembangan Pemikirannya.* Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Jamali. "Kaum Santri dan Tantangan Kontemporer" dalam *Pesantren Masa Depan*, ed. Marzuki Wahid, et.al. Bandung: Pustaka Hidayah,1999.

Jaya, Yahya. *Spiritualisme Islam dalam Menubuhkembangkan Kpribadian dan Kesehatan Mental.* Jakarta: Ruhana, 1994.

Khaeruddin dan Mahfud Junaidi. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasinya di Madrasah.* Yogyakarta: Pilar Media, 2007.

Kosim, "Madrasah di Indonesia (Pertumbuhan dan Perkembangan)" dalam *Tadris Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan, Vol. 2 No.1, 2007.

-------. *Ilmu Pendidikan Islam.* Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.

Langgulung, Hasan. *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*. Jakarta: Gaya Media Pratama,2002.

-------. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam.* Bandung: al-Ma'arif, 1980.

-------. *Kreativitas dan Pendidikan Islam; Analisis Psikologi dan Falsafah*. Jakarta : Pusataka al-Husna, 1991.

-------. *Pendidikan Islam dalam Abad ke-21.* Jakarta: Pustaka Husna Baru, 2003.

Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren.* Jakarta: Paramadina, 1997.

-------. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi.* Jakarta: Paramadina, 1999.

-------. *Masyarakat Madani dan Intervensi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,* dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani.* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Mahmood, Abdul Halim. *Hal Ihwal Tasawwuf, dari al Munqidz Min al Dlalâl*, ter. Abu Bakar Basymeleh. Jakarta: Darul Ihya', 1994.

Maksum. *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya.* Jakarta : Logos, 1999.

Mansur, Ibn. *Lisan al-Arab,* vol. 5. Kairo: dar al-Misriyah, 1992.

Mas'udi, Masdar Farid. "Demokrasi dan Islam," dalam *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial,* ed. M.Masyhur Amin dan Mohammad Najib. Yogyakarta: LKPSM NU-DIY, 1993.

Maskawaih, Ibn. *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq*. Kairo: Dar al-Kutub, t.t.

al-Masri, Hasy'at. *Menyambut Kedatangan Bayi*. Jakarta: Gema Insani Perss, Jakarta, 1998.

Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21.* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.

Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos, 1999.

Muchtar, Affandi. "Misi Universalitas Islam dalam Membangun Masyarakat Religius" dalam *Beragama di abad Dua Satu.* ed. A. Syafi'i Mufid dan Munawar Fuad Noeh. Jakarta: Dzikrul Hakim,1997.

Mufid, "Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani" dalam Tim Ed. PPS UMM, *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3.* Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muhaimin dan Abd. Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya.* Bandung: Trigenda Karya, 1993.

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

-------. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

-------. "Reorientasi Pengembangan Guru" dalam Ed. Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam, Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan.* Malang: UIN Malang Press, 2006.

Muhajir, Asa'ril. "Studi Komparasi Pemikiran al-Ghazâlî dan John Lock Tentang Pendidikan Anak", *Jurnal Dinamika*, Vol. No 2, Oktorber, 2003.

Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam.* Kuala Lumpur : ABIM, 1980.

Muhtarom H.M, *Reproduksi Ulama di Era GlobalisasiResistansi Tradisional Islam .* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mukhtar. *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Misak Galiza, 2003.

al-Munawwar, Said Aqil Husein. *Aktualisasi Nilai-nilai Qurani dalam Pendidikan Islam.* Ciputat: Ciputat Press, 2003.

Mursi, Muhammad Munir. *al-Tarbiyah al-Islamiyah, Usuluha wa Tatawwuruha fi al-Bilad al-Arabiyah.* Kairo: Alam al-Kutub, 1977.

Musa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama.* Yogyakarta: LKiS, 2007..

Muthahhari, Murtadha. *Falsafah Akhlak.* Bandung: Pustaka Hidayah,1995.

Nafi', M. Dian. et.al. *Praksis Pembelajaran Pesantren.* Yogyakarta: Institute for Training and Development, 2007.

Nasir, M. Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nasution, Yasir. *Manusia Menurut Al-Ghazâlî.* Jakarta : Rajawali Press, 1988.

Nata, Abuddin. *Akhlak/Tasawuf.* Jakarta: RajaGrafindo Persada,1994.

-------. *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2003.

-------. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

-------. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Nizar, Samsul dan Muhammad Syaifudin, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis,Teoritis dan Praktis.* Jakarta: Ciputat Press, 2002.

-------. *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam, Potret Timur TengahEra Awal dan Indonesia.* Ciputat: Quantum Teaching, 2005.

-------. *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942.* Jakarta : LP3ES, 1988. Zuhairini. et.al, *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

-------. *Pembangunan di Indonesia.* Jakarta: Mutiara,1987.

Nurhakim, Moh. *Islam, Doktrin, Pemikiran dan Realitas Historis.* Malang*:* UMM Press,1998.

Nurkancana, Wayan dan Sumartana. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Prasedjo, Sudjoko. et.al, *Profil Pesantren.* Jakarta: LP3ES, 1982.

Purwanto, Ngalim. *Prinsip-prinsip dan tekhnik Evaluasi Pengajaran.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Qadir, Zuly. "Membangun Wacana Agama yang Toleran" dalam *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman,* ed. Nur Achmad. Jakarta: Kompas, 2001.

Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* vol. 15. Beirut: Dar al-Ahya', tt.

Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*: *Membangun dari Bawah.* Jakarta: P3M, 1985.

-------. *Intelektual-Intelegensia dan Peilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim.* Bandung: Mizan, 1993.

Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Logos, 2001.

Rahman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis.* Jakarta: Paramadina, 2001.

Rahmat, Jalaluddin. "Islam Menyongsong Peradaban Dunia Ketiga" dalam *Ulumul Qur'an* (Vol.2,1989).

Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif.* Bandung : Mizan,1999.

Rahmawati, Riri Fitria. "Tipologi Pemikiran Ke-Islam-an dalam Perspektif Muhammad Abid al-Jabiri," dalam *Academia, Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Kebudayaan Islam*, Lembaga Penelitian IAI. Nurul Jadid Probolinggo, (Vol. 2, No.2, September 2007.

Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta.* Bandung: Mizan, 1987.

Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya.* Jakarta: Kalam Mulia, 2009.

Ridla, Muhammad Jawwad. *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam, Perspektif Sosiologis-Filosofis,* terj. Mahmud Arif. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam.* Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm.90.

al-Rouba'ie, Amer. "Globalisasi dan Posisi Peradaban Islam" dalam *Islamia* (No.4/Januari-Maret 2005).

Saefuddin, Ahmad Muflih. "Tata Nilai dan Kehidupan Spiritual Abad 21" dalam *Permasalahan Abad 21: Sebuah Agenda,* ed. Said Tuhuleley. Yogyakarta*:* SI Press,1993.

Said, Imam Ghazali. "Islam dan Pluralitas Masyarakat Bangsa" dalam *Islam di Tengah Arus Transisi,* ed. Abdul Mun'im D.Z. Jakarta: Kompas, 2000.

Saleh, Taufikurrachman. "Sekolah Agama dalam Perubahan Sisdiknas," *Jawa Pos* (10 April 2004).

Samani, Muchlas. et.al. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia.* Surabaya : Penerbit SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006.

Sanaky, Hujair AH. *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia.* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.

Saridjo, Marwan. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia.* Jakarta: Dharma Bakti, 1982.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama.* Bandung: Mizan, 1999.

Shihab, Quraisy. *Membumikan al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1995.

Shimogaki, Kazou. *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme; Telaah Kritis ata Pemikiran Hasan Hanaffi,* ter. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Shofan, Moh. *Pendidikan Berparadigma Profetik, Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam.* Yogyakarta: IRciSoD, 2004.

Siradj, Said Aqil. "Membangun Martabat Bangsa Melalui Pendidikan", dalam ed. M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esha, *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam.* Malang: UIN Press, 2004.

Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.

Soedjatmiko, Wuri. "Pendidikan Tinggi dan Demokrasi" dalam *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi,* ed. Sindhunata. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

-------. *Pengaruh Pendidikan Agama terhadap Kehidupan Sosial.* Yogyakarta: Tiara wacana, 1988.

Solichin, Mohammad Muchlis. "Fitrah; Konsep dan Pengembangannya dalam Pendidikan Islam" dalam *Tadrîs Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 2. Nomor 2. 2007).

Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sukamto. *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren.* Jakarta: LP3ES, 1999

Sulthon, M. dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global.* Yogyakarta: LaksBang, 2006.

Suparlan. *Menjadi Guru Efektif.* Yogyakarta: Hikayat, 2005.

-------. *Guru sebagai Profesi.* Yogyakarta: Hikayat, 2005.

Supiana. *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung, dan Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Sebuah Pengantar.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III.* Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

al-Syaibani, Mohammad Oemar Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam,* terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Syamsuddin, Dien. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani..* Ciputat: Logos, 2000.

Syari'ati, Ali. *Membangun Masa Depan Islam,* ter. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1994.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islami.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

-------. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Thoib, Ismail. *Wacana Baru Pendidikan, Meretas Filsafat Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Tholkhah, Imam dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

-------. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

-------. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 702

Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*. Yogyakarta: SI Press,1994.

Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam untuk IAIN, STAIN dan PTAIS.* Bandung : Pustaka Setia, 1997.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam,* ter. Saifullah dan Hery Noer Aly. Bandung: al-Syifa, t.t.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usman, Husaini. "Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan dan Kebudayaan,* 028 (Maret,2001), 97.

Wahid, Abdurrahman. "Pondok Pesantren Masa Depan" dalam *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren,* ed. Marzuki Wahid, et.al.. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

-------. *Bunga RampaiPesantren.* t.t.:CV. Dharma Bhakti, t.t.

Wijaya, Cece. et.al. *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.

Wijdan SZ, Aden. "Pendidikan Islam dalam Pluralisme Agama Suatu Kajian Perspektif Kultural-Sosiologis" dalam Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial.* Yogyakarta: Aditya Media, 1997

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah.* Bandung: Mizan, 1994.

Yasmadi. *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional.* Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial.* Jakarta: P3M, 1986.

Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Zuhairini, et. al., *Methodik Khusus Pendidikan Agama* . Malang: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1983.

TENTANG PENULIS

Siswanto. Lahir di Pamekasan, 15 Pebruari 1978. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di MI. Al-Falah III Larangan, MTs Al-Falah dan MA. Al-Falah Sumber Gayam Kadur Pamekasan. Sedangkan program S1 ditempuh di IAI. Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selesai tahun 2001 sebagai wisudawan terbaik. Selama menjadi mahasiswa, aktif di Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan HMJ Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel dengan konsentrasi Pendidikan Islam (2004). Gelar Doktor diperoleh di PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan Konsentrasi Pendidikan Islam (2013).

Sejak tahun 2005 diangkat menjadi dosen tetap STAIN Pamekasan dan pada tahun 2012 – sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Tarbiyah di perguruan tinggi yang sama. Ia juga aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan seperti di Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pendidikan Maarif NU Cabang Pamekasan.

Sebagai seorang akademisi, ia aktif mengisi kajian-kajian keilmuan serta menghasilkan beberapa karya tulis. Di antara karya tulis berupa buku adalah *Sejarah Pendidikan Islam* (Buku Ajar), *Standar Nasional Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya di Madrasah* (Pustaka Nusantara Yogyakarta, 2011), *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan* (UIN Suka Press Yogyakarta, 2012),

Dinamika Pendidikan Islam, Perspektif Historis (Pena Salsabila, 2013), *Pendidikan Islam Kontekstual, Diskursus Pendidikan Islam dalam Pergulatan Pemikiran Kontemporer* (Pena Salsabila, 2013), *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* (Pena Salsabila, 2013), *Filsafat dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Pena Salsabila, 2015), *Pendidikan Agama Islam, Aplikasi dan Pengembangannya di Sekolah* (Pena Salsabila, 2015) dan beberapa artikel yang dimuat di beberapa jurnal seperti *Teologi Pendidikan Islam: Diskursus Unity of Knowledge Perspektif Ismail Raj'i Al-Faruqi*, *Filsafat Progressivisme dan Demokrasi Pendidikan: Menggagas Pembelajaran Demokratis*, *PTAI Sebagai Basis Pembangunan Moral (Menuju Wawasan Akademik yang Lebih Islami), Meningkatkan Mutu Madrasah (Pendekatan Total Quality Management/TQM), Pendidikan sebagai Paradigma Pembebasan (Telaah Filsafat Pendidikan Paulo Freire), Kebangkitan Madrasah di Dunia Islam (Kajian Sosio-Historis tentang Madrasah Nizhamiyah), Program Sertifikasi Guru: Antara Tuntutan Kesejahteraan dan Kualitas, Rekonstruksi Pendidikan Islam (Menimbang Pemikiran Muhammad Abduh), Pendidikan Agama Berwawasan Rahmatan lil Alamin (Membincang Pendidikan Islam dalam Tantangan Pluralisme Agama), Total Quality Management (TQM): Sebuah Ikhtiar Menciptakan Sekolah Bermutu Terpadu, Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren* dan sebagainya.

Di samping itu, ia telah menghasilkan beberapa penelitian, yaitu: *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di RSBI SMP Negeri Pamekasan* (DIPA STAIN Pamekasan 2009), *Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah*; *Penerapan Manajemen Mutu Terpadu di MAN Pamekasan* (DIPA STAIN Pamekasan 2010), *Pengembangan Budaya Agama dalam Komunitas Sekolah; Studi Kasus RSBI SMAN 1 Pamekasan* (Balitbang Semarang 2010), *Strategi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di MA*. *Al-Amien Putri Prenduan Sumenep* (DIPA STAIN 2011), dan *Model Pengembangan Pendidikan Karakter pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMPN 1 Pamekasan* (DIPA STAIN 2012), *Standar Kompetensi Lulusan Pesantren*

Mu'adalah; Studi Kasus Dirasatul Mu'alimin Islamiyyah Banyuanyar Palengaan Pamekasan (DIPA STAIN 2013), dan *Pengembangan Pendidikan Profesi Guru pada Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan* (DIPA STAIN 2014) dan *Model Pembelajaran pada Pesantren Anak di Maktab Nubdzatul Bayan Palduding Pagantenan Pamekasan* (DIPA STAIN 2015), *Pengembangan Pendidikan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Nasional SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan*, (Penelitian Unggulan Interdisiplinier, 2016) dan *Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan Melalui Pembelajaran Berparadigma Konstruktivistik pada Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Madura*, (Penelitian Pengembangan Program Studi, 2018.)

IAIN MADURA

IAIN MADURA